

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER I
TAHUN 2026



Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel,
Transparan dan Berorientasi
pada Hasil



BALAI PENGAMANAN ALAT DAN
FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

DIREKTORAT JENDERAL
FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

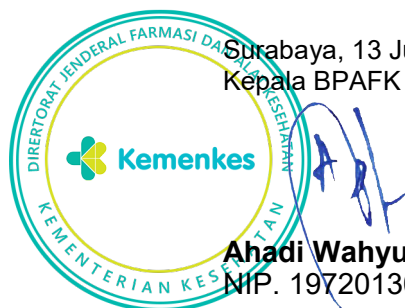


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sesuai Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.

Penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan di dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



Surabaya, 13 Juli 2026
Kepala BPAFK Surabaya,

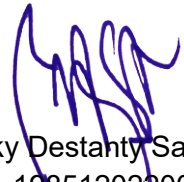
Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
NIP. 197201301992031002

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) SURABAYA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya untuk Semester I Tahun Anggaran 2026 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPAFK Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Surabaya, 13 Juli 2026
Satuan Kepatuhan Internal



Ricky Destanty Santoso, Amd
NIP. 198512022009122001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester I Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya laporan ini menginformasikan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari pencapaian sasaran program dan kegiatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2026 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2025-2029.

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, penilaian atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Evaluasi SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2019-2025

No	Tahun	Hasil Penilaian	Kategori
1	2019	92,53	AA
2	2020	79,41	BB
3	2021	74,15	BB
4	2022	79,40	BB
5	2023	82,00	A
6	2024	86,10	A
7	2025	90,50	AA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, BPAFK Surabaya merupakan salah satu UPT di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan melaksanakan Program Sistem Ketahanan Kesehatan yang mendukung pencapaian sasaran program meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan di peredaran. Selain itu, BPAFK Surabaya juga melaksanakan Program Dukungan Manajemen.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BPAFK Surabaya tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Rincian Target Realisasi Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja BPAFK Surabaya tahun 2026

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi Semester 1	Capaian (%)
1	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang memenuhi ketentuan	1	Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	Sarana	38	36	94,74
2	Meningkatnya produk alkes dan PKRT yang aman dan bermutu	2	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	Alat Kesehatan	25	24	96,00
3	Meningkatnya pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	3	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	RS dan Puskesmas	619	580	93,70
		4	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	Produk	75	30	40,00
		5	Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	Alkes dan Sarpras	74.000	35.459	47,92
		6	Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK	Metode pengujian dan kalibrasi	18	11	61,11
		7	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Dokumen	74	76	102,70
		8	Penambahan kemampuan jenis pelayanan	Layanan	13	15	115,38
		9	Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	Persen	80	51,41	64,26
		10	Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Dokumen	57	53	92,98
4	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	11	Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Nilai	83	90,50	109,04
		12	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Nilai	83,00	84,74	102,10
		13	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat	Nilai	94	61,38	65,30

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Semester 1	Capaian (%)
		dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya				
		14 Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Nilai	82	82,47	100,57
		15 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Persen	95	100	105,26
		16 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Nilai	3,10	N/A	N/A
		17 Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Rupian	19.000.000.000	5.127.298.590	26,99

Secara keseluruhan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya hampir mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2026. Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam mencapai target indikator sasaran di tahun pertama Rancangan Renstra 2025-2029 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal serta penguatan koordinasi pusat terutama dalam perencanaan program/kegiatan, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 dengan alokasi sebesar Rp 33.718.747.000,- yang terdiri dari Program Sistem Ketahanan Kesehatan sebesar Rp 8.929.846.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 24.788.901.000,-. Selama pelaksanaan kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2026, alokasi Sumber Dana Rupiah Murni dan PNBPN mengalami efisiensi anggaran (sebagian alokasi terblokir) sebesar Rp 4.933.740.000,- (15% dari total pagu) dan terdapat 7 (tujuh) kali revisi dikarenakan adanya surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tentang Pemenuhan Anggaran Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 dan revisi Rencana Penarikan Dana.

Dalam pelaksanaannya, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya memiliki upaya yang telah dilakukan pada Semester I Tahun 2026 antara lain:

1. Kemitraan dengan RS Kemenkes Surabaya

Salah satu kegiatan kemitraan dilaksanakan di RS Kemenkes Surabaya yang merupakan mitra BPAFK Surabaya dan akan bekerja sama melalui perjanjian kerja sama. Kegiatan ini dilakukan dengan menargetkan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerja sama dengan BPAFK Surabaya. Kegiatan ini diprioritaskan untuk RS besar yang bisa menambah PNBP.

Gambar 1. Kemitraan dengan RS Kemenkes Surabaya



2. Pertemuan Pertemuan Persiapan Layanan Uji Produk PCR

Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas Persiapan Pengembangan Kemampuan Layanan Uji Produk/Pengujian/Kalibrasi Polymerase Chain Reaction (PCR)

Gambar 2. Pertemuan Persiapan Layanan Uji Produk PCR



3. Kunjungan Mahasiswa Universitas Strada Indonesia Kediri

Kegiatan kunjungan mahasiswa ini dilaksanakan pada 12 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antara praktisi dengan sivitas akademika guna memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik serta menjadi bukti dukungan BPAFK Surabaya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akademik.

Gambar 3. Kunjungan Mahasiswa Universitas Strada Indonesia Kediri



4. Pertemuan Diskusi Penatausahaan dan Pelaporan BMN

Pada tanggal 18 Juni 2026, telah dilaksanakan kegiatan Diskusi Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) di BPAFK Surabaya. Kegiatan Diskusi Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan BMN Persediaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai ketentuan penatausahaan dan pelaporan BMN Persediaan, mengidentifikasi akar permasalahan atas temuan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini mengundang narasumber dari KPPN Surabaya dan diikuti oleh pegawai BPAFK Surabaya dan undangan peserta dari BBLKM Surabaya, Poltekkes Surabaya, BKKBN Surabaya, dan BPOM Surabaya.

Gambar 4. Kegiatan Pertemuan Diskusi Penatausahaan dan Pelaporan BMN Persediaan di BPAFK Surabaya



5. Audiensi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di RSUD Waluyo Jati Probolinggo
Kegiatan ini merupakan satu dari beberapa kegiatan audiensi yang dilakukan oleh Kepala BPAFK Surabaya guna membangun komunikasi efektif dan mengidentifikasi potensi kerja sama di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain menargetkan perluasan potensi kemitraan dengan fasyankes, kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi dalam mendukung peningkatan mutu, keamanan, dan keselamatan penggunaan alat kesehatan.

Gambar 5. Kegiatan Audiensi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di RSUD Waluyo Jati Kab. Probolinggo



6. Pameran Hospital Expo di Grand City
Pameran dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2026 di Grand City Convention Hall. Kegiatan pameran merupakan sarana untuk memperkenalkan tugas, fungsi, layanan, serta inovasi yang dimiliki instansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membangun komunikasi, memperluas jejaring kemitraan, serta menggali kebutuhan dan masukan dari calon pengguna layanan.

Gambar 6. Pameran Hospital Expo di Grand City



7. Inspeksi Layanan Pengujian Kalibrasi Alkes di RSUD Haji Surabaya

Kegiatan inspeksi layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan ini dilaksanakan oleh Kepala BPAFK Surabaya dan tim kerja pelayanan teknis untuk melihat secara langsung pelaksanaan pengujian kalibrasi oleh petugas BPAFK Surabaya di fasyankes. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan layanan berjalan sesuai standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, memperoleh umpan balik dari pengguna layanan, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan.

Gambar 7. Inspeksi Layanan Pengujian Kalibrasi Alkes di RSUD Haji Surabaya



8. Koordinasi Pelayanan dengan RSUD Saiful Anwar Malang

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya mengupayakan pelayanan prima dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelayanan salah satunya dengan

Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang yang merupakan rumah sakit rujukan provinsi tipe A.

Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang merupakan pelanggan BPAFK Surabaya yang telah bekerja sama melalui MoU. Koordinasi ini meliputi kegiatan entry meeting kegiatan pelayanan pengujian kalibrasi dan inspeksi sarana prasarana alat kesehatan serta tindak lanjut kerja sama pengampunan yang memfasilitasi pelaksanaan kalibrasi internal terhadap 12 jenis alat kesehatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan.

Gambar 8. Koordinasi Pelayanan dengan RSUD Saiful Anwar Malang

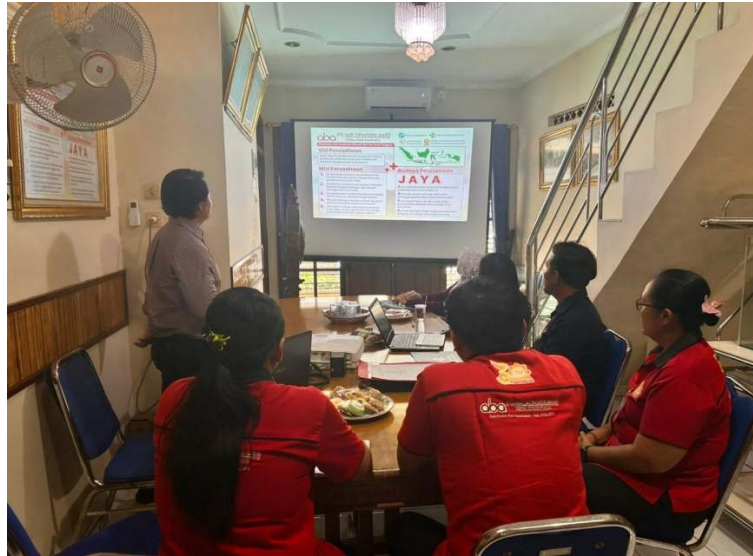


9. Kegiatan Inspeksi paska sertifikasi CDAKB

Kegiatan Inspeksi paska sertifikasi CDB terhadap Distributor Alat Kesehatan yang telah mendapatkan sertifikat standar CDB untuk memastikan distributor telah menjalankan praktik distribusi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam sertifikasi, serta menjaga mutu, keamanan, dan manfaat alat kesehatan yang diedarkan. Pada semester I tahun 2026 kegiatan ini telah dilaksanakan pada 2 (dua) distributor yaitu PT. Adi Bharata Asty yang berlokasi Bali dan PT. Azhar Sarana Global yang berlokasi di Jawa Timur .

Gambar 9. Kegiatan Inspeksi paska sertifikasi CDAKB





Upaya yang telah dilaksanakan diatas diharapkan mampu mendukung capaian kinerja BPAFK Surabaya tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
E. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. PERJANJIAN KINERJA	20
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026	23
BAB III	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
1. PENGUKURAN KINERJA	25
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	31
B. REALISASI ANGGARAN	94
C. SUMBER DAYA MANUSIA	96
D. BUDAYA KERJA	102
BAB IV	105
PENUTUP.....	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Evaluasi SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2019-2025	iii
Tabel 2. Rincian Target Realisasi Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja BPAFK Surabaya tahun 2026	iv
Tabel 3. Sasaran Program Sistem Ketahanan Kesehatan serta Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	16
Tabel 4. Indikator Kinerja dan Target sesuai Program Sistem Ketahanan Kesehatan serta Program Dukungan Manajemen di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan untuk UPT Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2025-2029	17
Tabel 5. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan pada UPT Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	18
Tabel 6. Sasaran Kegiatan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	20
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026	21
Tabel 8. Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026	23
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja BPAFK Surabaya Semester 1 Tahun 2026	26
Tabel 10. Sarana Distribusi Alkes yang telah Dilakukan Inspeksi CDB	31
Tabel 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan Semester I Tahun 2026	32
Tabel 12. Target, realisasi dan capaian indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk <i>post market</i> Semester I Tahun 2026	36
Tabel 13. Tabel Realisasi Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan / atau kalibrasi	38
Tabel 14. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi Semester I tahun 2026	38
Tabel 15. Jenis Prototipe Alat Kesehatan	41
Tabel 16. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK Surabaya Semester I tahun 2026	42
Tabel 17. Jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	45
Tabel 18. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK Surabaya Triwulan I tahun 2026	45
Tabel 19. Target, realisasi dan capaian indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK Semester I Tahun 2026	49
Tabel 20. Realisasi Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	51
Tabel 21. Target, realisasi dan capaian indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi Semester I 2026	55
Tabel 22. Target, realisasi dan capaian indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan Semester I 2026	58
Tabel 23. Realisasi Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	60
Tabel 24. Target, realisasi dan capaian indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi Semester I Tahun 2026	62

Tabel 25. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Semester I Tahun 2026	64
Tabel 26. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026	68
Tabel 27. Target, realisasi dan capaian indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) tahun 2026.....	71
Tabel 28. Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester 1 Tahun 2026.....	76
Tabel 29. Target, Realisasi dan Capaian Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026.....	80
Tabel 30. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester I Tahun 2026.....	82
Tabel 31. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026.....	85
Tabel 32. Target, realisasi dan capaian indikator Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester 1 Tahun 2026.....	88
Tabel 33. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2026.....	91
Tabel 34. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran berdasarkan Rincian Output BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2026	94
Tabel 35. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2026	95
Tabel 36. Jumlah ASN di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jabatan.....	98
Tabel 37. Pemenuhan Kebutuhan ASN di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Peta Jabatan.....	99
Tabel 38. Jumlah ASN di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Pendidikan	100
Tabel 39. Jumlah ASN di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jenis Kelamin	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Sistem Ketahanan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026	28
Grafik 2. Target, Realisasi dan Capaian Indikator jumlah sarana distribusi alkes non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB Semester I Tahun 2025 - Semester I Tahun 2026	33
Grafik 3. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk <i>post market</i> Semester I Tahun 2025 - Semester I Tahun 2026	36
Grafik 4. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi Semester I tahun 2025 - Semester I tahun 2026	39
Grafik 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Prototipe Produk Alat Kesehatan yang Diuji BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2025 - BPAFK Semester I Tahun 2026	42
Grafik 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang Dilakukan Kalibrasi Semester I Tahun 2025 - Semester I Tahun 2026	46
Grafik 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK Semester I 2025 dan Semester I 2026	49
Grafik 8. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi Semester I 2025 dan Semester I 2026	55
Grafik 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan Semester I 2025 dan Semester I 2026	58
Grafik 10. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi Semester I 2025 dan Semester I 2026	62
Grafik 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Semester I Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	66
Grafik 12. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	68
Grafik 13. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	72
Grafik 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	76
Grafik 15. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	80
Grafik 16. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester I Tahun 2026	82
Grafik 17. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026	85
Grafik 18. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	88

Grafik 19. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jabatan.....	99
Grafik 20. Pemenuhan Kebutuhan ASN di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jabatan	100
Grafik 21. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Pendidikan...	100
Grafik 22. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jenis Kelamin	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kemitraan dengan RS Kemenkes Surabaya	vi
Gambar 2. Pertemuan Persiapan Layanan Uji Produk PCR.....	vi
Gambar 3. Kunjungan Mahasiswa Universitas Strada Indonesia Kediri	vii
Gambar 4. Kegiatan Pertemuan Diskusi Penatausahaan dan Pelaporan BMN Persediaan di BPAFK Surabaya.....	viii
Gambar 5. Kegiatan Audiensi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di RSUD Waluyo Jati Kab. Probolinggo.....	viii
Gambar 6. Pameran Hospital Expo di Grand City	ix
Gambar 7. Inspeksi Layanan Pengujian Kalibrasi Alkes di RSUD Haji Surabaya.....	ix
Gambar 8. Koordinasi Pelayanan dengan RSUD Saiful Anwar Malang.....	x
Gambar 9. Kegiatan Inspeksi paska sertifikasi CDAKB.....	x
Gambar 10. Program Strategis RIBK Tahun 2025-2029	7
Gambar 11. Struktur Organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	8
Gambar 12. Tampilan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester 1 Tahun 2026.	75
Gambar 13. Form Peminjaman Alat Standar.....	104
Gambar 14. Berita Acara Peminjaman Alat Standar.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA.....	107
LAMPIRAN 2. LINK DATA DUKUNG PER IKU.....	115
LAMPIRAN 3. SK TIM LAKIP.....	117
LAMPIRAN 4. ANALISA SMART IKU SEMESTER 1 TAHUN 2026.....	118
LAMPIRAN 5. SOP-AP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA.....	122
LAMPIRAN 6. SOP PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KINERJA.....	124
LAMPIRAN 7. SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP).....	127
LAMPIRAN 8. SOP REVIU LAPORAN KINERJA ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA	130
LAMPIRAN 9. CASCADING KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN.....	132

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dimana Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Sarana Pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas Satuan Kerja.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah naungan dan pembinaan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester 1 Tahun 2026 didasarkan pada Permenpan No. 53 tahun 2014 dan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Kemenkes dengan maksud dan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2026 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya.

C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional, dan setiap Prioritas Nasional diterjemahkan lebih lanjut menjadi Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), serta Proyek Prioritas (ProP).

RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengidentifikasi dan memetakan peran signifikan Kementerian Kesehatan dalam mengkoordinasikan berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, yang hampir seluruhnya berada di bawah Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Prioritas Nasional 4 dan berkaitan dengan peran kunci Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat. Hal tersebut dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak;

- b. pencegahan dan penurunan stunting, dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing-masing kelompok sasaran;
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; serta
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.
2. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan. Hal tersebut dilakukan melalui:
- a. penuntasan tuberkulosis;
 - b. eliminasi penyakit kusta dan schistosomiasis;
 - c. pengendalian penyakit menular lainnya terutama HIV/AIDS dan eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti malaria;
 - d. pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;
 - e. pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat aktivitas fisik; serta
 - f. penyehatan lingkungan.
3. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat. Hal tersebut dilakukan melalui:
- a. penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara;

- b. pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; serta
 - c. penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.
4. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui:
- a. investasi pelayanan kesehatan primer;
 - b. pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/ kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses termasuk pengembangan layanan berbasis kompetensi terutama kanker, jantung, stroke, nefrologi, dan kesehatan ibu dan anak;
 - c. produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - d. penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non-aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; serta
 - e. penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kesehatan.

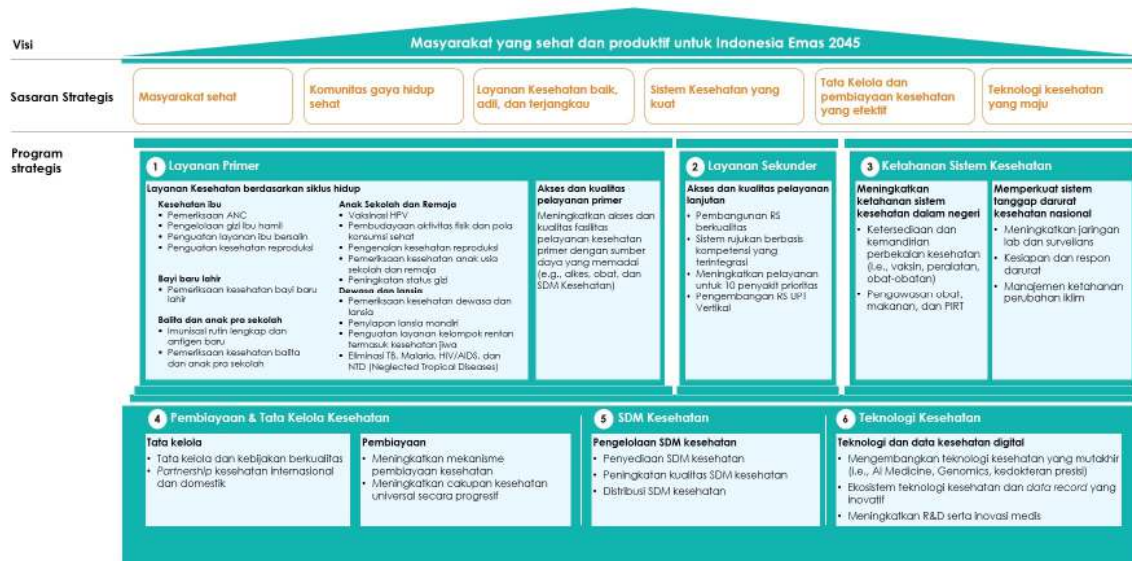
Arah kebijakan tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Kesehatan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat yang sehat dan produktif sebagai modal dasar pembangunan dalam menyongsong visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. RIBK Tahun 2025-2029 akan mewujudkan peningkatan angka harapan hidup, peningkatan angka harapan hidup sehat, peningkatan indeks cakupan layanan kesehatan semesta, dan pemeliharaan angka fertilitas total yang ideal. RIBK Tahun 2025-2029 mengusung enam (6) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Masyarakat Sehat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap tahap kehidupan, mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Strategi ini dilaksanakan melalui peningkatan layanan kesehatan primer dan sekunder yang terintegrasi, dengan pendekatan siklus hidup yang komprehensif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kelompok usia memperoleh pelayanan yang sesuai kebutuhannya, mengurangi kesenjangan kesehatan, mencegah penyakit kronis, dan secara keseluruhan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
2. Komunitas Gaya Hidup Sehat. Program pembangunan kesehatan mendorong penguatan upaya promotif dan preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Implementasinya mencakup kampanye literasi kesehatan terkait berbagai topik kesehatan seperti imunisasi, gizi seimbang, olahraga dan gaya hidup aktif, anti rokok, penggunaan narkoba, keluarga berencana, kehamilan berisiko, kesehatan mental, sanitasi dan kebersihan lingkungan, skrining penyakit dan kepatuhan pengobatan. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci dalam mencegah timbulnya penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.
3. Layanan Kesehatan yang Baik, Adil dan Terjangkau. Pemerintah berkomitmen untuk memperluas cakupan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan memastikan bahwa seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan, serta penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau di seluruh wilayah.
4. Sistem dan Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif. Ketahanan sistem kesehatan menjadi salah satu prioritas sektor kesehatan, khususnya dalam mengantisipasi krisis kesehatan. Penguatan dilakukan melalui pengembangan sistem deteksi dan respons dini, peningkatan kapasitas laboratorium, infrastruktur kesehatan, serta kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan. Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya sistem kesehatan yang mampu merespons dengan cepat tanpa mengganggu pelayanan kesehatan rutin. Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, diharapkan terbentuk ekosistem kesehatan nasional yang lebih tangguh dan adaptif.

5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang Efektif. Pembangunan kesehatan yang berkelanjutan memerlukan tata kelola yang baik serta pembiayaan yang mencukupi, efisien, dan berorientasi pada hasil. Kedepannya, pembangunan kesehatan akan juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, transparansi penganggaran, serta keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan kesehatan. Penguatan akuntabilitas dalam tata kelola sistem kesehatan akan mendorong peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya secara optimal.
6. Teknologi Kesehatan yang Maju. Dalam mendukung tujuan lainnya, pemanfaatan teknologi digital dan analitik data menjadi pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Inovasi digital di bidang kesehatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat kemampuan sistem dalam mengambil keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making). Sasaran strategis ini diraih melalui percepatan adopsi sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan rekam medis elektronik, serta pemanfaatan teknologi seperti telemedisin dan aplikasi pemantauan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan jumlah dan kapasitas uji klinis juga menjadi komponen penting dalam mendukung inovasi.

Dalam rangka pencapaian enam sasaran strategis diarahkan melalui pelaksanaan program strategis yang mencerminkan orientasi kebijakan kesehatan secara menyeluruh, serta melalui pendekatan pilar transformasi sistem kesehatan. Program-program ini mencakup seluruh sasaran siklus hidup dan sistem layanan, mulai dari promosi kesehatan hingga layanan spesialisik, serta penguatan sistem dan tata kelola sistem kesehatan yang baik. Aspek Strategis pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dapat dilihat dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, secara terpadu dan saling mendukung, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di mana cakupan Farmasi dan alat kesehatan masuk dalam subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan.

Gambar 10. Program Strategis RIBK Tahun 2025-2029



Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama pada sasaran poin tiga yaitu Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran sebagai cascading sasaran kinerja di BPAFK Surabaya, serta Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2351/MENKES/PER/2011, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

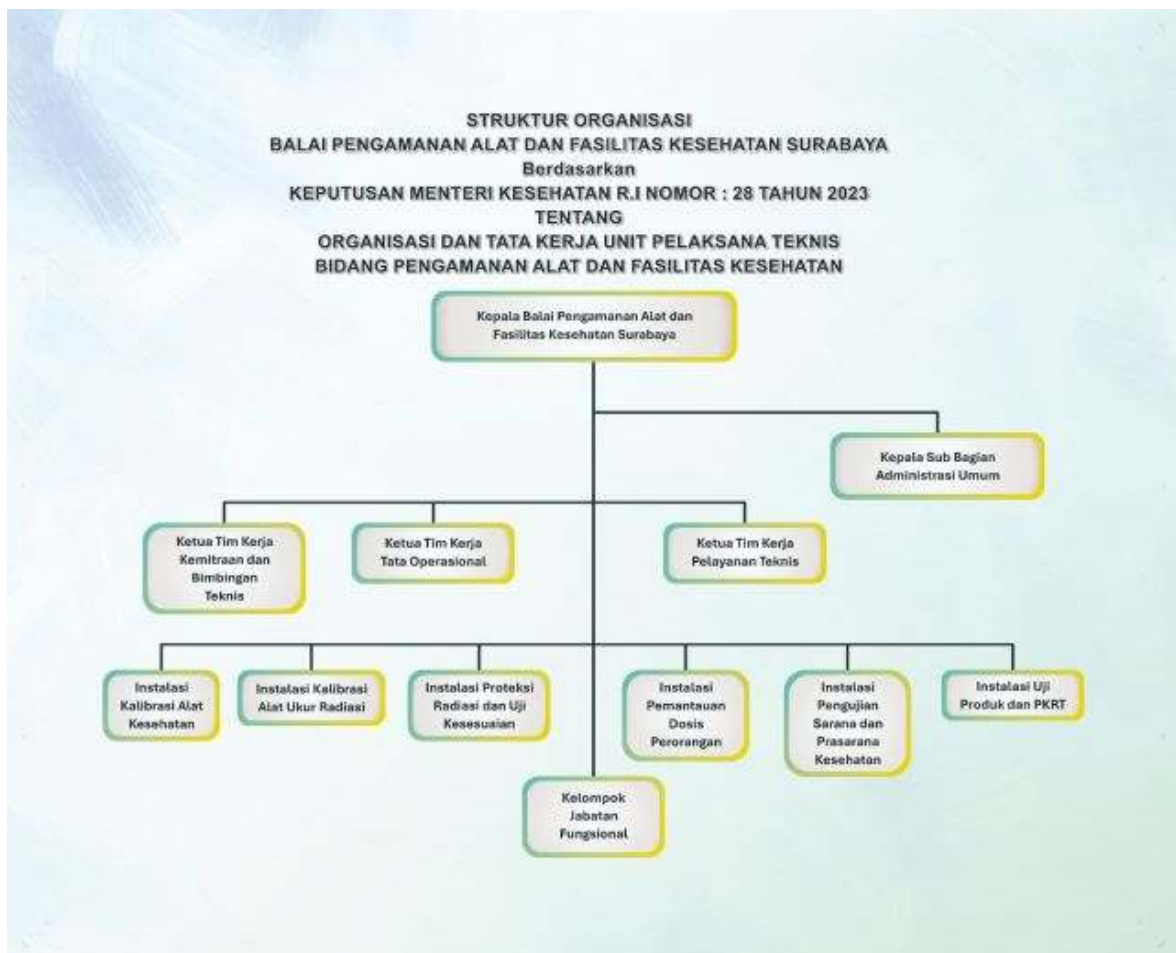
Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- kalibrasi alat ukur standar;
- pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;

- f. pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
- g. inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pengujian alat kesehatan;
- h. inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
- i. inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
- j. pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis;
- l. pelaksanaan kerja sama;
- m. pengelolaan data dan informasi;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang PAFK.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut:

Gambar 11. Struktur Organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya



Susunan organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya terdiri atas:

1. Kepala

Kepala merupakan pejabat yang ditunjuk untuk memimpin Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Kepala bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi atas persetujuan dan mengacu pada pedoman instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Selain itu kepala dapat memberikan penugasan kepada kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

2. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya.

3. Tim Kerja

Selain subbag administrasi dan umum dibantu oleh beberapa Tim Kerja. Masing-masing Tim Kerja dipimpin oleh Ketua Tim Kerja dalam menjalankan tugasnya dengan penetapan surat keputusan Kepala Balai. Ketua Tim Kerja melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsinya. Adapun Tim Kerja yang adalah sebagai berikut :

- Tim Kerja Pelayanan Teknis

Sesuai surat keputusan kepala balai nomor OT.01.01/E.X/61/2024 tentang Penunjukan penanggungjawab Tim Kerja Pelayanan Teknis (YANTEK) pada BPAFK Surabaya tanggal 2 Januari 2024 yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi.

- Tim Kerja Tata Operasional

Sesuai surat keputusan kepala balai nomor OT.01.01/E.X/68/2024 tentang Penunjukan penanggungjawab Tim Kerja Tata Operasional (TOP) pada BPAFK

Surabaya tanggal 2 Januari 2024 yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan.

- Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis
Sesuai surat keputusan kepala balai nomor OT.01.01/E.X/3446/2024 tentang Penunjukan penanggungjawab Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis (KBT) pada BPAFK Surabaya tanggal 1 Juli 2024 yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, jejaring kerja dan kemitraan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

4. Instalasi

Instalasi merupakan unit pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Instalasi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya, mengacu pada pedoman instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kepala instalasi merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dan diberhentikan Kepala Balai untuk memimpin Instalasi melalui penetapan surat keputusan Kepala Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Berikut adalah Instalasi yang ada pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya:

- Instalasi Kalibrasi Alat Kesehatan, sesuai surat keputusan kepala balai nomor OT.01.01/E.X/66/2024 tentang Penunjukan penanggungjawab Instalasi Kalibrasi Alat Kesehatan (KAK) pada BPAFK Surabaya tanggal 2 Januari 2024 yang melayani Kalibrasi peralatan kesehatan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan/atau bahan ukur sesuai standar nasional maupun internasional. Fasilitas instalasi terdiri atas :
 - Laboratorium Gaya dan Massa,
 - Laboratorium Tekanan,
 - Laboratorium Suhu,
 - Laboratorium Volumetrik,
 - Laboratorium Kelistrikan,
 - Laboratorium Fotometri dan Akustik
- Instalasi Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian, sesuai surat keputusan kepala balai nomor OT.01.01/E.X/3447/2024 tentang Penunjukan penanggungjawab

Instalasi Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian (PRUK) pada BPAFK Surabaya tanggal 1 Juli 2024 yang memiliki layanan berupa :

- Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X;
- Pengujian Kalibrasi Pesawat Sinar-X;
- Pengujian Kalibrasi Non Pesawat Sinar-X;
- Pengukuran Paparan Radiasi & Proteksi Radiasi.

Instalasi ini memiliki dua ruang lingkup yaitu :

- Ruang Lingkup Pesawat Sinar-X meliputi : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Pesawat Sinar-X Fluoroskopi, Pesawat Sinar-X Mammografi, Pesawat Sinar-X CT-Scan, Pesawat Sinar-X Gigi.
- Ruang Lingkup Non Pesawat Sinar-X meliputi : Pengujian Magnetic Resonance Imaging (MRI), dan Pengujian Digital Radiography (DR) / Computed Radiography (CR)
- Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi, sesuai surat keputusan kepala balai nomor KP.01.04/E.X/2254/2024 tentang Penunjukan Kepala Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi (KAUR) pada BPAFK Surabaya tanggal 30 April 2024 yang melayani :
 - Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi, berdasarkan Penunjukan Kepala BAPETEN Nomor.05436.458.1.120623.
 - Kalibrasi alat ukur radiasi (Surveyometer, Dosimeter Saku)
 - Kalibrasi alat pemantauan dosis peroranganSementara fasilitas yang dimiliki instalasi ini berupa Laboratorium Irradiator dengan sumber Cs-137
- Instalasi Pemantauan Dosis Perorangan, sesuai surat keputusan Kepala Balai nomor KP.01.04/E.X/711/2024 tentang Penunjukan penanggungjawab Instalasi Pemantauan Dosis Perorangan (PDP) pada BPAFK Surabaya tanggal 31 Januari 2024 yang melayani Analisa dosis perorangan Thermoluminescent Dosimeter (TLD) Hp(10) dan Evaluasi TLD Lensa Mata (Merk Harshaw jenis XD-707H), dengan fasilitas berupa Laboratorium Thermoluminescent Dosimeter (TLD).
- Instalasi Pengujian Sarana dan Prasarana Kesehatan, sesuai surat keputusan kepala balai nomor KP.01.04/E.X/2362/2024 tentang Penunjukan kepala Instalasi Inspeksi Sarana dan Prasarana di lingkungan BPAFK Surabaya tanggal 6 Mei 2024 yang meliputi layanan :
 - Instalasi Listrik Medik (untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah beroperasi)

- Instalasi Listrik Medik (untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang baru dibangun)
- Instalasi Gas Medis
- Instalasi Tata Udara
- Biological Safety Cabinet (BSC) & Laminar Air Flow (LAF)
- Instalasi Uji Produk, sesuai surat keputusan kepala balai nomor KP.01.04/E.X/712/2024 tentang Penunjukan kepala Instalasi Uji Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di lingkungan BPAFK Surabaya tanggal 31 Januari 2024 yang meliputi layanan :
 - Uji produk alat kesehatan
 - Audit Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)
 - Audit Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada sasaran program dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran kantor pusat dan dana dekonsentrasi yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

C. Sumber Daya Manusia

Pada subbab ini disajikan gambaran sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tujuan organisasi.

D. Budaya Kerja

Pada subbab ini disajikan implementasi perubahan budaya kerja pada BPAFK Surabaya di tahun 2026 guna meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian Kesehatan melaksanakan dan menjabarkan visi tersebut di bidang kesehatan, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui:
 - a. Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas SDM;
 - b. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional;
 - c. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi;
 - d. Memperkuat Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Meningkatkan Prestasi Olahraga.
2. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
3. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Pencapaian visi Presiden 2025-2029 diwujudkan dalam pelaksanaan 7 misi Presiden, yang dijabarkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Membudayakan gaya hidup sehat;
3. Memenuhi layanan kesehatan yang baik dan terjangkau;
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan yang tangguh dan responsif;
5. Memperkuat tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan dan berkelanjutan;
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Dukungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dalam penjabaran Kementerian Kesehatan tersebut, diwujudkan menjadi sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;
3. Meningkatnya kemampuan pemenuhan obat, obat bahan alam, produk biologi (termasuk vaksin) serta alkes secara mandiri;
4. Meningkatnya pemanfaatan alat kesehatan produksi dalam negeri di pelayanan kesehatan;
5. Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan di peredaran;
6. Meningkatnya rancangan produk baru dari uji klinik yang dilakukan dalam negeri.

Tujuan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan adalah:

1. Layanan kesehatan yg berkualitas, baik, adil dan terjangkau;
2. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
3. Teknologi kesehatan yang maju.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan melaksanakan salah satu dari lima program teknis yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta melaksanakan Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 3. Sasaran Program Sistem Ketahanan Kesehatan serta Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

Program Sistem Ketahanan Kesehatan pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	
Sasaran	1. <i>Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan</i> 2. <i>Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</i> 3. <i>Meningkatnya kemampuan pemenuhan obat, obat bahan alam, produk biologi (termasuk vaksin) serta alkes secara mandiri</i> 4. <i>Meningkatnya pemanfaatan alat Kesehatan produksi dalam negeri di pelayanan Kesehatan</i> 5. <i>Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan di peredaran</i> 6. <i>Meningkatnya rancangan produk baru dari uji klinik yang dilakukan dalam negeri</i>
Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	
Sasaran	<i>Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan</i>

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target Program Sistem Ketahanan Kesehatan, terutama pada sasaran poin lima yaitu **meningkatkan mutu dan keamanan alat kesehatan di peredaran** sebagai cascading sasaran kinerja di BPAFK Surabaya, serta Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Dari cascading di atas dapat dijabarkan sasaran program dan indikator kinerja untuk UPT Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Indikator Kinerja dan Target sesuai Program Sistem Ketahanan Kesehatan serta Program Dukungan Manajemen di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan untuk UPT Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Sistem Ketahanan Kesehatan					
Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat Kesehatan	34	38	42	46	50
Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	20	25	30	35	40
Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	589	619	649	682	715
Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	50	75	100	125	150
Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	72.500	74.000	75.500	77.000	78.500
Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK n	9	18	28	38	48
Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	59	74	79	84	89
Penambahan kemampuan jenis pelayanan	8	13	18	23	28
Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	75%	80%	85%	90%	95%
Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	55	57	59	60	61
Program Dukungan Manajemen					
Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	N/A	83			
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	96,81	94	96,91	96,96	97,00
Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	81	82	83	84	85
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	95%	95%	95%	95%	95%
Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	3,06	3,10	3,14	3,18	3,22
Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	15,5 M	19 M	20 M	21 M	22 M

Cara perhitungan indikator kinerja Program Sistem Ketahanan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan pada UPT Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
Program Sistem Ketahanan Kesehatan	
Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat Kesehatan	Jumlah sarana distribusi alkes non PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan di wilayah kerja dihitung secara kumulatif
Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market yang dihitung secara kumulatif
Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan, dihitung berdasarkan capaian tahun berjalan
Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	Jumlah prototipe produk alat kesehatan yang diuji, dihitung pada tahun berjalan
Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	Jumlah alat kesehatan dan sapras (alat ukur standar, TLD, Instalasi) yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi, yang dihitung pada tahun berjalan
Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK	Jumlah metode pengujian (uji produk alat kesehatan dan PKRT) dan kalibrasi yang dihitung secara kumulatif
Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi yang dihitung secara kumulatif
Penambahan kemampuan jenis pelayanan	Jumlah penambahan kemampuan jenis pelayanan yang dihitung secara kumulatif

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	Jumlah alat ukur standar yang dikalibrasi di bagi jumlah alat ukur standar yang aktif digunakan dikali 100%
Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen perjanjian kerja sama yang masih berlaku, dihitung secara kumulatif
Program Dukungan Manajemen	
Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Penilaian mandiri berdasarkan kertas kerja evaluasi yang direviu oleh Tim SKI dan apabila hasil penilaian mandiri pada kategori AA akan dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkes Nilai SAKIP mengukur tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Nilai ini dihitung berdasarkan lima komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%), dan Capaian Kinerja (15%)
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Ada 2 tahap perhitungan: 1. SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per unsur dibagi Total unsur yang terisi) dikali Nilai Penimbang 2. IKPL = SKM dikali 25 dihitung secara kumulatif
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	50% Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)
Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Hasil penjumlahan dari nilai Penerapan dimensi profesionalitas ASN sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti UPT PAFK pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di UPT PAFK sesuai dengan periode Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikali 100
Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Hasil penilaian maturitas manajemen risiko UPT PAFK di tahun berjalan dengan kategori yaitu: Naive: ≤ 1 Aware: 1,01 – 2,00 Define: 2,01 – 3,00 Manage: 3,01 – 4,00 Enable: 4,01 – 5,00

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Nilai Realisasi Pendapatan atas layanan UPT PAFK dalam 1 tahun

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Sasaran Kegiatan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Kegiatan	Sasaran
Program Sistem Ketahanan Kesehatan	
Penyelenggaraan Pengamanan Alat Kesehatan, PKRT dan Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi alat Kesehatan yang memenuhi ketentuan
	Meningkatnya produk alkes dan PKRT yang aman dan bermutu
	Meningkatnya pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Target ini menjadi komitmen bagi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya untuk mencapainya dalam Tahun 2026.

Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026
Program Sistem Ketahanan Kesehatan		
Meningkatnya sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	38
Meningkatnya produk alkes dan PKRT yang aman dan bermutu	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	25
Meningkatnya pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	619
	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	75
	Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	74.000
	Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK n	18
	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	74
	Penambahan kemampuan jenis pelayanan	13
	Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	80%
	Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	57
Program Dukungan Manajemen		
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	83
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	83,00
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	94
	Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	82
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	95%
	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	3,10
	Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Rp 19.000.000.000

Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026 ditandatangani oleh Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sebagai pihak pertama dan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

sebagai pihak kedua. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran satu.

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, BPAFK Surabaya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026 mengacu pada kebijakan pembangunan nasional, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Tahun 2025–2029, serta tugas dan fungsi BPAFK Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pengamanan alat kesehatan, PKRT, dan fasilitas kesehatan.

RKA Tahun Anggaran 2026 terdiri atas 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Sistem Ketahanan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan pengamanan alat kesehatan, PKRT, dan fasilitas kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.929.846.000, terdiri atas anggaran efektif sebesar Rp6.909.653.000 dan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp2.020.193.000.
2. Program Dukungan Manajemen, yang dilaksanakan melalui kegiatan dukungan manajemen dan operasional perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.788.901.000, terdiri atas anggaran efektif sebesar Rp21.875.354.000 dan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp2.913.547.000.

Tabel 8. Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026

PROGRAM - KEGIATAN - RINCIAN OUTPUT	BLOKIR	EFEKTIF	ANGGARAN (Rp)
Program Sistem Ketahanan Kesehatan	2.020.193.000	6.909.653.000	8.929.846.000
Penyelenggaraan Pengamanan Alat Kesehatan, PKRT dan Fasilitas Kesehatan	2.020.193.000	6.909.653.000	8.929.846.000
Sarana distribusi alat kesehatan NON-PIE (Pemilik Izin Edar) di inspeksi Paska Sertifikasi CDAKB (RF-15)	39.942.000	39.942.000	79.884.000
Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF-15)	331.985.000	351.725.000	683.710.000
Pengujian Kalibrasi Alat (RF-15)	455.034.000	1.427.921.000	1.882.955.000
Alat Kalibrasi (RF-15)	1.046.150.000	4.184.599.000	5.230.749.000
Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	147.082.000	905.466.000	1.052.548.000

PROGRAM - KEGIATAN - RINCIAN OUTPUT	BLOKIR	EFEKTIF	ANGGARAN (Rp)
Program Dukungan Manajemen	2.913.547.000	21.875.354.000	24.788.901.000
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan	2.913.547.000	21.875.354.000	24.788.901.000
Layanan BMN	1.558.000	0	1.558.000
Layanan Umum	2.164.642.000	2.964.723.000	5.129.365.000
Layanan Perkantoran		17.443.966.000	17.443.966.000
Layanan BMN Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT)		8.000.000	8.000.000
Layanan Sarana Internal	471.982.000	773.884.000	1.245.866.000
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	275.365.000	684.781.000	960.146.000
JUMLAH	4.933.740.000	28.785.007.000	33.718.747.000

Dalam pelaksanaannya, sebagian pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 masih dikenakan pemblokiran anggaran (Kode A) sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/A/5830/2025 tanggal 11 Desember 2025.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian alokasi anggaran belum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah disusun, sehingga dukungan pendanaan terhadap beberapa kegiatan strategis BPAFK Surabaya belum dapat dipenuhi secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan berdasarkan besaran anggaran efektif yang tersedia, sedangkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran yang masih diblokir akan menyesuaikan dengan kebijakan pembukaan blokir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, BPAFK Surabaya tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran efektif yang tersedia melalui penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2026.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja BPAFK Surabaya pada semester 1 tahun 2026 diuraikan menurut Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen antara Kepala BPAFK Surabaya dengan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dalam mewujudkan sasaran strategis organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan menetapkan 13 (tiga belas) indikator sasaran program/indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, BPAFK Surabaya berkontribusi terhadap pencapaian sasaran program melalui pelaksanaan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yang terdiri atas 10 (sepuluh) indikator Program Sistem Ketahanan Kesehatan serta 7 (tujuh) indikator Program Dukungan Manajemen. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPAFK Surabaya selama Tahun 2026.

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya tahun 2026 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPAFK Surabaya Tahun 2026. Seluruh sasaran kegiatan yang dituangkan dalam PK Kepala BPAFK Surabaya merupakan kinerja Semester I Tahun 2026. Secara rata-rata capaian kinerja Semester I Tahun 2026 adalah sebesar 77,53% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja BPAFK Surabaya Semester 1 Tahun 2026

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja DI APK Surabaya Semester I Tahun 2020						
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Sistem Ketahanan Kesehatan						
1	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang memenuhi ketentuan	1	Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	38	36	94,74%
2	Meningkatnya produk alkes dan PKRT yang aman dan bermutu	2	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	25	24	96,00%
3	Meningkatnya pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	3	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	619	580	93,70%
		4	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	75	30	40%
		5	Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	74.000	35.459	47,92%
		6	Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK n	18	11	61,11%
		7	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	74	76	102,70%
		8	Penambahan kemampuan jenis pelayanan	13	15	115,38%
		9	Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	80%	51,41%	64,26%
		10	Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	57	53	92,98%

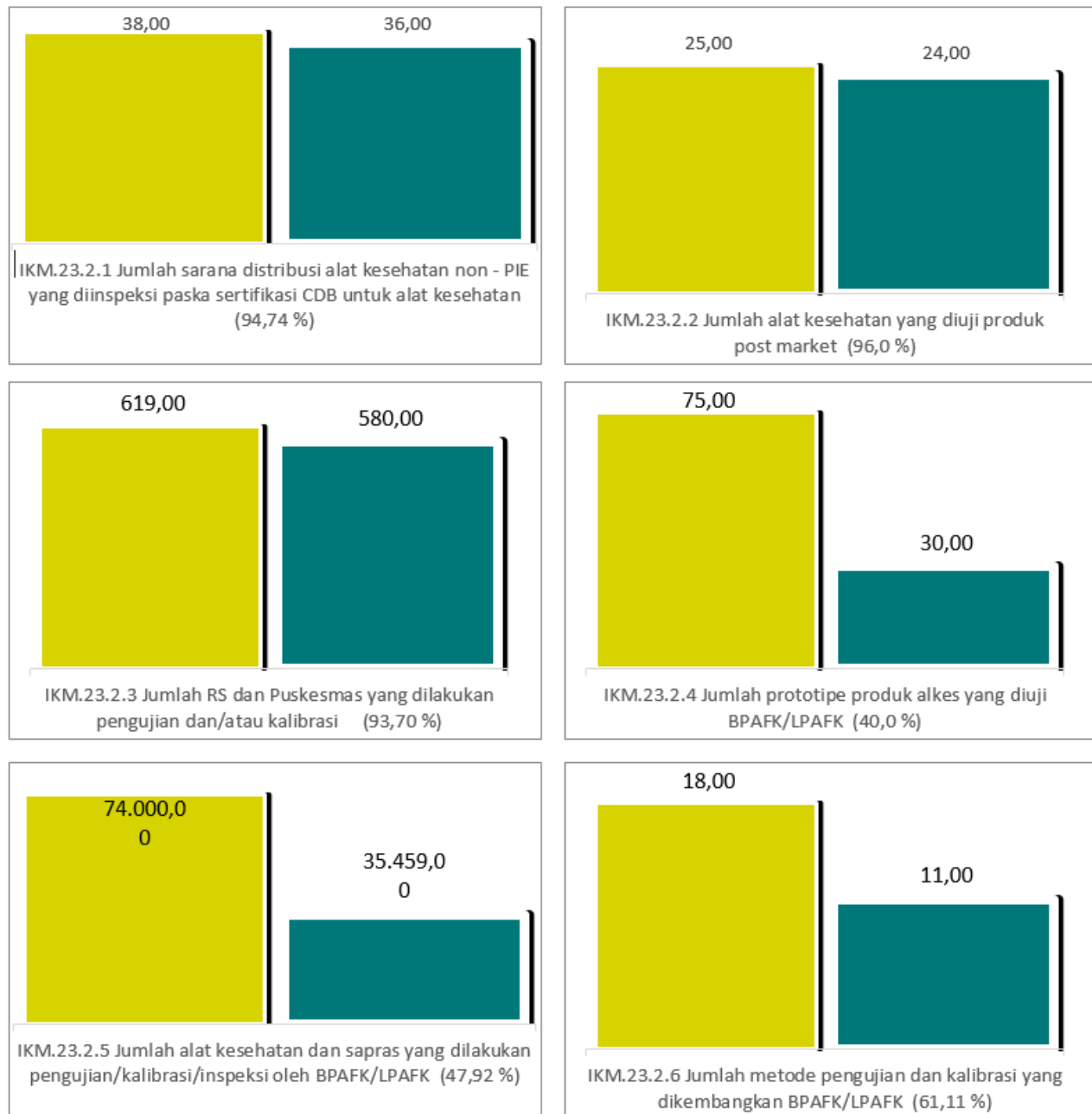
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Dukungan Manajemen						
4	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	11	Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	83	90,50	109,04%
		12	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	83,00	84,74	102,10%
		13	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	94	61,38	65,30%
		14	Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	82	82,47	100,57%
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	95%	100%	105,26%
		16	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	3,10	N/A	-
		17	Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	19.000.000.000	5.127.298.590	26,99%

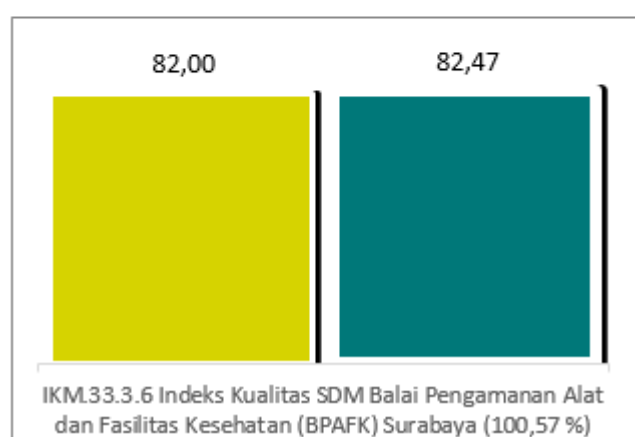
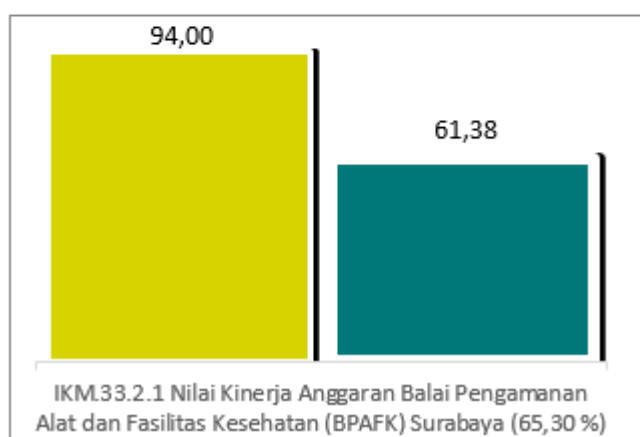
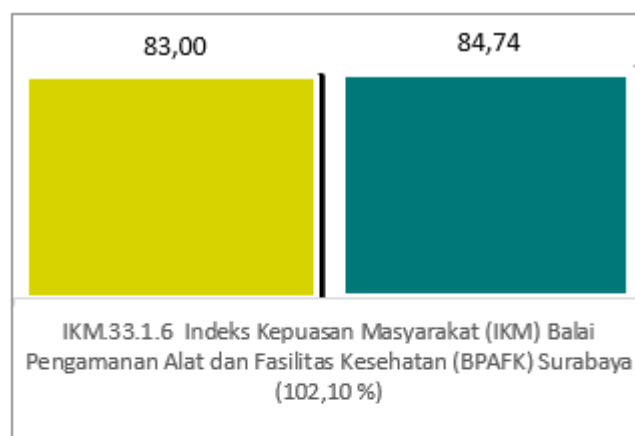
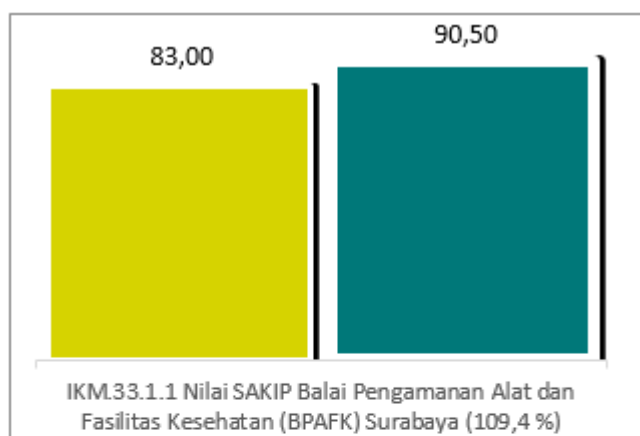
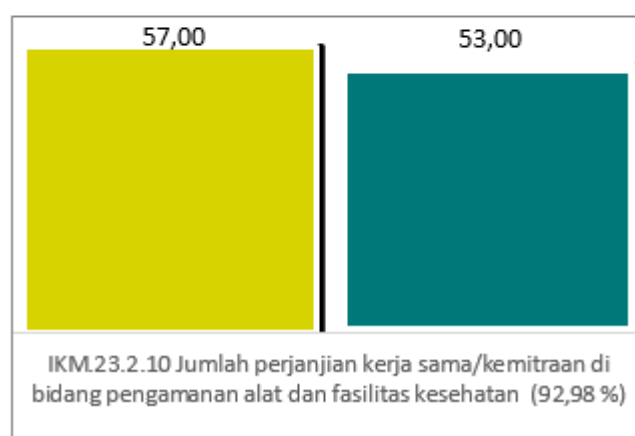
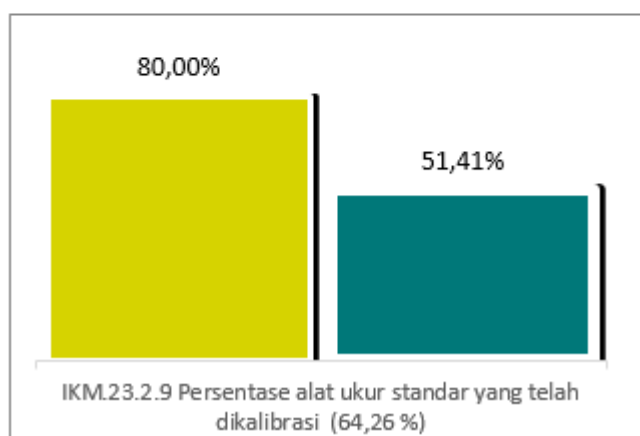
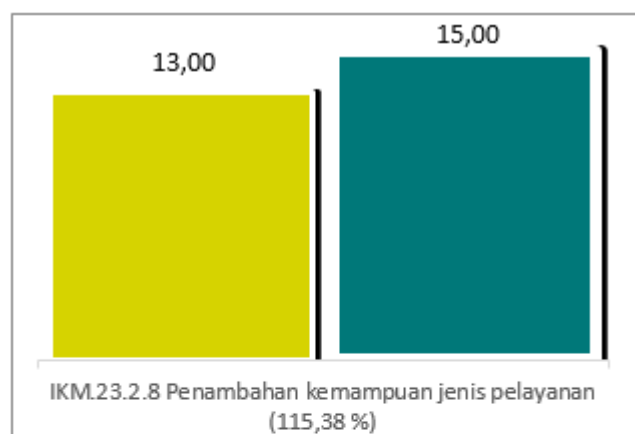
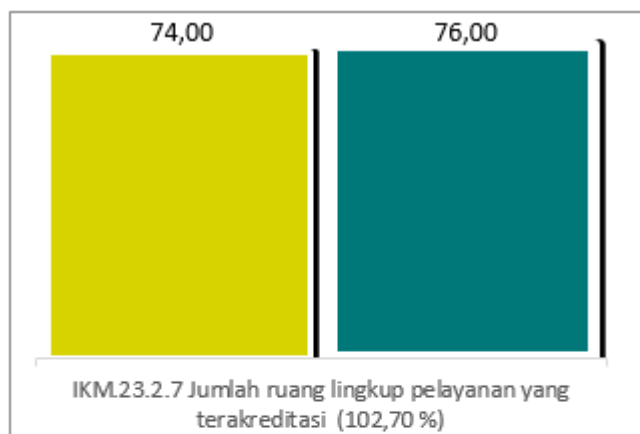
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

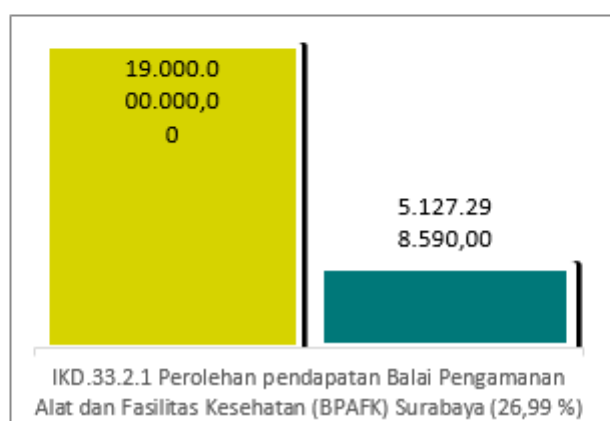
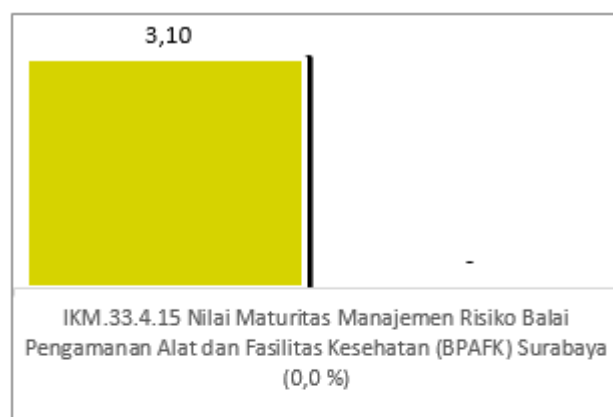
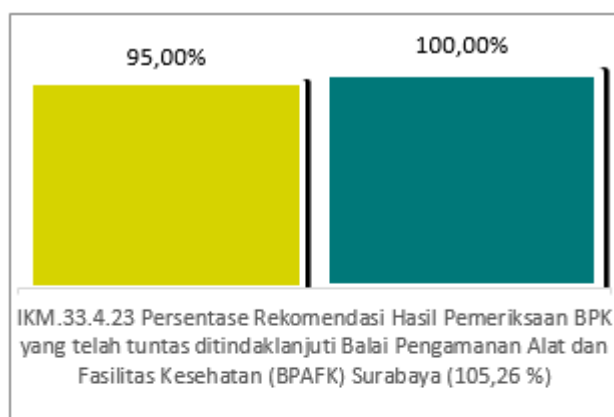
- 1) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi 100% - 120% sebanyak 6 indikator;
- 3) Target dengan capaian realiasi di atas 120% sebanyak 0 indikator.

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Sistem Ketahanan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026

■ Target ■ Realisasi







2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Program Sistem Ketahanan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah meningkatnya mutu dan keamanan alat Kesehatan di peredaran dan meningkatnya tata Kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan.

a. Analisis Capaian Kinerja Indikator Program Sistem Ketahanan Kesehatan

2.1 Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan

Inspeksi paska sertifikasi CDB merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin/berkala terhadap Distributor Alat Kesehatan yang telah mendapatkan sertifikat standar CDB yang bertujuan untuk :

- memastikan perusahaan tetap mematuhi prosedur CDB setelah sertifikasi
- menjamin alat kesehatan tersimpan, didistribusikan, dan didokumentasikan sesuai standar
- Mengidentifikasi kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum menimbulkan masalah serius.

Adapun definisi operasional adalah jumlah sarana distribusi alkes non PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan di wilayah kerja.

Kondisi yang dicapai

Pada tahun 2026, BPAFK Surabaya menetapkan target jumlah sarana distribusi alkes non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB sebanyak 38 sarana distribusi.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah dilakukan inspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan terhadap 36 sarana distribusi alat kesehatan yang berada di wilayah kerja BPAFK Surabaya antara lain :

Tabel 10. Sarana Distribusi Alkes yang telah Dilakukan Inspeksi CDB

NO	NAMA SDAK NON-PIE	NO	NAMA SDAK NON-PIE
1	PT. BORWITA CITRA PRIMA	19	PT. WAHANA RIZKY GUMILANG
2	PT. FAJAR INDAH LESTARI	20	PT. SURYA PRIMA IMPLANTAMA
3	PT. BARIK MAKMUR JAYA	21	PT. ANUGRAH MITRA JAYA
4	PT. PIONER INDO NUSANTARA	22	PT. FARMACO MEDIKA

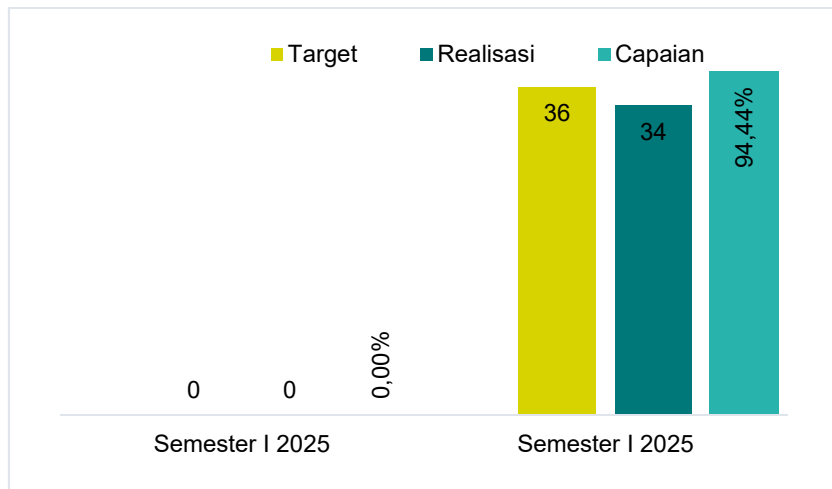
NO	NAMA SDAK NON-PIE	NO	NAMA SDAK NON-PIE
5	PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA	23	PT. NUSA TRIUTAMA
6	PT. SETIA ANDALAN SUKSES	24	PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI
7	PT. ALKESMART INDONESIA	25	PT. TRISTANISA GLOBAL INDONESIA
8	PT. SINARMED JAYA	26	PT. PANJI UTAMA SEJAHTERA
9	PT. BHAKTI BETSEN LESTARI	27	PT. JARING ARTHA MEDIKA
10	PT. ANDALAN BISTURI PRATAMA	28	PT. BERITO JAYA MEDIKA
11	PT. BERKAH BUANA ASTADECA	29	PT. KARYA PUTRA ANDALAN
12	PT. BALI MITRA MEDIKA	30	PT. ANUGRAH GLOBAL MEDIKA
13	PT. SANIDATA INDONESIA	31	PT. FIRDAUS INDAH SANTOSA
14	PT. TRINUSA DARMA SATHA	32	PT. DARMAWANGSA MEDICAL SUPPLIES
15	PT. SURYA BALI MAKMUR	33	PT. ANUGERAH UTAMA MEDIKA
16	PT. MURNI AIK SUKSES	34	PT. MURNI PUTRA ALKESINDO
17	PT. MODERN JAYA FARMA	35	PT. ADI BHARATA ASTY
18	PT. RIDHO ILAHI FARMA	36	PT. AZHAR SARANA GLOBAL

Tabel 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan Semester I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	38	36	94,74%

Capaian realisasi target indikator jumlah sarana distribusi alkes non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan pada Semester I Tahun 2026 adalah 94,74 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan inspeksi telah berjalan sesuai rencana dan sebagian besar target telah berhasil dipenuhi.

Grafik 2. Target, Realisasi dan Capaian Indikator jumlah sarana distribusi alkes non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB Semester I Tahun 2025 - Semester I Tahun 2026



Pada Tahun 2026 terjadi perubahan definisi operasional indikator kinerja dari persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang telah dilakukan inspeksi pasca sertifikasi CDB menjadi jumlah sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi pasca sertifikasi CDB. Perubahan ini mengakibatkan perbedaan satuan dan metode pengukuran, yaitu dari persentase menjadi jumlah absolut. Oleh karena itu, capaian Semester I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Semester I Tahun 2026 karena menggunakan dasar pengukuran yang berbeda.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Pencapaian indikator target indikator jumlah sarana distribusi alkes non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah kerja BPAFK Surabaya dalam penentuan sasaran dan penjadwalan inspeksi. Selain itu, dilakukan identifikasi lokus kegiatan sesuai anggaran efektif dan penyusunan jadwal inspeksi secara terencana, optimalisasi pemanfaatan sumber daya tim inspeksi sehingga dapat dilaksanakan 2 kegiatan inspeksi.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan tahun 2026 pada semester I tahun 2026 yaitu sarana distribusi alat kesehatan berkeberatan utk dilakukan inspeksi pasca sertifikasi CDB sesuai jadwal yang telah ditentukan dan minta dijadwalkan ulang.

Upaya pemecahan masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyiapkan data daftar sarana distribusi alat kesehatan setiap provinsi di wilayah kerja BPAFK Surabaya yang belum pernah dilakukan inspeksi pasca sertifikasi CDB dan menyiapkan jadwal alternatif apabila terjadi perubahan jadwal sehingga pelaksanaan inspeksi dapat tetap berjalan sesuai target.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi pasca sertifikasi CDB untuk alat kesehatan, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (benchmarking) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian indikator Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi pasca sertifikasi CDB untuk alat kesehatan pada semester I tahun 2026 mencapai 36 sarana distribusi dari target 38 sarana distribusi atau sebesar 94,74%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan inspeksi telah berjalan dengan baik dan hampir seluruh target berhasil direalisasikan. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi, penyusunan jadwal inspeksi yang terencana, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan oleh tim inspeksi.

Target belum tercapai 100% karena masih terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan inspeksi dengan Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah kerja BPAFK Surabaya sehingga beberapa inspeksi belum dapat dilaksanakan pada Semester I. Namun demikian, kendala tersebut bersifat administratif dan tidak mempengaruhi kualitas pelaksanaan inspeksi. Melalui penguatan koordinasi, penetapan jadwal sejak awal, dan penyusunan jadwal alternatif, sisa target diharapkan dapat dipenuhi pada Semester II sehingga target tahunan dapat tercapai.

2.2 Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market*

BPAFK Surabaya juga melaksanakan kegiatan uji produk *post market* alat guna meningkatkan pengawasan sarana dan produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga pada produsen alkes dan PKRT. Definisi operasional adalah Jumlah alat kesehatan yang telah memiliki izin edar yang telah diuji berdasarkan uji parameter post market, dengan catatan alat kesehatan yang diuji tersebut merupakan

alat kesehatan yang telah memiliki NIE dan belum digunakan di sarana pelayanan Kesehatan.

Kondisi yang dicapai

Pada Tahun 2026 ini, BPAFK Surabaya menargetkan Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* sebanyak 25 Alat.

Pada Semester I 2026 didapatkan hasil Realisasi Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* sebanyak 24 alkes, yaitu sebagai berikut :

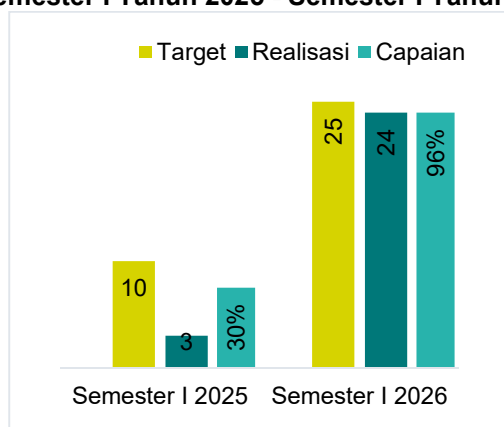
1. Electro Surgery Unit (ESU)
2. Lampu Operasi
3. Autoclave
4. Meja Operasi
5. Lampu Operasi
6. Timbangan Dewasa
7. Timbangan Anak / Bayi
8. Stadiometer
9. Syringe Pump
10. Baby Incubator
11. Baby Incubator Type EI.B1
12. Baby Incubator Type EI.B2 (Menu Lengkap)
13. Spirometer
14. Vena Viewer Vision
15. Vital Signs Monitor
16. Video Copolscope
17. Hospital Bed Electric 1
18. Hospital Bed Electric 2
19. Infant Phototherapy Unit
20. Infant Incubator
21. Medical Pendant
22. Mesin Anaesthesi
23. Bedside Monitor
24. Slit Lamp

Tabel 12. Target, realisasi dan capaian indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* Semester I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Jumlah alat kesehatan yang diuji produk <i>post market</i>	25	24	96%

Indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* pada Semester I 2026 mendapatkan hasil 24 alkes, hampir memenuhi target awal 25 alkes, dengan capaian sebesar 96%.

Grafik 3. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* Semester I Tahun 2025 - Semester I Tahun 2026



Terdapat perubahan definisi operasional pada Indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market*, untuk Semester I 2025, definisi operasionalnya yaitu Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* pada tahun berjalan, sedangkan definisi operasional untuk Semester I 2026 adalah Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* dihitung secara kumulatif dari hasil indikator tahun 2025 dan hasil Semester I Tahun 2026. Pencapaian Indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* akan diupayakan pemenuhannya sampai dengan Semester II Tahun 2026.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Untuk tercapainya target indikator kinerja indikator Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market*, BPAFK Surabaya melakukan upaya pencapaian target indikator tersebut dengan memperluas jaringan kerjasama dengan Produsen/Distributor untuk 4 alkes yang dilakukan uji produk *post market*.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* pada semester I 2026 adalah kesulitan mencari

produsen/distributor alat kesehatan yang bersedia bekerjasama untuk pelaksanaan Uji Produk *Post Market* dan waktu pelaksanaan kegiatan uji produk *post market* sangat terbatas sehingga TL Lanjut hasil temuan tidak dapat diselesaikan pada saat bertugas.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market* adalah merencanakan perluasan jaringan kerjasama dengan Produsen/Distributor untuk kegiatan uji produk *post market* dan melakukan monitoring secara berkala terhadap TL yang telah dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hasil temuan.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *post market*, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester I 2026, Indikator jumlah alat kesehatan yang telah dilakukan uji *post-market* sebanyak 24 alat kesehatan dari target 25 alat kesehatan dengan tingkat pencapaian sebesar 96%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan *post-market* telah berjalan dengan baik dan sebagian besar target telah terpenuhi. Meskipun target belum tercapai secara penuh, selisih pencapaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa program masih berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target tahunan. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah menyelesaikan pengujian pada 1 alat kesehatan yang belum terlaksana serta melakukan monitoring berkala agar target dapat tercapai secara optimal pada Semester II 2026..

2.3 Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan / atau kalibrasi

Pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi sarana prasarana alat kesehatan merupakan bagian penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam memastikan keandalan, ketepatan, dan keamanan sarana prasarana alat kesehatan yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi sarana prasarana alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, sehingga sarana prasarana alat kesehatan yang

digunakan di RS dan Puskesmas dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun definisi operasionalnya adalah jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi sarana prasarana alat kesehatan oleh BPAFK Surabaya.

Kondisi yang dicapai

Target indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 619 RS dan Puskesmas.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026 BPAFK Surabaya telah melakukan pengujian dan / atau kalibrasi terhadap 580 fasilitas kesehatan yang terdiri dari :

Tabel 13. Tabel Realisasi Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan / atau kalibrasi

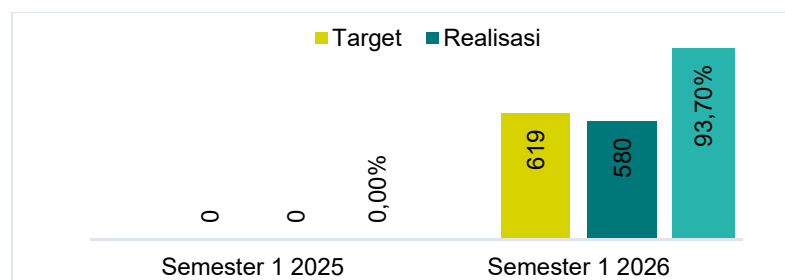
No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	RS	467
2	PKM	113
Total RS & PKM		580

Tabel 14. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi Semester I tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	619	580	93,70%

Capaian realisasi target indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi pada Semester I Tahun 2026 adalah 93,70 %. Capaian ini menunjukkan pelayanan berjalan dengan baik dan sebagian besar target telah berhasil dipenuhi. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi sarana prasarana alat kesehatan, dihitung pada tahun berjalan.

Grafik 4. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi Semester I tahun 2025 - Semester I tahun 2026



Pada Tahun 2026 terjadi perubahan indikator kinerja dari Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlayani menjadi jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi. Jika pada Tahun 2025 indikator mencakup berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, unit transfusi darah, dan fasilitas kesehatan lainnya, maka pada Tahun 2026 indikator hanya menghitung RS dan Puskesmas yang mendapatkan layanan pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi. Karena adanya perbedaan cakupan pada pengukuran yang dibatasi hanya jumlah RS dan Puskesmas, capaian Semester I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Semester I Tahun 2026. Oleh karena itu, penilaian kinerja Tahun 2026 dilakukan berdasarkan target dan ketentuan indikator yang berlaku pada tahun berjalan.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Tercapainya target indikator kinerja jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi bertujuan untuk mendukung pemenuhan standar dan persyaratan akreditasi pada RS dan Puskesmas.

Upaya yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan komunikasi dengan fasyankes untuk pelaksanaan kegiatan pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi sarana prasarana alat kesehatan sehingga jadwal pelayanan dapat disepakati lebih awal. Selain itu, dilakukan penjadwalan khusus pelayanan kalibrasi di RS Vertikal Surabaya (RSV Surabaya) pada hari Sabtu dan Minggu untuk mengoptimalkan waktu pelayanan, serta penerbitan Surat Keputusan (SK) BKO pegawai di Instalasi Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan guna mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Pembagian tugas seluruh tim kalibrasi juga dioptimalkan sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi pada Semester I Tahun 2026 antara lain:

- a. Fasyankes baru mengajukan permohonan pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi menjelang visitasi BPJS atau survei akreditasi sehingga terjadi penumpukan pekerjaan.
- b. Keterbatasan SDM teknis terutama di Instalasi Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan dibandingkan dengan jumlah permintaan dan luas wilayah pelayanan sebanyak 5 provinsi.

Upaya pemecahan masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator jumlah RS dan Puskesmas yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi kepada fasyankes agar menyusun rencana pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi tahunan dan mengajukan permohonan pengujian kalibrasi jauh sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- b. Mengoptimalkan pembagian tim dan jadwal kerja, menetapkan prioritas pelayanan berdasarkan urgensi (diutamakan fasyankes yang sudah MoU) serta menambahkan tenaga BKO untuk Instalasi ISPK.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian dan/atau kalibrasi, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembanding (benchmarking) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian indikator jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi pada Semester I Tahun 2026 sebanyak 580 fasilitas kesehatan dari target 619 RS dan Puskesmas atau sebesar 93,70%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi telah berjalan dengan baik dan hampir seluruh target berhasil dicapai. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik dengan fasilitas pelayanan kesehatan, penjadwalan pelayanan yang terencana, serta optimalisasi pelaksanaan tugas oleh tim kalibrasi sehingga pelayanan dapat berjalan secara efektif.

Target belum tercapai sepenuhnya karena masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan permohonan pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi mendekati jadwal visitasi BPJS atau survei akreditasi sehingga permintaan pelayanan meningkat pada waktu yang bersamaan. Selain itu, jumlah SDM teknis yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPAFK Surabaya terus meningkatkan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan agar permohonan diajukan lebih awal, mengoptimalkan pembagian tugas tim, serta menambah tenaga BKO sehingga target pelayanan pada akhir tahun diharapkan dapat tercapai.

2.4 Jumlah prototipe produk alat kesehatan yang diuji BPAFK/LPAFK

Uji prototipe produk alat kesehatan adalah kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap alat kesehatan produk baru dan alat kesehatan inovasi (pengembangan) sebelum diproduksi dan dipasarkan. Uji prototipe produk alat kesehatan bertujuan untuk memastikan alat tersebut aman, memenuhi regulasi dan dapat menjaga kesehatan serta keselamatan pasien.

Adapun definisi operasionalnya adalah jumlah prototipe produk alat kesehatan yang dilakukan pengujian sesuai standar dalam rangka pre-market (proses izin edar baru/perpanjangan) atau penelitian/pengembangan produk pada tahun berjalan.

Kondisi yang dicapai

Target indikator jumlah jumlah prototipe produk alat kesehatan yang dilakukan pengujian pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 75 prototipe. Pada Semester I Tahun 2026 telah didapatkan hasil realisasi jumlah prototipe produk alat kesehatan yang dilakukan pengujian sebanyak 30 prototipe, yaitu sebagai berikut :

Tabel 15. Jenis Prototipe Alat Kesehatan

No	Jenis Prototipe Alat Kesehatan	Jumlah
1	4K Camera System	1
2	AED	1
3	Defibrillator	1
4	Disposable Flexible Ureterorenoscope	1
5	Doppler USG	1
6	ECG Holter System	1
7	ESU	1
8	HD Camera System	1
9	Instrument Table Type Met-60	1
10	Instrument Table Type Met-90	1
11	Laparoscopy Pump	1
12	Light Source	1
13	Medical Pendant	3

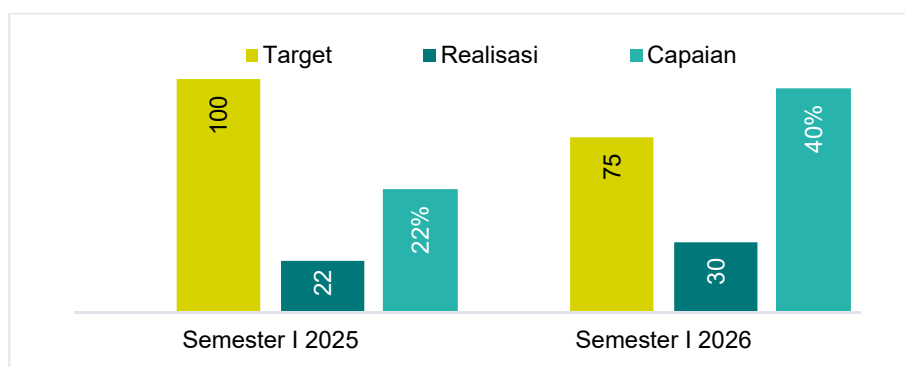
No	Jenis Prototipe Alat Kesehatan	Jumlah
14	Mesin Anestesi	6
15	Patient Warmer System	2
16	Pendant ICU	3
17	Slit Lamp	1
18	Suction Irigation	1
19	Ventilator	2
JUMLAH		30

Tabel 16. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK Surabaya Semester I tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK Surabaya	75	30	40%

Realisasi indikator jumlah prototipe produk alat kesehatan yang dilakukan pengujian pada Semester I tahun 2026 adalah sebanyak 30 prototipe dengan capaian 40 % hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah prototipe produk alat kesehatan yang diuji, dihitung pada tahun berjalan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian prototipe telah berjalan, namun realisasinya masih di bawah target yang direncanakan. Pengujian prototipe akan terus dilaksanakan pada Semester II sesuai dengan permohonan yang diterima dan kesiapan prototipe untuk diuji, sehingga target kinerja pada akhir Tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

Grafik 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Prototipe Produk Alat Kesehatan yang Diuji BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2025 - BPAFK Semester I Tahun 2026



Pada Semester I Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 75 prototipe, lebih rendah 25% dibandingkan target Semester I Tahun 2025 yang sebesar 100 prototipe. Penurunan target dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya serta penyesuaian

dengan potensi permintaan layanan dan kapasitas pelayanan BPAFK Surabaya sehingga target menjadi lebih realistis.

Meskipun target diturunkan, kinerja pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan perbaikan. Realisasi meningkat dari 22 prototipe menjadi 30 prototipe, sedangkan capaian naik dari 22% menjadi 40%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas layanan pengujian prototipe. Namun demikian, karena capaian baru mencapai 40% dari target tahunan, diperlukan optimalisasi pada Semester II melalui peningkatan sosialisasi layanan, perluasan kerja sama dengan industri dan perguruan tinggi, serta percepatan proses pelayanan agar target tahunan dapat tercapai.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Indikator Jumlah prototipe produk alat kesehatan yang diuji BPAFK/LPAFK bertujuan untuk mengukur kinerja layanan pengujian prototipe alat kesehatan dalam mendukung pengembangan inovasi, serta memastikan produk memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kinerja sesuai standar yang berlaku.

Upaya pencapaian target dilakukan melalui pemberian informasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelanggan terkait persyaratan pengujian, penyusunan template dan pembaruan dokumen standar pengujian, digitalisasi laporan hasil uji, koordinasi intensif dengan pabrikan terkait pengiriman sampel uji, serta peningkatan kompetensi SDM dan kesiapan sarana pengujian melalui pelatihan dan pengadaan peralatan serta standar uji. Langkah - langkah tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas proses pengujian, mempercepat penyelesaian layanan, dan menjaga mutu hasil pengujian prototipe alat kesehatan.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator jumlah prototipe produk alkes yang diuji tahun 2026 Semester I tahun 2026, yaitu antara lain :

- a. Proses review buku manual dan manajemen risiko memerlukan waktu lama karena customer belum memahami hasil koreksi yang disampaikan oleh tim uji produk.
- b. Keterbatasan dokumen standar pengujian partikular (kinerja), belum adanya template baku pengujian, serta belum terdigitalisasinya laporan hasil uji.
- c. Proses pengujian memerlukan waktu yang lama karena pengiriman sampel uji, bahan label, dan label unit dari pabrikan mengalami keterlambatan.
- d. Kompetensi tim penguji dan sarana pengujian partikular (kinerja) termasuk kelengkapan standar masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan serta pemenuhan alat uji yang memadai.

Upaya pemecahan masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan target indikator jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK Surabaya antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi informasi kepada customer sekaligus mengedukasi dengan memberi contoh dokumen (buku manual dan manajemen resiko) serta melaksanakan pendampingan dan monitoring penyelesaian revisi secara berkala.
- b. Inventarisasi dan menyusun template baku standar pengujian. Digitalisasi laporan hasil uji. Review dan pembaruan dokumen secara berkala.
- c. Koordinasi intensif dengan pabrikan dan menyusun timeline pengiriman sampel uji, bahan label, dan label unit
- d. Menyusun rencana pelatihan dan usulan pengadaan sarana pengujian partikular baik berupa alat uji maupun standar uji.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja jumlah prototipe produk alat kesehatan yang diuji BPAFK/LPAFK, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (benchmarking) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pada Semester I Tahun 2026, indikator Jumlah prototipe produk alat kesehatan yang diuji mencapai realisasi 30 prototipe atau 40% dari target tahunan sebanyak 75 prototipe. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pengujian prototipe telah berjalan dengan baik dalam mendukung pengembangan inovasi alat kesehatan dan pemenuhan persyaratan mutu, keamanan, serta kinerja produk.

Namun demikian, target belum tercapai secara optimal karena masih terdapat kendala berupa lamanya penyelesaian dokumen teknis, keterlambatan pengiriman sampel uji, serta keterbatasan sarana dan kompetensi pada beberapa jenis pengujian. Untuk meningkatkan capaian pada Semester II, akan dilakukan optimalisasi pendampingan kepada pelanggan, penguatan koordinasi dengan pabrikan, serta peningkatan kompetensi SDM dan sarana pengujian sehingga target kinerja Tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

2.5 Jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK

Pengujian dan/atau kalibrasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian kinerja dan akurasi alat kesehatan terhadap standar teknis yang berlaku, sedangkan inspeksi

dilaksanakan untuk menilai kesesuaian kondisi sarana prasarana dengan persyaratan keselamatan dan operasional. BPAFK Surabaya sebagai UPT Bidang PAFK menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan pengujian/kalibrasi/inspeksi sarana prasarana alat kesehatan yang bertujuan sebagai pengawasan dan pengendalian mutu alat kesehatan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Adapun definisi operasionalnya adalah jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana (alat ukur standar, TLD, instalasi) yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi pada tahun berjalan.

Kondisi yang dicapai

Target indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 74.000 sarana prasarana alat kesehatan. Pada Semester I Tahun 2026 telah didapatkan hasil jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi 35.459 sarana prasarana alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK

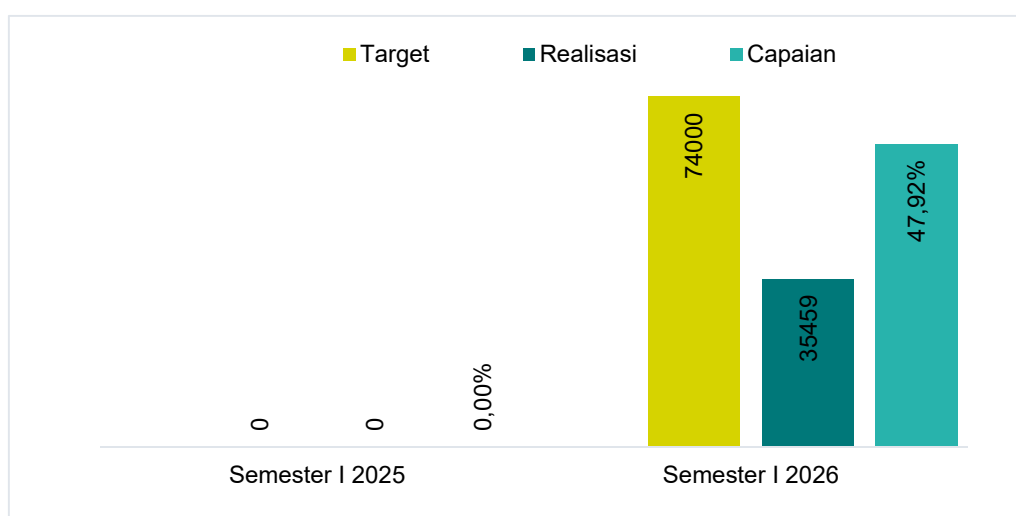
No	Jenis	Laik	Tidak Laik	Jumlah
1	Alat Kesehatan	21.744	29	21.773
2	Sarana Prasarana:			
	AUR (Alat Ukur Standar Radiasi)	625	29	654
	AUS (Alat Ukur Standar Non Radiasi)	976	60	1.036
	TLD Pembacaan	11.232	-	11.232
	TLD Registrasi	666	-	666
	Instalasi	92	6	98
	Total	35.335	124	35.459

Tabel 18. Target, realisasi dan capaian indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK Surabaya Triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK Surabaya	74.000	35.459	47,92%

Realisasi indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh pada Semester I tahun 2026 adalah sebanyak 35.459 sarana prasarana alat kesehatan dengan capaian 47,92%. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi dihitung pada tahun berjalan. Capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan, dengan tetap mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan, koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, serta penyelesaian permohonan yang telah terjadwal, realisasi pada Semester II diharapkan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2026

Grafik 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang Dilakukan Kalibrasi Semester I Tahun 2025 - Semester I Tahun 2026



Pada Tahun 2026 terjadi perubahan indikator kinerja dari Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi menjadi Jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK. Perubahan ini disertai perluasan definisi operasional, baik dari sisi objek yang dihitung maupun jenis layanan yang diberikan. Apabila pada Tahun 2025 indikator hanya mencakup alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi, maka pada Tahun 2026 indikator mencakup alat kesehatan, sarana prasarana, alat ukur standar, TLD, dan instalasi yang dilakukan pengujian, kalibrasi, dan/atau inspeksi. Oleh karena itu, perbandingan target maupun capaian antara Tahun 2025 dan Tahun 2026 tidak dapat dilakukan secara langsung karena ruang lingkup pengukurannya berbeda.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi pada Semester I tahun 2026, yaitu antara lain :

- a. Sebagian alat kesehatan dan sarpras pelanggan belum siap dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi karena masih digunakan untuk pelayanan, mengalami kerusakan, atau belum memenuhi persyaratan teknis
- b. Alat standar atau peralatan pendukung pengujian/kalibrasi memerlukan pemeliharaan atau kalibrasi ulang sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan

Upaya pemecahan masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan target indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pelanggan untuk memastikan kesiapan alat kesehatan sebelum jadwal pengujian/kalibrasi, serta melakukan konfirmasi ulang beberapa hari sebelum pelaksanaan.
- b. Melaksanakan pemeliharaan preventif dan kalibrasi berkala terhadap alat standar, serta menyiapkan alat pengganti apabila tersedia guna menjaga keberlangsungan pelayanan

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembanding (benchmarking) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan indikator jumlah alat kesehatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi pada Semester I Tahun 2026 telah mencapai realisasi sebanyak 35.459 alat kesehatan dan sarana prasarana atau 47,92% dari target tahunan sebesar 74.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan berjalan sesuai rencana pada semester pertama dan menjadi dasar yang baik untuk mencapai target hingga akhir tahun. Selain itu, tingginya jumlah alat dan sarana prasarana yang dinyatakan laik menunjukkan bahwa proses pengujian/kalibrasi/inspeksi telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, capaian Semester I masih berada di bawah 50% dari target tahunan sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan layanan pada Semester II. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum siapnya sebagian alat kesehatan dan sarana prasarana milik pelanggan untuk dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi karena masih digunakan

dalam pelayanan, mengalami kerusakan, atau belum memenuhi persyaratan teknis. Selain itu, kebutuhan pemeliharaan dan kalibrasi ulang terhadap alat standar turut memengaruhi kapasitas pelayanan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan pelanggan, peningkatan kepastian kesiapan alat sebelum pelaksanaan layanan, serta pemeliharaan preventif terhadap alat standar perlu terus dioptimalkan agar target tahunan dapat tercapai pada akhir Tahun 2026.

2.6 Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK

Untuk mendukung program penambahan kemampuan jenis layanan, BPAFK Surabaya setiap tahunnya menambah/memutakhirkan Dokumen Mutu. Penambahan Jumlah Pemutakhiran dokumen mutu yang dimaksud di atas yaitu jumlah penambahan dokumen mutu (MK/IK/LK/SOP.AP) atau dokumen-dokumen mutu yang terkait dalam melakukan pengujian dan kalibrasi. Dengan definisi operasional, Jumlah metode pengujian (uji produk alat kesehatan dan PKRT) dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK untuk menguji/kalibrasi parameter atau jenis produk yang sebelumnya belum mampu dilakukan yang dihitung secara kumulatif.

Kondisi yang dicapai

Pada Tahun 2026 ini, BPAFK Surabaya menargetkan indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK sebanyak 18 Metode Kerja.

Pada Semester I 2026 didapatkan hasil Realisasi Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK sebanyak 11 Metode Kerja, yaitu sebagai berikut :

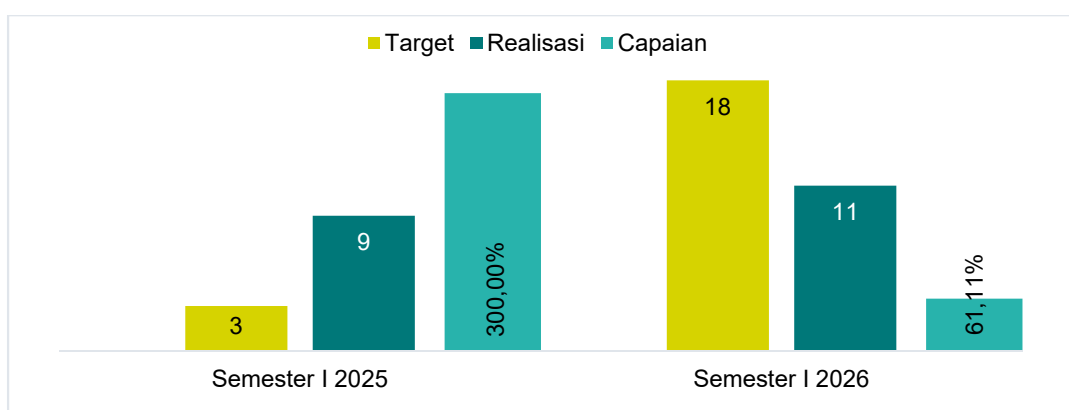
1. Metode Kerja Kalibrasi SWD,
2. Metode Kerja Kalibrasi MWD,
3. Metode Kerja Kalibrasi Mikroskop,
4. Metode Kerja Kalibrasi Timbangan Dewasa,
5. Metode Kerja Kalibrasi Dental Scaler,
6. Metode Kerja Kalibrasi Dental Mikromotor,
7. Metode Kerja Kalibrasi Bor Ortopedi,
8. Metode Kerja Kalibrasi Laser Terapi
9. Metode Kerja Kalibrasi Brakhiterapi
10. Metode Kerja Inspeksi BSC
11. Metode Kerja Inspeksi LAF

Tabel 19. Target, realisasi dan capaian indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK Semester I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian
indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK	18	11	61,11%

Indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK pada Semester I 2026 mendapatkan hasil 11 Metode Kerja, memenuhi target 18 Metode Kerja, dengan capaian sebesar 61,11%.

Grafik 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK Semester I 2025 dan Semester I 2026



Terdapat perubahan nama dan definisi operasional pada Indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK, untuk Semester I 2025, nama indikator Penambahan Pemutakhiran Dokumen Mutu dengan definisi operasional yaitu penambahan Jumlah Pemutakhiran dokumen mutu yang dimaksud di atas yaitu jumlah penambahan dokumen mutu (MK/IK/LK/SOP.AP) atau dokumen-dokumen mutu pada tahun berjalan, sedangkan untuk Semester I 2026 nama indikatornya Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK dengan definisi operasional Jumlah metode pengujian (uji produk alat kesehatan dan PKRT) dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK untuk menguji/kalibrasi parameter atau jenis produk yang sebelumnya belum mampu dilakukan yang dihitung secara kumulatif. Pencapaian Indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK akan diupayakan pemenuhannya sampai dengan Semester II Tahun 2026.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Tercapainya target indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK, BPAFK Surabaya melakukan penjadwalan pembahasan MK minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan pembahasan MK.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK, yaitu belum adanya sinkronisasi waktu antara penjadwalan kegiatan rekalisasi alat dengan penjadwalan pelayanan.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK yaitu merencanakan penjadwalan pembahasan metode kerja minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan pembahasan metode kerja.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I 2026, Indikator jumlah metode kalibrasi alat kesehatan yang berhasil dikembangkan oleh BPAFK Surabaya sebanyak 2 metode dari target 9 metode yang ditetapkan. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator sebesar 61,11%, sehingga indikator dinyatakan belum mencapai target.

Rendahnya capaian pada Semester 1 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: ketersediaan waktu pelaksanaan pembahasan Metode Kerja yang harus disesuaikan dengan jadwal pelayanan kepada Fasyankes, kompleksitas proses pengembangan metode kalibrasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, proses pengembangan metode kalibrasi juga memerlukan pengujian, verifikasi, dan evaluasi untuk memastikan metode yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan dapat diterapkan secara efektif.

Meskipun capaian masih di bawah target, kegiatan pengembangan metode kalibrasi yang telah terlaksana pada Semester I 2026 menjadi dasar untuk percepatan penyelesaian metode lainnya pada Semester II 2026. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan kegiatan, penguatan koordinasi tim teknis, pemantauan progres secara berkala, dan penetapan prioritas penyelesaian agar target tahunan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.7 Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi

Dalam upaya mencapai Laboratorium yang memenuhi Standar Nasional dan untuk memenuhi tupoksinya, BPAFK Surabaya mengajukan Akreditasi ke Lembaga Akreditasi, dalam hal ini Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Akreditasi adalah pengesahan oleh pihak ketiga terkait dengan penunjukkan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian untuk melaksanakan tugas-tugas penilaian kesesuaian tertentu (ISO 17025:2017). Akreditasi BPAFK Surabaya di selenggarakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah badan akreditasi di Indonesia yang menyelenggarakan layanan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian/ Conformity Assessment Body, seperti: lembaga sertifikasi; lembaga inspeksi; lembaga validasi/verifikasi; penyelenggara uji profesiensi; dan produsen bahan acuan (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Dengan definisi operasional, Jumlah ruang lingkup pelayanan meliputi sarana prasarana/alat/ruang lingkup lain yang terakreditasi oleh lembaga atau institusi berwenang yang dihitung secara kumulatif.

Kondisi yang dicapai

Pada Tahun 2026 ini, BPAFK Surabaya menargetkan indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi adalah 74 Ruang Lingkup.

Pada Semester I 2026 didapatkan hasil Realisasi Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi sebanyak 76 Ruang Lingkup, yaitu sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi

NO.	KELOMPOK PENGUKURAN	JENIS ALAT		INST
1	SUHU DAN KELEMBABAN	1	Inkubator Bayi	KAK
		2	Termometer Klinik	
		3	Sterilisator	

NO.	KELOMPOK PENGUKURAN	JENIS ALAT		INST
		4	Infant Warmer	
		5	Thermohygrometer	
		6	Termometer Klinik Ear	
		7	Laboratorium Incubator	
		8	Laboratorium Refrigerator	
		9	Blood Solution Warmer	
		10	Blood Bank Refrigerator	
		11	Oven	
2	TEKANAN	12	Sphygmomanometer Mercury/ Aneroid	KAK
		13	Sphygmomanometer Non Mercury	
		14	Digital Manometer	
		15	Suction Pump	
		16	Blood Pressure Monitor	
		17	Suction Wall	
		18	NIBP Analyzer	
3	VOLUME	19	Mikropipet	KAK
		20	Spirometer	
4	FLOW	21	Flowmeter Oksigen	KAK
		22	CPAP	
		23	Portable Oksigen Konsentrator	
		24	HFNC	
		25	Oxygen Blender	
		26	Mesin Anestesi	
		27	nebulizer	
5	ALIRAN	28	Syringe Pump	KAK
		29	Infusion Pump	
6	CONDUCTIVITY	30	Hemodialisa	KAK

NO.	KELOMPOK PENGUKURAN	JENIS ALAT		INST
7	KELISTRIKAN	31	ECG Recorder	KAK
		32	Bedside Monitor	
		33	Patient/ ECG Simulator	
		34	ESU	
		35	Elektrostimulator (EST)	
8	WAKTU DAN FREKUENSI	36	Centrifuge	KAK
		37	Tachometer	
		38	Doppler	
		39	Stirrer	
		40	Rotator	
9	MASSA	41	Timbangan Bayi Analog	KAK
		42	Timbangan Bayi Digital	
		43	Timbangan Analitik	
		44	Timbangan dewasa mekanik	
		45	Timbangan dewasa digital	
		46	Timbangan Elektronik	
10	FOTOMETRI	47	Lux meter	KAK
		48	Phototerapi	
11	RADIASI PENGION	49	Survey Meter	KAUR
		50	Pendose Meter	
		51	Film/TLD Badge	
		52	Linac Foton	
		53	Linac Elektron	

LINGKUP PENGUJIAN

1	FISIKA	54	General X-Ray	PRUK
---	--------	----	---------------	------

NO.	KELOMPOK PENGUKURAN	JENIS ALAT		INST
	(Radiasi pengion)	55	Mobile X-Ray	
		56	Dental X-Ray Intraoral	
		57	Dental X-Ray Panoramic	
		58	Dental X-Ray Cephalometric	
		59	CT-Scan	
		60	X-Ray Mammografi	
		61	X-Ray Fluoroscopy	
		62	X-Ray C-Arm	
		63	X-Ray Angiografi	
		64	Paparan Radiasi	
		65	APD	
		66	BMD	
2	FISIKA (Radiasi non pengion)	67	Computed Radiografi (CR)	PRUK
		68	Digital Radiografi (DR)	
		69	MRI (Magnetic Resonance)	
3	FISIKA	70	TLD Badge Hp(10) dan Hp(3)	PDP
		71	TLD Badge Hp(3)	
4	KELISTRIKAN	72	Pengujian SNI IEC 60601-1 (Syringe Pump, Infusion Pump, Bedside Monitor, Ventilator, Lampu operasi, Meja operasi)	UPRO

LINGKUP INSPEKSI

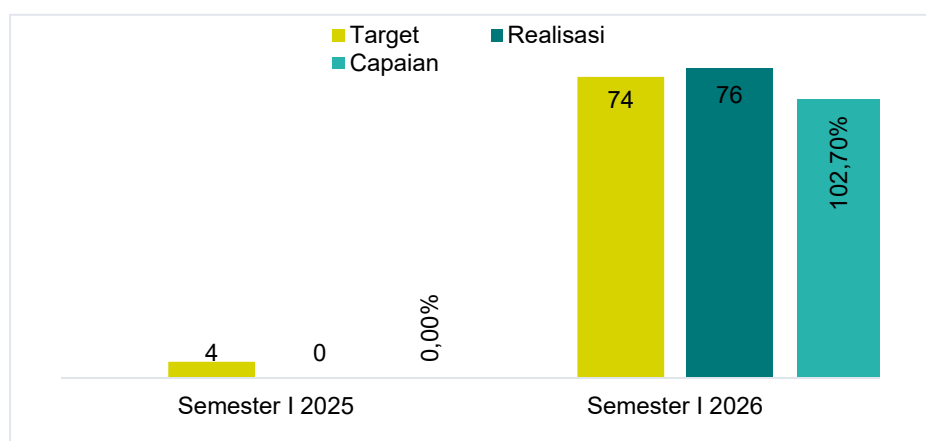
NO.	KELOMPOK PENGUKURAN	JENIS ALAT		INST
1	Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan	73	Inspeksi BSC (Biosafety Cabinet)	ISPK
		74	Inspeksi Tata Udara	
		75	Inspeksi Gas dan Vaccum Medik	
		76	Inspeksi Listrik Medis	

Tabel 21. Target, realisasi dan capaian indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi Semester I 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	74	76	102,7%

Indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi pada Semester I 2026 mendapatkan hasil 76 Ruang Lingkup, telah melampaui target 74 Ruang Lingkup, dengan capaian sebesar 102,7%.

Grafik 8. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi Semester I 2025 dan Semester I 2026



Terdapat perubahan nama dan definisi operasional pada Indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi, untuk Semester I 2025, nama indikator Jumlah Penambahan Lingkup Akreditasi Alat yang Terakreditasi dengan definisi operasional yaitu penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi pada tahun berjalan, sedangkan untuk Semester I 2026 nama indikatornya Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi dengan definisi operasional Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dihitung secara kumulatif. Pada pada Indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi Semester I Tahun 2026 telah melampaui target dan akan dipertahankan sampai dengan Semester II Tahun 2026.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Tercapainya target indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi, BPAFK Surabaya melakukan perluasan jaringan kerjasama dengan Fasyankes untuk alat kesehatan yang canggih (LINAC).

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi, yaitu Keterbatasan tempat pelaksanaan witnessing untuk alat kesehatan yang canggih (LINAC).

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi yaitu merencanakan perluasan jaringan kerjasama dengan Fasyankes untuk alat kesehatan yang canggih (LINAC).

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I 2026, Indikator jumlah ruang lingkup pelayanan BPAFK Surabaya yang telah terakreditasi mencapai 76 ruang lingkup dari target yang ditetapkan sebanyak 74 ruang lingkup. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator sebesar 102,7%, sehingga indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan dan pemeliharaan akreditasi ruang lingkup pelayanan yang didukung oleh perencanaan yang baik, kesiapan sumber daya, kompetensi personel, serta implementasi sistem manajemen mutu yang berjalan secara konsisten. Selain itu, koordinasi yang baik antar unit kerja serta komitmen dalam memenuhi persyaratan akreditasi turut berkontribusi terhadap tercapainya target tersebut.

Pencapaian yang melebihi target menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan pengakuan kompetensi BPAFK Surabaya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir Semester II 2026, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap ruang lingkup yang telah terakreditasi, serta upaya peningkatan kompetensi dan pemenuhan persyaratan mutu agar status akreditasi dapat dipertahankan dan dikembangkan pada periode berikutnya.

2.8 Penambahan kemampuan jenis pelayanan

Untuk pengembangan bisnis, BPFK Surabaya setiap tahunnya menambah kemampuan jenis layanan. Sesuai dengan Permenkeu No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan, perlu pemenuhan pengujian/kalibrasi/inspeksi alat Kesehatan sesuai tupoksi. Dengan definisi operasional, Jumlah penambahan kemampuan jenis pelayanan meliputi pengujian/kalibrasi alat kesehatan/alat ukur/inspeksi/ruang lingkup lain yang dihitung secara kumulatif.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah penambahan kemampuan jenis layanan: Pengadaan Alat Standar, Pembahasan Metode Kerja/Instruksi Kerja/Lembar Kerja, Dokumen Acuan dan Pertemuan Penapisan Alat Standar.

Kondisi yang dicapai

Pada Tahun 2026 ini, BPAFK Surabaya menargetkan indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan adalah 13 Jenis Layanan.

Pada Semester I 2026 didapatkan hasil Realisasi Penambahan kemampuan jenis pelayanan sebanyak 15 Jenis Layanan, yaitu sebagai berikut:

1. Vortex Mixer
2. Dental Mikromotor
3. Dental Scaller
4. Electro Convulsive Therapy (ECT)
5. Bor Orthopedi
6. SWD
7. MWD
8. Suction with Nebul
9. Brakhiterapi
10. Autorefraktometer
11. UV Sterilize Chamber
12. Blood Colection Monitor
13. Hemoflow

14. Hemoscale

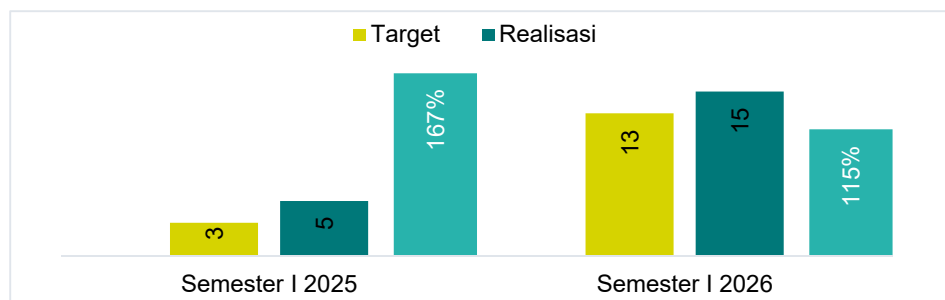
15. Coldplate

Tabel 22. Target, realisasi dan capaian indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan Semester I 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Penambahan kemampuan jenis pelayanan	13	15	115,38%

Indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan pada Semester I 2026 mendapatkan hasil dari target 13 jenis layanan sudah terlampaui menjadi 15 jenis layanan, dengan capaian sebesar 115,38%.

Grafik 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan Semester I 2025 dan Semester I 2026



Terdapat perubahan nama dan definisi operasional pada Indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan, untuk Semester I 2025, nama indikator Jumlah Penambahan Kemampuan Jenis Layanan dengan definisi operasional yaitu penambahan Kemampuan Jenis Layanan pada tahun berjalan, sedangkan untuk Semester I 2026 nama indikatornya Penambahan kemampuan jenis pelayanan dengan definisi operasional Penambahan kemampuan jenis pelayanan yang dihitung secara kumulatif. Pada pada Indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan Semester I Tahun 2026 telah melampaui target dan akan dipertahankan sampai dengan Semester II Tahun 2026.

Analisis upaya pencapaian target indikator

Tercapainya target indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan, BPAFK Surabaya melakukan penyediaan alat standar sesuai dengan rencana pengembangan kemampuan layanan.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator Penambahan kemampuan jenis pelayanan, yaitu belum lengkapnya persyaratan penambahan kemampuan pelayanan seperti alat standar dan pemenuhan kompetensi SDM.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi yaitu merencanakan penyediaan alat standar sesuai dengan rencana pengembangan kemampuan layanan dan pelatihan SDM.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Penambahan kemampuan jenis pelayanan, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembanding (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I 2026, BPAFK Surabaya telah berhasil menambah kemampuan jenis layanan sebanyak 15 lingkup dari target yang ditetapkan sebesar 13 lingkup. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator mencapai 115,38%, sehingga indikator dinyatakan berhasil tercapai dan melampaui target.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan layanan telah berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penambahan kemampuan jenis layanan didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan peralatan pendukung, serta komitmen organisasi dalam memperluas cakupan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Realisasi yang melebihi target mencerminkan kemampuan BPAFK Surabaya dalam mengidentifikasi peluang pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Penambahan lingkup layanan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan, memperluas cakupan pelayanan teknis, serta meningkatkan

kepuasan pelanggan melalui tersedianya layanan yang lebih beragam dan komprehensif.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, perlu dilakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan layanan yang baru dikembangkan, peningkatan kompetensi personel secara berkelanjutan, serta evaluasi berkala guna memastikan kualitas layanan tetap memenuhi standar yang ditetapkan pada Semester II 2026.

2.9 Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi

Untuk menjaga agar Alat standar Aman dan Bermutu, maka Alat standar tersebut harus terkalibrasi dan tertelusur ke Lab Pengujian/Kalibrasi yang tertelusur dengan Satuan Internasional agar tetap memenuhi standar. Dengan definisi operasional, Persentase alat ukur standar yang dikalibrasi terhadap jumlah alat ukur standar yang aktif digunakan.

Formula untuk memperoleh Peralatan yang Aman dan Bermutu dibagi Jumlah Alat Standar Pengujian/Kalibrasi yang terkalibrasi dibagi dengan Jumlah Alat Kerja Standar dikali 100.

Kondisi yang dicapai

Pada Tahun 2026 ini, BPAFK Surabaya menargetkan indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi adalah 80%.

Pada Semester I 2026 didapatkan hasil Realisasi Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi sebesar 51,41% (Alat ukur standar yang telah dikalibrasi sebanyak 310 alat dari jumlah total alat standar aktif 603 alat), yaitu rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Realisasi Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi

NO.	PROVIDER	Tanggal Berangkat	Jumlah
1	Calties Surabaya	2 Januari 2026	3
2	Kaliman	14 Januari 2026	22
3	BPAFK Jakarta	14 Januari 2026	22
4	Certus	14 Januari 2026	3
5	Quantum	14 Januari 2026	1
6	BMKG Jakarta	14 Januari 2026	4
7	Trusur	14 Januari 2026	2
8	Calties Surabaya	22 Januari 2026	3
9	BPAFK Surabaya	22 Januari 2026	10

NO.	PROVIDER	Tanggal Berangkat	Jumlah
10	Kaliman	29 Januari 2026	8
11	BPAFK Jakarta	29 Januari 2026	18
12	Certus	29 Januari 2026	2
13	BPAFK Surabaya	02 Februari 2026	19
14	BPAFK Jakarta	12 Februari 2026	18
15	Kaliman	12 Februari 2026	12
16	Certus	12 Februari 2026	2
17	Caltesys Surabaya	25 Februari 2026	1
18	Telkom Surabaya	25 Februari 2026	3
19	Kaliman	05 Maret 2026	6
20	BPAFK Jakarta	05 Maret 2026	16
21	BMKG Jakarta	05 Maret 2026	3
22	Certus	05 Maret 2026	1
23	BPAFK Surabaya	11 Maret 2026	4
24	Caltesys Surabaya	12 Maret 2026	7
25	PLN	9 April 2026	6
26	BPAFK Jakarta	9 April 2026	5
27	Kaliman	23 April 2026	6
28	BPAFK Jakarta	23 April 2026	10
29	Certus	23 April 2026	3
30	BPAFK Jakarta	07 Mei 2026	5
31	Quantum	07 Mei 2026	2
32	PLN	7 Mei 2026	8
33	Certus	7 Mei 2026	3
34	Kaliman	7 Mei 2026	3
35	Caltesys Surabaya	20 Mei 2026	6
36	Almega Surabaya	10 Juni 2026	6
37	BPAFK Surabaya	17 Juni 2026	7
38	Dirmet Bandung	11 Juni 2026	28
39	BPAFK Surabaya	15 Juni 2026	2
40	BPAFK Jakarta	25 Juni 2026	4

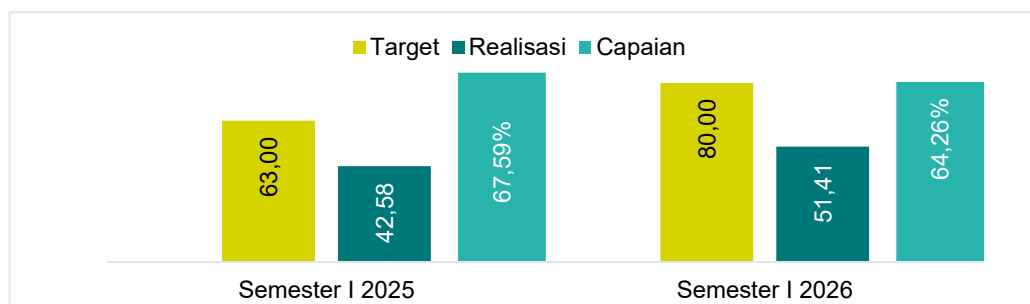
NO.	PROVIDER	Tanggal Berangkat	Jumlah
41	SNSU - MAMPANG	25 Juni 2026	3
42	Certus	25 Juni 2026	1
43	Kaliman	25 Juni 2026	4
44	PLN	25 Juni 2026	5
45	PT. GLOBAL	25 Juni 2026	3
TOTAL			310

Tabel 24. Target, realisasi dan capaian indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi Semester I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	80%	51,41%	64,26%

Indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi pada Semester I 2026 mendapatkan hasil 51,41%, belum memenuhi target 80%, dengan capaian sebesar 64,26%.

Grafik 10. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi Semester I 2025 dan Semester I 2026



Pada Indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi, terdapat perbedaan target dan capaian, dibandingkan capaian Semester I Tahun 2025 realisasi 42,58% capaian Semester I Tahun 2026 memperoleh hasil lebih tinggi yaitu 51,41%. Pada Semester I Tahun 2026 BPAFK Surabaya belum mampu mencapai target Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi dan akan diupayakan mencapai target sampai dengan Semester II Tahun 2026.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Tercapainya target indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi, BPAFK Surabaya melakukan koordinasi internal (dengan Timja Pelayanan) dan melakukan upgrade modul peminjaman alat standar untuk dinas luar di aplikasi SIMLPK.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi, yaitu Belum adanya sinkronisasi waktu penjadwalan waktu rekalisasi dengan jadwal pelayanan.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi yaitu Merencanakan peningkatan koordinasi internal (dengan Timja Pelayanan Teknis) dan melakukan upgrade modul peminjaman alat standar untuk dinas luar di aplikasi SIMLPK.

Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Penambahan kemampuan jenis pelayanan, tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I 2026, Indikator persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi mencapai 51,41% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator terhadap target adalah sebesar 64,26%, sehingga indikator belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Belum tercapainya target ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya sinkronisasi waktu penjadwalan waktu rekalisasi dengan jadwal pelayanan pada periode Semester I 2026.

Kalibrasi alat ukur standar merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjamin keabsahan hasil pengukuran dan ketertelusuran metrologi dalam penyelenggaraan layanan BPAFK Surabaya. Oleh karena itu, keterlambatan pelaksanaan kalibrasi perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak pada efektivitas pelayanan dan pemenuhan persyaratan sistem manajemen mutu.

Untuk meningkatkan capaian pada Semester II 2026, perlu dilakukan peningkatan koordinasi internal (dengan Timja Pelayanan) dan melakukan upgrade modul peminjaman alat standar untuk dinas luar di aplikasi SIMLPK dan perlu dilakukan penambahan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta perlu dilakukan monitoring berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target hingga akhir tahun 2026.

2.10 Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

Perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan merupakan kegiatan kerja sama yang diikat secara legal dalam dokumen tertulis yang berisi kesepakatan resmi antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan baik layanan di bidang pengujian kalibrasi, uji kesesuaian, uji produk maupun di bidang pendidikan dan lainnya yang mendukung pengamanan alat dan fasilitas kesehatan.

Adapun definisi operasional adalah jumlah perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh suatu lembaga/institusi yang mencakup layanan atau kolaborasi di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan yang dihitung secara kumulatif.

Tabel 25. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Semester I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	57	53	92,98%

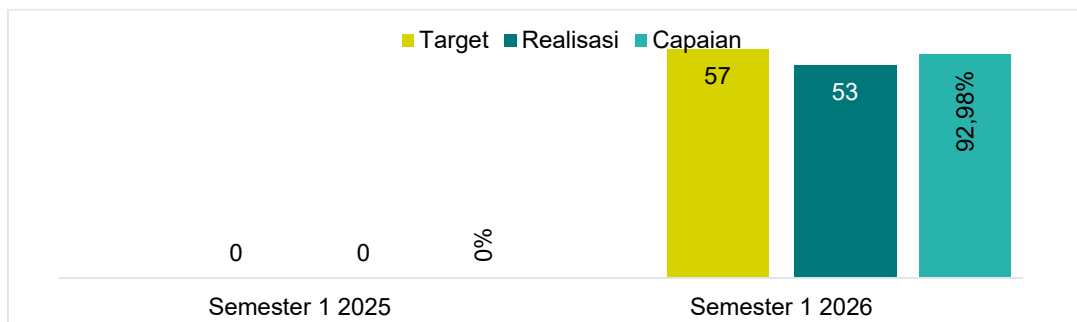
Pada Semester I Tahun 2026, realisasi indikator kinerja jumlah jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan tercapai 53 kerja sama dengan mitra sebagai berikut :

1. RSUD MGR Gabriel Manek Svd Atambua
2. RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso
3. RSUP Ngoerah Denpasar Bali
4. UPT. RS Mata Masyarakat Jawa Timur

5. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
6. RSUD dr. Iskak Tulungagung
7. RSUD Kab. Buleleng
8. UPTD RSUD Simpang Lima Gumul Kediri
9. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
10. RSUD Dokter Mohamad Soewandhie
11. RSUD Ploso Jombang
12. RSUD Bangil Kab. Pasuruan
13. RSUD Sidoarjo
14. RSI A YANI
15. Dinas Kesehatan Kota Surabaya
16. RS Adi Husada Undaan Wetan
17. RSUD Prof. Dr. Soekandar Kab. Mojokerto
18. RSUD Dr. Sayidiman Magetan
19. Dinas Kesehatan Kab. Bulungan
20. RSUD Campurdarat Tulungagung
21. RSUP dr. Ben Mboi Kupang
22. BBLKL Salatiga
23. RS UBAYA
24. RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
25. RSUD Husada Prima Surabaya
26. RS Gotong Royong
27. RS Baptis Kediri
28. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
29. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
30. RSUD DR. R. Soedarsono Kota Pasuruan
31. RSUD Eka Candrarini
32. RSUD Bali Mandara
33. RS UNAIR
34. RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
35. RSUD Caruban
36. DINAS Kesehatan Kab. Belu
37. RSUD Waibakul Sumba Tengah
38. RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan
39. RS Dharma Yadnya
40. RSUD Wangaya

41. RSUD Kota Malang
42. RSGM Universitas Jember
43. RSUD Geneng Ngawi
44. RS Pertamina Balikpapan
45. PT Panasonic
46. RSUD Klungkung
47. RSUD Soetomo
48. RSUD Sardjito
49. BLKPK Provinsi NTB
50. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya
51. UPN Veteran Jawa Timur
52. RSUD Sumberglagah
53. RSUD Bakti Dharma Husada

Grafik 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Semester I Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026



Pada tahun 2026, terdapat perubahan definisi operasional pada indikator terkait perjanjian kerjasama/kemitraan. Oleh sebab itu, indikator Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan tidak dapat dibandingkan pencapaiannya dengan Semester 1 Tahun 2025. Namun demikian, dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa capaian indikator belum memenuhi target. Capaian indikator sebesar 92,98% dengan jumlah perjanjian kerja sama sebanyak 53 kerja sama dari target 57 kerja sama. Hingga saat ini, belum ada standar nasional/internasional yang dijadikan benchmark terkait Indikator kinerja Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.

Analisa upaya yang menunjang keberhasilan program

Tercapainya target indikator Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan menunjukkan bahwa tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan berhasil dicapai dengan memperkuat relasi melalui kerja sama yang legal.

Pada tahun 2026 telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan kerja sama meliputi identifikasi calon mitra potensial, pelaksanaan audiensi dan koordinasi, penyelenggaraan kegiatan promosi layanan, serta pendampingan dalam proses penyusunan dokumen kerja sama.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Semester I Tahun 2026 adalah Beberapa fasyankes masih dalam tahap negosiasi klausul perjanjian kerja sama/MoU.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses perjanjian kerja sama/MoU adalah melakukan komunikasi lebih intens kepada calon pelanggan agar perjanjian kerjasama dapat selesai sesuai target.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Kegagalan/Keberhasilan

Pada indikator kinerja Jumlah Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan di Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan belum melampaui target 57 kerja sama. Pada Semester I Tahun 2026 tercapai 53 kerja sama dengan persentase capaian sebesar 92,98%. Target pada Semester I Tahun 2026 belum tercapai karena ada beberapa mitra yang masih dalam tahap negosiasi. Oleh sebab itu, akan dilakukan optimalisasi dengan melakukan komunikasi yang intens dengan calon mitra serta segera menyelesaikan proses negosiasi agar penyelesaian dokumen kerja sama bisa selesai sesuai target.

2.11 Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Adapun definisi operasional dari indikator Nilai SAKIP BPAFK Surabaya adalah angka yang mengukur tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Nilai ini dihitung berdasarkan lima komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%), dan Capaian Kinerja (15%).

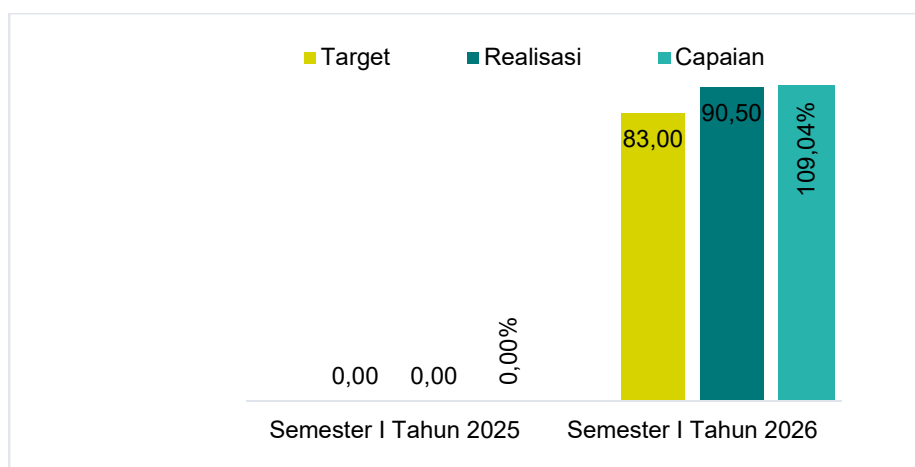
Kondisi yang dicapai

Pada Semester I Tahun 2025 nilai SAKIP menggunakan nilai SAKIP Tahun 2024 yang pada tahun 2025 belum dinilai sebagai indikator kinerja. Sedangkan pada tahun 2026 nilai SAKIP masuk pada indikator kinerja. Hasil SAKIP Semester 1 Tahun 2026 menggunakan nilai SAKIP tahun 2025 yaitu sebesar 90,50 dengan kategori AA (Telah melalui Penjaminan Kualitas Itjen) pada tanggal 3 Juni 2026

Tabel 26. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester 1	Capaian
Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	83	90,50	109,04%

Grafik 12. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026



Pada Semester I Tahun 2025 nilai SAKIP menggunakan nilai SAKIP Tahun 2024 yang pada tahun 2025 belum dinilai sebagai indikator kinerja pada tahun 2026 nilai SAKIP masuk pada indikator kinerja. Hasil SAKIP Semester 1 Tahun 2026 menggunakan nilai SAKIP tahun 2025 yaitu sebesar 90,50 dengan kategori AA (Telah melalui Penjaminan Kualitas Itjen) pada tanggal 3 Juni 2026. Sehingga indikator tersebut tidak dapat dibandingkan.

Analisis upaya pencapaian target indikator

Pada Semester I Tahun 2026, upaya pencapaian target indikator Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah melengkapi data dukung KKE SAKIP dalam rangka penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SAKIP Tahun 2025.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami adalah adanya ketidakselarasan antara cascading anggaran (RO) dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam evaluasi capaian indikator kinerja.

Upaya pemecahan masalah

Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja adalah melakukan proses revisi DJA terkait usulan RO.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Nilai SAKIP tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester 1, Indikator Nilai SAKIP 90,50 dengan capaian 109,04%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Nilai SAKIP telah berjalan dengan baik dan target telah terpenuhi. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melengkapi data dukung KKE SAKIP dalam rangka penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SAKIP Tahun 2025.

2.12 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam hal ini adalah pengguna layanan

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari BPAFK Surabaya sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam pemenuhan Survei Kepuasan Masyarakat BPAFK Surabaya membuat Kuisioner yang harus diisi oleh Pelanggan sebelum menerima Hasil/Sertifikat Pengukuran Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan BPAFK Surabaya (SIMLPK). Pada Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 terdapat 9 Ruang Lingkup/Unsur Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Petugas
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan/Kesesuaian dengan Janji Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan. Ada 2 tahap perhitungan:

1. SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per unsur dibagi Total unsur yang terisi) dikali Nilai Penimbang
2. IKPL = SKM dikali 25, dihitung secara kumulatif.

Adapun rincian rumus perhitungannya ialah sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$$

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Adapun definisi operasional Indeks Kepuasan Pengguna Layanan /Pelanggan adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Kondisi yang dicapai

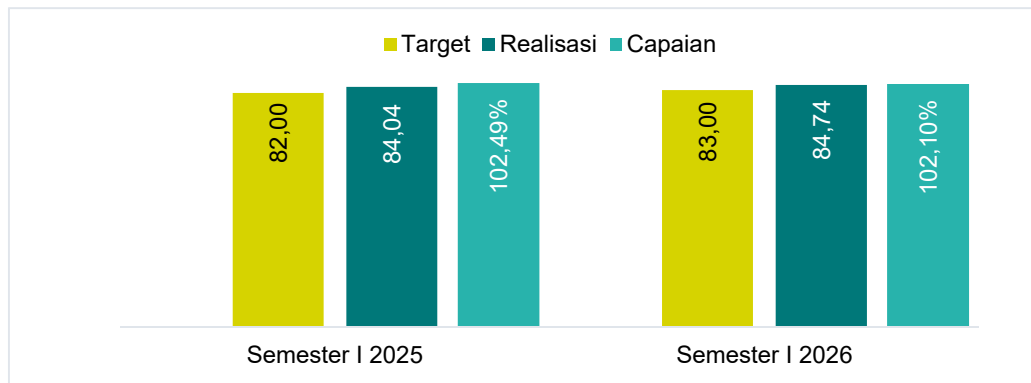
Pada tahun 2026, pengambilan data IKPL melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat didapat dari seluruh pelanggan yang akan mengunduh hasil pengujian/kalibrasi pada menu Client Area, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Pengujian/Kalibrasi (SIMLPK) BPAFK Surabaya. Setelah data terkumpul, kemudian data survei tersebut diolah sesuai pedoman perhitungan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 27. Target, realisasi dan capaian indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)	83	84,74	102,10%

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) pada Semester I Tahun 2026 didapatkan dari 778 Responden dengan hasil 84,74. hasil tersebut memenuhi target dengan capaian sebesar 102,10%.

Grafik 13. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026



Pada survei kepuasan masyarakat Semester I Tahun 2025 memperoleh hasil IKPL sebesar 84,04 dengan capaian 102,49%, sedangkan pada Semester I Tahun 2026 memperoleh hasil 84,74 dengan capaian 102,10%. Perbandingan persentase capaian *year on year* terlihat mengalami penurunan karena target IKPL naik, namun secara umum hasil IKPL mengalami kenaikan sebesar 0,7. Pada Semester I Tahun 2026, IKPL BPAFK Surabaya mampu mencapai target yang ditentukan dan akan terus dipertahankan sampai dengan Semester II Tahun 2026.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Tercapainya target indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat yang dalam hal ini merupakan pengguna layanan BPAFK Surabaya. Strategi yang dilakukan BPAFK Surabaya dalam mencapai target indikator tersebut adalah dengan pengisian Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat melalui menu Client Area, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Pengujian/Kalibrasi (SIMLPK) BPAFK Surabaya. Pelanggan wajib mengisi survei tersebut sebelum mengunduh sertifikat pengujian/kalibrasi sehingga BPAFK Surabaya dapat memperoleh responden dari seluruh fasyankes yang dilayani. BPAFK Surabaya juga melakukan perbaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan pada unsur-unsur survei yang telah ditetapkan

Permasalahan

Nilai IKPL BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2026 sudah baik. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang memperoleh nilai rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pertanyaan yang diberikan kepada pelanggan.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah melakukan evaluasi pertanyaan yang diajukan kepada pelanggan untuk memperoleh data hasil survei yang mewakili kondisi riil pelayanan BPAFK Surabaya.

Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya telah dilakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional Atau Internasional (*Benchmark* Kinerja) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029, untuk periode tahun 2026 target Nasional Kemenpan RB nilai minimal adalah 78,2, sementara hasil survey kepuasan Masyarakat di BPAFK Surabaya memperoleh nilai 84,74 dengan hasil analisis sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan, diperoleh nilai 84,74, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 78,20. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 108,36% dari target ($84,74 \div 78,20 \times 100\%$), atau lebih tinggi 6,54 poin dibandingkan target yang ditetapkan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelanggan merasa puas terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, kompetensi petugas, komunikasi, serta kualitas hasil layanan telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi yang ditetapkan organisasi.

Meskipun target telah terlampaui, hasil survei ini tetap perlu dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap unsur pelayanan. Identifikasi terhadap unsur-unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah perlu dilakukan agar dapat disusun program perbaikan yang tepat sasaran, sementara aspek yang telah memperoleh penilaian tinggi perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan guna menjaga konsistensi kualitas layanan serta meningkatkan loyalitas pelanggan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester 1, Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya 84,47 dengan capaian 102,10%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan BPAFK Surabaya telah berjalan dengan baik dan target telah terpenuhi.

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan terhadap hasil survei kepuasan masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas pertanyaan yang ditujukan untuk pengguna layanan.

2.13 Nilai Kinerja Anggaran BPAFK Surabaya

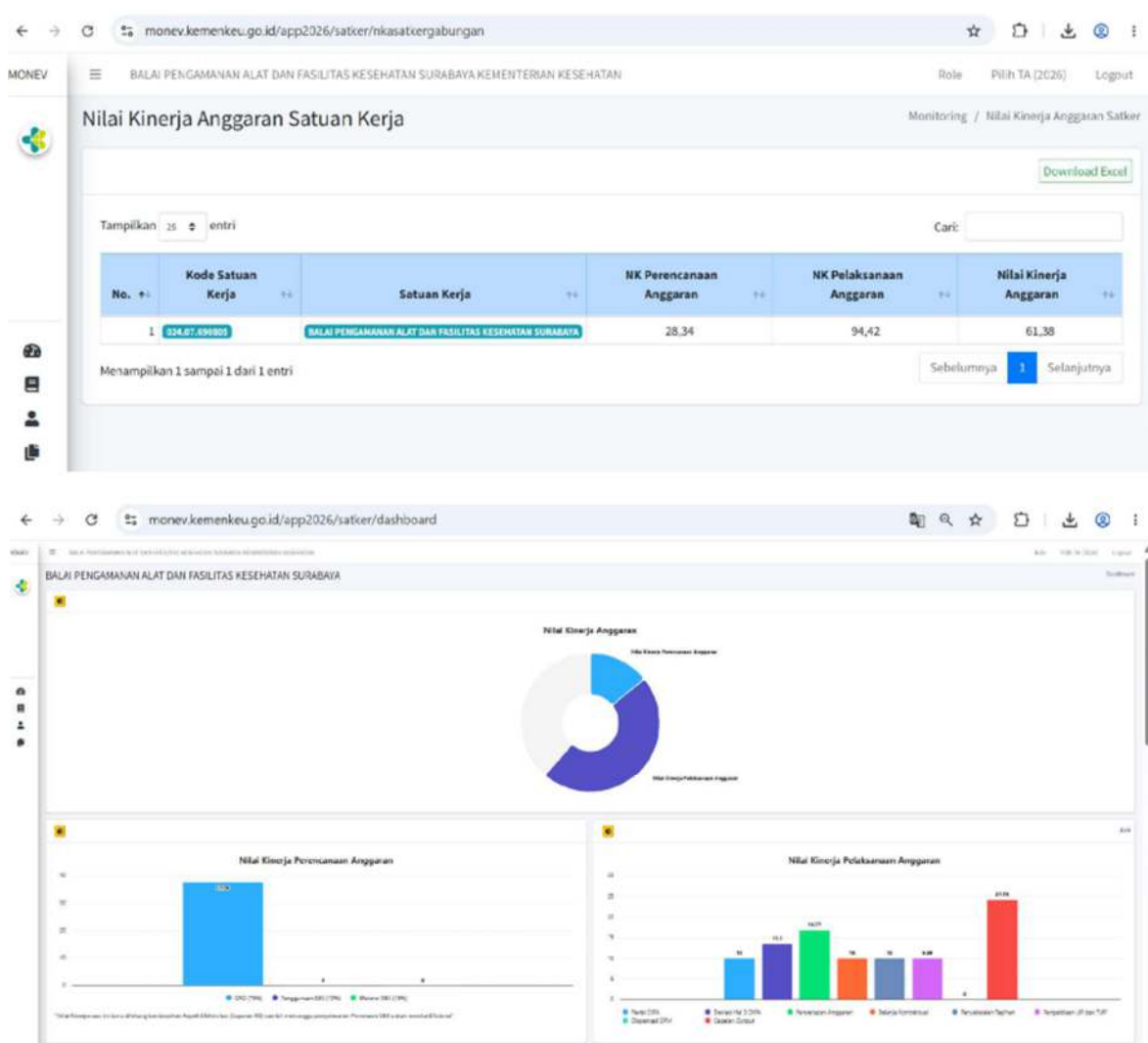
Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut salah satunya diukur melalui capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya, yang mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Adapun definisi operasional dari indikator Nilai kinerja penganggaran BPAFK Surabaya adalah Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Nilai Perencanaan Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya didapat dari hasil penjumlahan efektivitas penggunaan anggaran dengan bobot 75% dan efisiensi SBK sebesar 25%. Rincian baru bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari capaian RO dengan bobot sebesar 75%, penggunaan SBK sebesar 10% dan efisiensi SBK sebesar 15%. Sedangkan untuk Nilai Pelaksanaan Anggaran didapat dari Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM serta Capaian Output.

Kondisi yang dicapai

Pada Semester 1 tahun 2026, realisasi indikator Nilai kinerja penganggaran BPAFK Surabaya sebesar 61,38 dengan capaian 65,30%. Realisasi indikator di Semester 1 Tahun kedua Renstra menunjukkan perlu upaya untuk mendorong ketercapaian target periode akhir tahun 2026 yakni sebesar 94.

Gambar 12. Tampilan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester 1 Tahun 2026

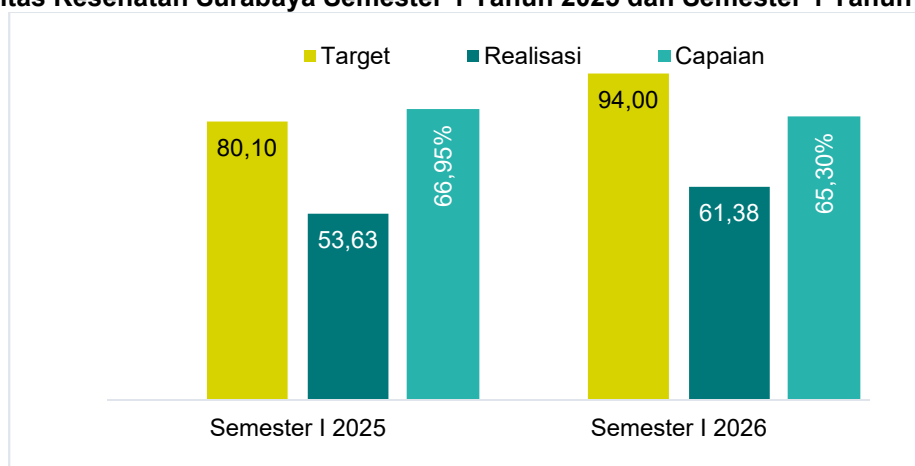


Hasil tersebut diperoleh dari aplikasi Smart DJA per tanggal 3 Juli 2026 dengan rincian perhitungan hasil penjumlahan nilai kinerja perencanaan anggaran (28,34) yang telah dikali dengan bobot 50% yakni 14,17 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (94,42) yang telah dikali dengan bobot 50% yakni 47,21.

Tabel 28. Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester 1 Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester 1	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	94	61,38	65,30%

Grafik 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026



Pada Hasil Semester I Tahun 2025 memperoleh hasil 53,63 dengan capaian 66,95%, pada Semester I Tahun 2026 memperoleh hasil 61,38 dengan capaian 65,30%. Pada Semester I Tahun 2026, belum mencapai target Nilai Kinerja Anggaran dan akan diupayakan pemenuhannya sampai dengan Semester II Tahun 2026. Hingga saat ini, belum ada standar nasional/internasional yang dijadikan benchmark terkait Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya belum dapat mencapai target tahun 2026 yakni 94,00. Target tersebut diupayakan tercapai pada Triwulan 4 atau akhir tahun 2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 249 ayat (7), disebutkan bahwa, Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Nilai Perencanaan Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya didapat dari hasil penjumlahan efektivitas penggunaan anggaran dengan bobot 75% dan efisiensi SBK sebesar 25%. Rincian baru bobot Penilaian Kinerja

Perencanaan Anggaran terdiri dari capaian RO dengan bobot sebesar 75%, penggunaan SBK sebesar 10% dan efisiensi SBK sebesar 15%. Sedangkan untuk Nilai Pelaksanaan Anggaran didapat dari Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM serta Capaian Output. Capaian NKA Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester 1 Tahun 2026 dengan nilai 61,38. Terdapat permasalahan antara lain:

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah formulasi penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) belum mencerminkan capaian kinerja secara optimal. Pada penilaian capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, nilai indikator penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK belum terakomodasi pada aplikasi e-Monev DJA, meskipun seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut telah dilaksanakan dan realisasi anggarannya telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026. Kondisi ini menyebabkan nilai NKA yang diperoleh belum sepenuhnya menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sebenarnya.

Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) belum optimal karena adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan yang mengakibatkan deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran. Selain itu, sebagian Belanja Modal memang direncanakan terealisasi pada Semester II Tahun Anggaran 2026 sesuai tahapan pengadaan barang/jasa, sehingga tingkat penyerapan anggaran pada Triwulan II belum optimal dan berdampak pada nilai NKA.

Upaya pemecahan masalah

BPAFK Surabaya telah memastikan bahwa seluruh kegiatan yang mendukung indikator penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta direalisasikan anggarannya secara tepat waktu. Selain itu, dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Tim Kerja Keuangan dan BMN Ditjen Farmalkes untuk memastikan proses pembaruan data dan sinkronisasi pada aplikasi e-Monev DJA sehingga capaian indikator dapat terbaca dan tercermin dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). BPAFK Surabaya juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penilaian kinerja anggaran serta melengkapi data dukung yang diperlukan agar seluruh capaian kinerja dapat tervalidasi dan tercatat secara optimal pada periode penilaian berikutnya.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPAFK Surabaya tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester 1 Tahun 2026 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya belum dapat mencapai target tahun 2026 yakni 94,00. Target tersebut diupayakan tercapai pada Triwulan 4 atau akhir tahun 2026. Sebagai upaya meningkatkan capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya melakukan revisi DIPA pada awal Triwulan III Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan jadwal pelaksanaan kegiatan terkini. Selain itu, dilakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa serta penguatan monitoring pelaksanaan dan penyelesaian kontrak agar realisasi Belanja Modal dapat terlaksana tepat waktu pada Semester II Tahun Anggaran 2026, sehingga penyerapan anggaran dan nilai NKA dapat tercapai secara optimal.

2.14 Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya

Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya sesuai definisi operasional adalah Ukuran yang menggambarkan kualitas ASN Kemenkes di Lingkungan Eselon I berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Target Indeks Kualitas SDM pada Tahun 2025 s.d. 2029 dalam dokumen Renstra Kemenkes yaitu tahun 2025 sebesar 81 Nilai, tahun 2026 sebesar 82 Nilai, tahun 2027 sebesar 83 Nilai, tahun 2028 sebesar 84 Nilai, dan tahun 2029 sebesar 85 Nilai. Capaian Indeks Kualitas SDM merupakan rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di BPAFK Surabaya.

Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) di Kementerian Kesehatan dihitung secara otomatis melalui integrasi data di portal E-Office Kemenkes dan SIMKA. . Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dimensi dan bobot pengukuran IP ASN terdiri atas 4 dimensi yaitu:

- Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%): Dinilai dari jenjang pendidikan terakhir, dengan penilaian sebagai berikut:
 - Bobot 25 bagi PNS yang memiliki pendidikan S-3;
 - Bobot 20 bagi PNS yang memiliki pendidikan S-2;
 - Bobot 15 bagi PNS yang memiliki pendidikan S-1;
 - Bobot 10 bagi PNS yang memiliki pendidikan D-3;
 - Bobot 5 bagi PNS yang memiliki pendidikan SLTA, D-1, dan D-2;
 - Bobot 1 bagi PNS yang memiliki pendidikan dibawah SLTA.
- Dimensi Kompetensi (Bobot 40%): Terdiri dari pengembangan kompetensi serta riwayat asesmen atau kesesuaian nilai diklat. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- Dimensi Kinerja (Bobot 30%): Diukur dari predikat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup: Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)
- Dimensi Disiplin (Bobot 5%): Berdasarkan kepatuhan terhadap aturan dan riwayat hukuman disiplin dalam 5 tahun terakhir. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima. Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - Bobot 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Bobot 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - Bobot 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - Bobot 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Kondisi yang dicapai

Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya adalah Ukuran yang menggambarkan kualitas ASN Kemenkes di Lingkungan Eselon I berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Realisasi indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya di Semester I tahun kedua Renstra realisasi sebesar 82,47 dan capaian 100,57% yang menunjukkan tercapainya target yang telah ditentukan. Namun perlu

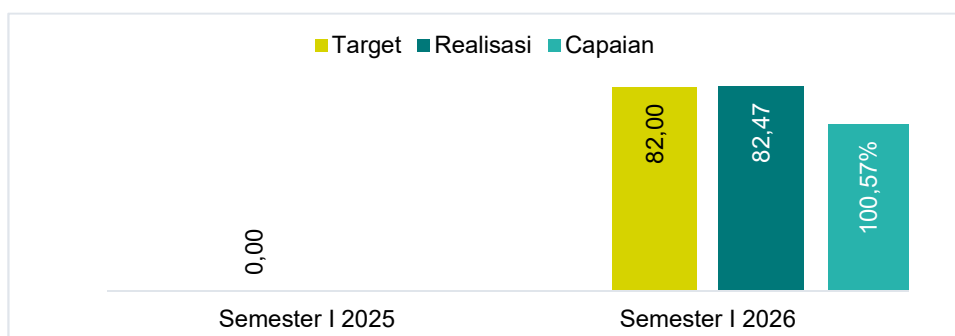
upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan ketercapaian target hingga periode akhir tahun 2026 yakni sebesar 82.

Tabel 29. Target, Realisasi dan Capaian Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester 1	Capaian
Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	82	82,47	100,57%

Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 tahun 2026, mampu mencapai target yang ditentukan. Hasil capaian Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026 sebesar 82,47, didapatkan dari rata-rata IP ASN dari 92 pegawai.

Grafik 15. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026



Pada Semester I Tahun 2025 belum ada Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Semester I Tahun 2026. Hingga saat ini, belum ada standar nasional/internasional yang dijadikan benchmark terkait Indikator Indeks Kualitas SDM.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya mampu mencapai target Indikator Kinerja Semester 1 tahun 2026 dengan nilai 82,47 dan persentase capaian 100,57%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai dimensi bobot pengukuran IP ASN dan mengupayakan peningkatan pada dimensi yang dapat ditingkatkan.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam mencapai Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya adalah kurang aktifnya pegawai melakukan upload sertifikat pelatihan. Hal ini diperparah dengan kurangnya koordinasi untuk pengajuan verifikasi sertifikat pelatihan yang telah diupload kepada tim kepegawaian internal.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya menyelesaikan permasalahan diatas adalah dengan meningkatkan partisipasi dan koordinasi pegawai terkait update pelatihan. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan nota dinas dari Kepala BPAFK Surabaya untuk seluruh ASN melakukan penginputan pada e office dan permintaan verifikasi kepada tim kepegawaian internal.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester 1 Tahun 2026 Indikator Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya mampu mencapai target Indikator Kinerja Semester 1 tahun 2026 dengan nilai 82,47 dan persentase capaian 100,57%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai dimensi bobot pengukuran IP ASN dan mengupayakan peningkatan pada dimensi yang dapat ditingkatkan. Selain itu, dilaksanakan rekomendasi dan tindaklanjut atas permasalahan pada Triwulan I Tahun 2026 berupa sosialisasi update pengembangan kompetensi ASN lebih maksimal serta berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan terkait verifikasi pembaharuan data IP ASN.

2.15 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya

Definisi operasional dari indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

(BPAFK) Surabaya adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPAFK Surabaya dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap. Cara perhitungan indikator ini didapatkan melalui jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPAFK Surabaya pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di BPAFK Surabaya dikali 100.

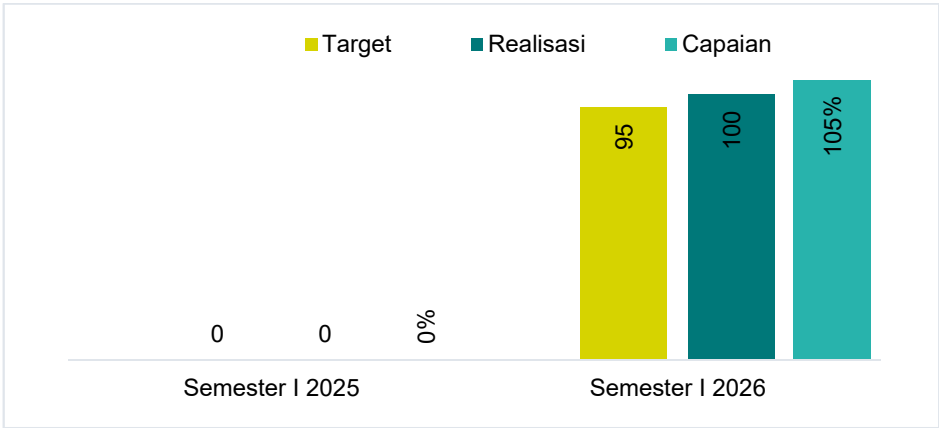
Kondisi yang dicapai

Pada Semester I tahun 2026, realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya sebesar 100% dengan capaian 105,26%. Realisasi indikator di Semester 1 tahun kedua Renstra menunjukkan target telah terpenuhi, selanjutnya perlu upaya untuk tetap mempertahankan ketercapaian target periode akhir tahun 2026 yakni sebesar 95%.

Tabel 30. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester 1	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	95%	100%	105,26%

Grafik 16. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester I Tahun 2026



Analisa upaya pencapaian target indikator

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya dilakukan melalui upaya aktif melakukan koordinasi dan konsultasi ke Tim Kerja Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan terkait temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum selesai agar dapat segera ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya, yaitu belum adanya informasi terkait data hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan pada awal tahun 2026

Upaya pemecahan masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain dengan berkonsultasi dengan pihak unit eselon 1 dan Tim BPK untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan audit BPK pada awal tahun 2026.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Hingga saat ini, belum ada standar nasional/internasional yang dijadikan *benchmark* terkait indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya”.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester 1, Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya telah tercapai 105,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti dengan baik

2.16 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya

Nilai Maturitas Manajemen Risiko di BPAFK Surabaya merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi serta mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan penerapan manajemen risiko yang semakin baik, BPAFK Surabaya berupaya memperkuat tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

Adapun definisi operasional dari indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya adalah Hasil penilaian APIP Kemenkes yang mengacu pada Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T. Adapun indikator ini dihitung dari hasil penilaian maturitas manajemen risiko Unit Kerja pada tahun berjalan dengan kategori:

- a. Aware: 1,01 – 2,00
- b. Define: 2,01 – 3,00
- c. Manage: 3,01 – 4,00
- d. Enable: 4,01 – 5,00

Pada semester I tahun 2026, realisasi indikator kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya belum bisa disajikan karena masih menunggu proses penjaminan kualitas (quality assurance) penilaian maturitas manajemen risiko BPAFK Surabaya periode Juli 2025 - Juni 2026 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sementara untuk hasil yang diperoleh dari penilaian Penilaian Mandiri (PM) maturitas manajemen resiko sebesar 3,10 kategori *risk managed*.

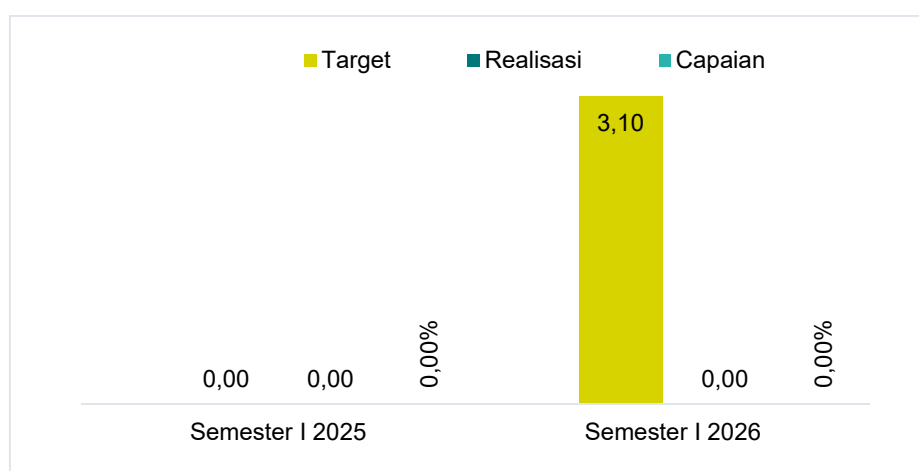
Kondisi yang dicapai

Pada semester I tahun 2026, BPAFK Surabaya telah melakukan Penilaian Mandiri (PM) maturitas manajemen resiko periode Juli 2025 - Juni 2026 dengan hasil nilai yang diperoleh sebesar 3,10 kategori *risk managed*. Tetapi nilai tersebut belum bisa disajikan karena masih menunggu proses penjaminan kualitas (quality assurance) penilaian maturitas manajemen risiko BPAFK Surabaya periode Juli 2025 - Juni 2026 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tabel 31. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi Semester 1	Capaian
Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	3,10	N/A	N/A

Grafik 17. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026



Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya belum tersedia pada Semester 1 Tahun 2025. Sedangkan Pada Semester I Tahun 2026, Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya telah tersedia dan telah dilakukan Penilaian Mandiri (PM) maturitas manajemen resiko, namun belum dilakukan penjaminan kualitas (quality assurance) penilaian maturitas manajemen resiko oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hingga saat ini, belum ada standar nasional/internasional yang dijadikan benchmark terkait Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran.

Analisa upaya pencapaian target indikator

Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026 belum bisa disajikan karena masih menunggu proses penjaminan kualitas (quality assurance) penilaian maturitas manajemen resiko BPAFK Surabaya periode Juli 2025 - Juni 2026 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun BPAFK Surabaya telah melakukan

Penilaian Mandiri (PM) maturitas manajemen resiko periode Juli 2025 - Juni 2026 dengan hasil nilai yang diperoleh sebesar 3,10 kategori *risk managed*.

Dalam proses pencapaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026 terdapat permasalahan antara lain:

Permasalahan

Permasalahan yang dialami adalah :

- a. Belum tersusunnya dokumen manajemen risiko secara lengkap;
- b. Belum terlaksananya pemantauan serta evaluasi risiko secara berkala proses karena penyusunan dokumen manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan monitoring belum sepenuhnya selesai.

Upaya pemecahan masalah

Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja adalah BPAFK Surabaya akan mempercepat penyusunan dan penyempurnaan dokumen manajemen risiko yang selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan proses bisnis organisasi. Selain itu, akan dilakukan penguatan kapasitas tim pengelola manajemen risiko melalui koordinasi dan pendampingan, serta memastikan setiap unit kerja menyusun dan memperbarui profil risiko sesuai tugas dan fungsinya. Setelah dokumen manajemen risiko selesai disusun, BPAFK Surabaya akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan mitigasi risiko, melakukan perbaikan terhadap risiko yang masih tinggi, serta memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai maturitas manajemen risiko pada proses penilaian berikutnya.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester 1 Tahun 2026 Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester 1 Tahun 2026 belum bisa disajikan karena masih menunggu proses

penjaminan kualitas (quality assurance) penilaian maturitas manajemen risiko BPAFK Surabaya periode Juli 2025 - Juni 2026 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun BPAFK Surabaya telah melakukan Penilaian Mandiri (PM) maturitas manajemen resiko periode Juli 2025 - Juni 2026 dengan hasil nilai yang diperoleh sebesar 3,10 kategori *risk managed*. Serta menyiapkan data dukung untuk penjaminan kualitas.

2.17 Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya merupakan satuan kerja UPT Vertikal yang memiliki tugas dan fungsi melayani masyarakat atau pelanggan dalam meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Sarana Pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan oleh BPAFK Surabaya memiliki tarif pelayanan dimana pada akhirnya akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diterima oleh BPAFK Surabaya. BPAFK Surabaya juga melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke Fasyankes terhadap pembayaran yang masih belum terkonfirmasi atau tercatat sebagai piutang.

Dalam rangka memberikan pelayanannya, BPAFK Surabaya menggunakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2024 terjadi penyesuaian terkait nomenklatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

Kondisi yang dicapai

Pengukuran capaian kinerja indikator terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Adapun definisi operasional dari indikator ini adalah jumlah pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam satu tahun anggaran yang didapatkan melalui berbagai layanan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan.

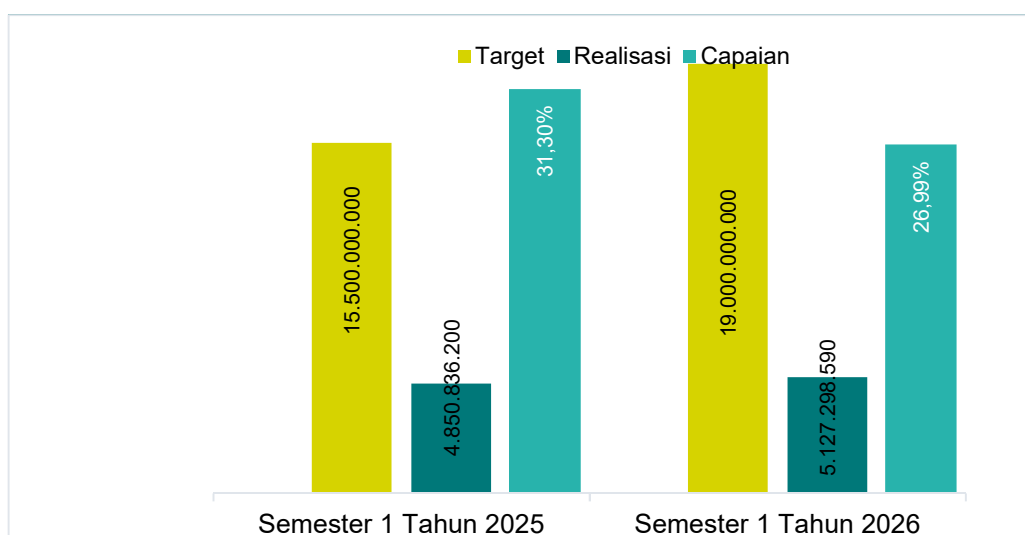
Pendapatan atas layanan BPAFK Surabaya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). BPAFK Surabaya juga melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke Fasyankes terhadap pembayaran yang masih belum terkonfirmasi atau tercatat sebagai piutang. Pada semester 1 tahun 2026 PNBP yang diterima BPAFK Surabaya sebesar Rp. 5.127.298.590,- atau sebesar 26,99% dari target sebesar Rp.19.000.000.000,-.

Perbandingan capaian penerimaan negara bukan pajak BPAFK Surabaya semester 1 Tahun 2026 dibandingkan dengan target Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Target, realisasi dan capaian indikator Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester 1 Tahun 2026

Indikator Kinerja	Tahun 2026		
	Target	Realisasi Semester 1	Capaian
Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	19.000.000.000	5.127.298.590	26,99%

Grafik 18. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Pada Hasil Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester I Tahun 2025 memperoleh hasil Rp 4.850.836.200,- dengan capaian 31,30%, sedangkan pada Semester I Tahun 2026 memperoleh hasil Rp 5.127.298.590,- dengan capaian 26,99%. Pada Semester I Tahun 2026, Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPAFK Surabaya belum mampu mencapai target yang ditentukan dan akan tercapai di Semester II Tahun 2026. Hingga saat ini, belum ada standar nasional/internasional yang dijadikan *benchmark* terkait Indikator kinerja Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Analisa Upaya Pencapaian Target Indikator

Tercapainya target indikator terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel menunjukkan bahwa tujuan untuk mengelola penerimaan PNBP atas layanan yang dilaksanakan telah berhasil dicapai. Strategi yang dilakukan BPAFK Surabaya dalam mencapai target indikator terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel adalah dengan aktif melakukan komunikasi dan koordinasi terkait penagihan

atas layanan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi mitra dan pelanggan setia. Hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah mengoptimalkan fungsi Unit Administrasi dalam menyampaikan informasi tagihan kepada pelanggan baik melalui media surat dan Whatsapp. Selain itu sistem pembayaran dimudahkan dengan penerbitan billing Simponi, sehingga Pelanggan dapat dengan mudah melakukan pembayaran. Hal itu ditunjang dengan monitoring terhadap transaksi yang belum terbayarkan dan mengkoordinasikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai debitur, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Capaian Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mampu mencapai target Renstra Semester 1 tahun 2026 sebesar Rp 5.127.298.590 dan persentase capaian 26,99%.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu :

1. Surat tagihan sudah dikirimkan, tetapi pelanggan masih terkendala proses kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran
2. Proses penyelesaian pembayaran membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tercapainya indikator ini selalu di triwulan 4
3. Adanya instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran sehingga pelanggan dari RS pemerintah dan Dinas Kesehatan yang biasanya sudah dilayani ternyata masih menunggu persetujuan pelaksanaan sehingga masih sedikit yang terlayani dan melakukan pembayaran.

Upaya pemecahan masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah melakukan penagihan atas layanan yang telah diterima oleh pelanggan dengan cara mengirimkan dokumen penagihan melalui surat, email dan pesan *whatsapp*, melakukan MoU dan kontrak dengan pelanggan yang sudah menyetujui penawaran sebagai dasar penagihan, melakukan koordinasi secara langsung dengan pelanggan untuk percepatan proses penyelesaian pembayaran.

Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Atau Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada indikator Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak tersedia standar nasional untuk dijadikan pembandingan (*benchmarking*) pada realisasi kinerja tahun 2026.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan Semester 1 tahun 2026, Indikator Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 5.127.298.590 dari target Rp. 19.000.000.000 dengan tingkat pencapaian sebesar 26,99%. Capaian ini menunjukkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mencapai target. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pihak pelanggan untuk percepatan pembayaran.

b. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rerata capaian Indikator Sasaran Kinerja Semester I Tahun 2026 adalah 77,53%. Rerata capaian Indikator tersebut didapat dari perhitungan rerata tertimbang antara 17 Indikator Sasaran Kinerja yang terdiri dari:

Tabel 33. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	ANALISA EFISIENSI
1	Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi pasca sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	94,74%	16,35%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 16,35% melalui upaya optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan inspeksi pasca sertifikasi CDB dilakukan oleh dua tim pada provinsi Jawa Timur dan Bali.
2	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	96,00%	13,43%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 13,43% melalui upaya melaksanakan perluasan jaringan kerjasama dengan Produsen/Distributor untuk 4 alkes yang dilakukan uji produk post market.
3	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	93,70%	0%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 0% melalui upaya : melakukan koordinasi dengan fasyankes untuk pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi/inspeksi sarana prasarana dan alat kesehatan dan melakukan penjadwalan di RSV Surabaya untuk kalibrasi di hari Sabtu-Minggu dan pembuatan SK BKO pegawai di ISPK
4	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	40,00%	N/A	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 0% melalui upaya : melakukan koordinasi intensif dengan pelanggan untuk mendapatkan update estimasi kedatangan alat, melakukan pendampingan dan diskusi dengan pelanggan untuk menjelaskan poin koreksi dan menyusun checklist sederhana sebagai panduan, menyediakan alternatif koneksi internet atau mencari alternatif koneksi internet diluar ruang uji produk serta melakukan backup data secara offline
5	Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	47,92%	13,64%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 13,64% melalui upaya melakukan upaya optimalisasi pelayanan pengujian/kalibrasi/inspeksi pada TW II
6	Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK n	61,11%	N/A	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 0% melalui upaya melaksanakan penjadwalan pembahasan MK minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan pembahasan MK
7	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	102,70%	N/A	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 0% melalui upaya melaksanakan perluasan jaringan kerjasama dengan Fasyankes untuk alat kesehatan yang canggih (LINAC)

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	ANALISA EFISIENSI
8	Penambahan kemampuan jenis pelayanan	115,38%	5,22%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 3,70% melalui upaya melaksanakan penyediaan alat standar sesuai dengan rencana pengembangan kemampuan layanan
9	Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	64,26%	41,54%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 40,50% melalui upaya melaksanakan koordinasi internal (dengan Timja Pelayanan) dan melakukan upgrade modul peminjaman alat standar untuk dinas luar di aplikasi SIMLPK
10	Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	92,98%	N/A	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 0% melalui upaya melakukan pemetaan kembali mitra lama dan baru yang memiliki potensi untuk bisa bekerjasama kembali.
11	Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	109,04%	16,80%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 16,70% melalui upaya melengkapi data dukung KKE SAKIP dalam rangka penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SAKIP Tahun 2025
12	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	102,10%	48,22%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 48,22% melalui upaya melakukan evaluasi terhadap unsur layanan pada survey kepuasan masyarakat, sehingga pertanyaan yang diajukan kepada pelanggan lebih dipahami
13	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	65,30%	46,23%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 46,24% melalui upaya melaksanakan revisi hal 3 DIPA dan melaksanakan kegiatan Layanan BMN untuk meningkatkan nilai perencanaan anggaran
14	Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	100,57%	17,14%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 17,14% melalui upaya membuat nota dinas Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Triwulan II Tahun 2026 untuk seluruh ASN melakukan penginputan pada e office dan permintaan verifikasi kepada tim kepegawaian
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	105,26%	10,36%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 9,65% melalui upaya berkonsultasi ke eselon 1 untuk hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025
16	Nilai Maturitas Manajemen Risiko	N/A	5,64%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 5,64% melalui

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	ANALISA EFISIENSI
	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya			upaya pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi untuk periode semester 2 TA 2025 s.d semester1 TA 2026
17	Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	26,99%	0,00%	Realisasi indikator kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 0% melalui upaya melakukan komunikasi dengan pihak pelanggan untuk percepatan pembayaran
RERATA CAPAIAN		77,53%	13,80%	

Terwujudnya efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, karena capaian kinerja sebesar 77,53% dapat dicapai dengan 13,80% penyerapan anggaran, sehingga jumlah efisiensi didapatkan sebesar 63,73% Upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja pada Semester 1 Tahun 2026 adalah memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dalam pencapaian output kegiatan. Penjelasan narasi *benchmark* standar nasional/internasional ada atau tidaknya disampaikan pada pembahasan masing-masing indikator.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 33.718.747.000,- dengan realisasi anggaran per 30 Juni 2026 tercatat sebesar Rp. 10.649.737.206,- atau sebesar 31,58%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran berdasarkan Rincian Output BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2026

PROGRAM - KEGIATAN - RINCIAN OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Sistem Ketahanan Kesehatan		8,929,846,000	1,223,770,926	12.59%
Penyelenggaraan Pengamanan Alat Kesehatan, PKRT dan Fasilitas Kesehatan		8,929,846,000	1,223,770,926	12.59%
•	Sarana distribusi alat kesehatan NON-PIE (Pemilik Izin Edar) di inspeksi Paska Sertifikasi CDAKB	79,884,000	13,063,466	16.35%
•	Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi	683,710,000	11,622,206	1.69%
•	Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU	1,052,548,000	143,609,950	13.64%
•	Alat Kalibrasi	5,230,749,000	273,203,190	3.70%
•	Pengujian Kalibrasi Alat	1,882,955,000	782,272,114	40.50%
Program Dukungan Manajemen		24,788,901,000	9,530,856,541	38.42%
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan		24,788,901,000	9,530,856,541	38.42%
•	Layanan Umum	5,129,365,000	663,781,601	12.79%
•	Layanan Sarana Internal	1,245,866,000	718,525,001	57.67%
•	Layanan Perkantoran	17,443,966,000	7,961,722,739	45.65%
•	Layanan BMN	1,558,000	-	0%
•	Layanan BMN Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT)	8,000,000	8,000,000	100.00 %
•	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	960,146,000	178,827,200	18.63%
TOTAL		33,718,747,000	10,754,627,467	31.58%

Tabel 35. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2026

NO	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
A	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	8,929,846,000	1,223,770,926	13.70%
I	Indikator Sasaran Kegiatan (ISK)	8,929,846,000	1,223,770,926	13.70%
1	Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	79,884,000	13,063,466	16.35%
2	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	86,571,000	11,622,206	13.43%
3	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	597,139,000	0	0.00%
4	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	-	-	-
5	Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/ inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	1,052,548,000	143,609,950	13.64%
6	Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK	-	-	-
7	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	-	-	-
8	Penambahan kemampuan jenis pelayanan	5,230,749,000	273,203,190	5.22%
9	Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	1,882,955,000	782,272,114	41.54%
10	Jumlah perjanjian kerjasama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	-	-	-

NO	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
B	Program Dukungan Manajemen	24,788,901,000	9,530,856,541	38.45%
I	Indikator Sasaran Kegiatan (ISK)	24,788,901,000	9,530,856,541	38.45%
1	Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	4,199,260,000	705,360,914	16.80%
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	747,305,000	360,328,200	48.22%
3	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	17,766,685,000	8,212,723,740	46.23%
4	Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	1,068,986,000	183,247,200	17.14%
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	494,275,000	51,369,470	10.39%
6	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	315,852,000	17,827,017	5.64%
7	Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	196,538,000	0	0.00%
JUMLAH		33,718,747,000	10,754,627,467	31.90%

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, di mana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata,

memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif.

Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut maka mencabut peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 merupakan transformasi dalam pengelolaan ASN dan peningkatan kesejahteraan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan memajukan setiap individu. UU ini bukan hanya perubahan hukum, tetapi juga sumber inspirasi bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap hari bekerja keras demi kemajuan bangsa. Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Berikut adalah tujuh agenda transformasi utama yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024:

1. Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN

Rekrutmen ASN tidak perlu menunggu satu tahun sehingga birokrasi lebih *responsive*. Ketika ada kekosongan posisi, instansi bisa merekrut ASN saat itu juga agar pelayanan pemerintah tetap berjalan. Dalam hal penataan jabatan ASN, dilakukan penyederhanaan dan pengelompokan sehingga lebih lincah mengikuti dinamika organisasi.

2. Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional

Kemudahan ini didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Mobilitas talenta akan berorientasi “Indonesia Sentris” sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T, akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

3. Percepatan Pengembangan Kompetensi

Pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal, seperti penataran, tetapi mengutamakan *experiential learning*, seperti magang, *on the job training*, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional berkelas dunia.

4. Penataan Tenaga Non-ASN

Penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan 4 prinsip yaitu:

- a) Tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN;
 - b) Tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN;
 - c) Tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan;
 - d) Tetap memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN
- Mendorong agar kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik semakin baik. Kesejahteraan ASN sangat dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan. ASN yang tidak berkinerja dapat diberhentikan.
6. Digitalisasi Manajemen ASN
- Digitalisasi manajemen ASN akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya dan kompetensi digital para ASN agar senantiasa berkembang secara baik dan optimal. Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan sistem merit yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah.
7. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi
- Nilai dasar disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam berAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

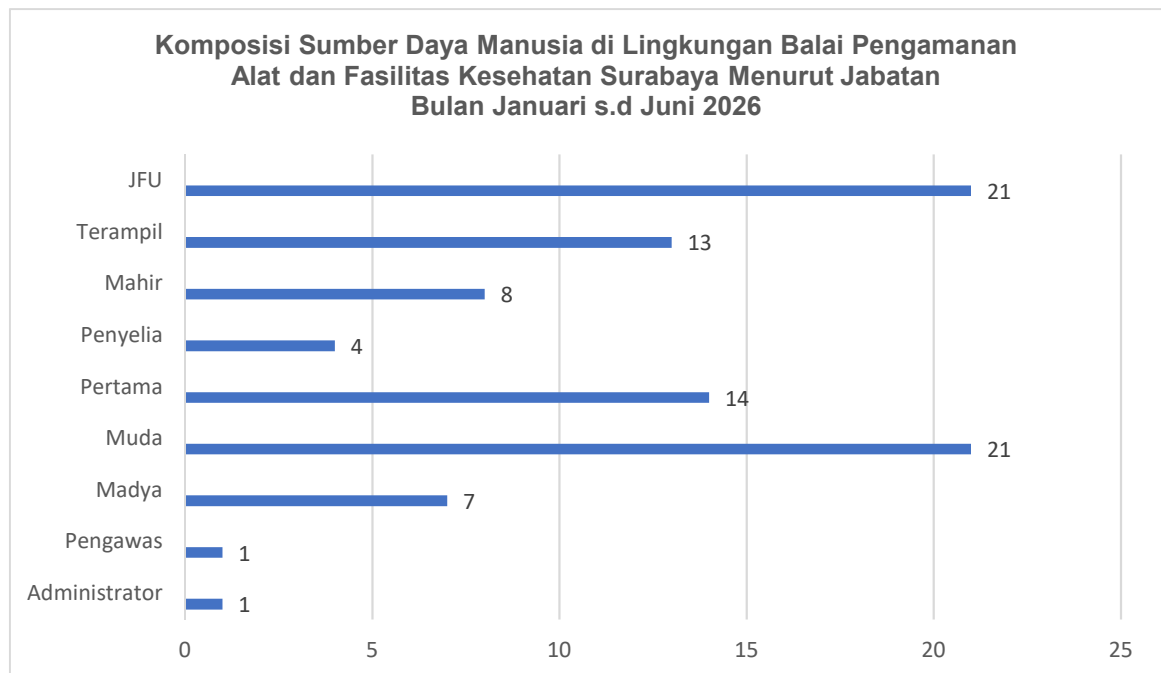
Keadaan pegawai di lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sampai dengan Semester I Tahun 2026 berjumlah 90 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Jumlah ASN di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jabatan

Jabatan		Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi	Madya	0
	Pratama	0
Jabatan Administrasi	Administrator	1
	Pengawas	1
	Pelaksana	0
Jabatan Fungsional	Ahli Madya	7
	Ahli Muda	21
	Ahli Pertama	14
	Penyelia	4
	Mahir	8

Jabatan		Jumlah
	Terampil	13
Jabatan Fungsional Umum		21
Jumlah		90

Grafik 19. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jabatan



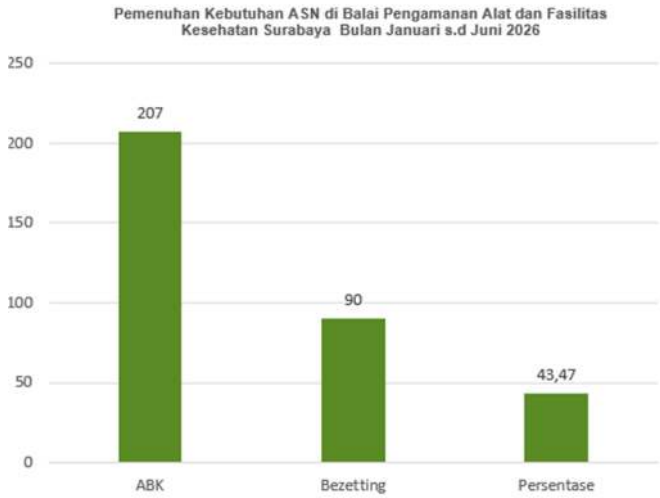
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. Penataan ASN adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi.

Peta jabatan menggambarkan personel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang didasarkan pada analisa beban kerja. Tingkat pemenuhan peta jabatan oleh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 37. Pemenuhan Kebutuhan ASN di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Peta Jabatan

Unit Kerja	Kebutuhan (berdasarkan ABK)	Bezetting (Keadaan Pegawai)	Persentase
Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	207	90	43,47%

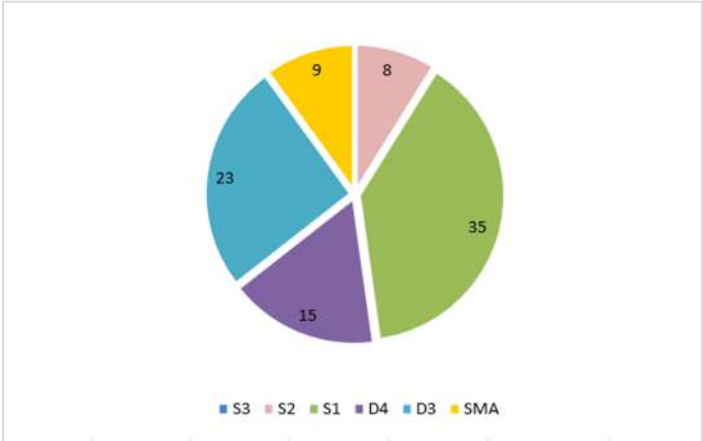
Grafik 20. Pemenuhan Kebutuhan ASN di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jabatan

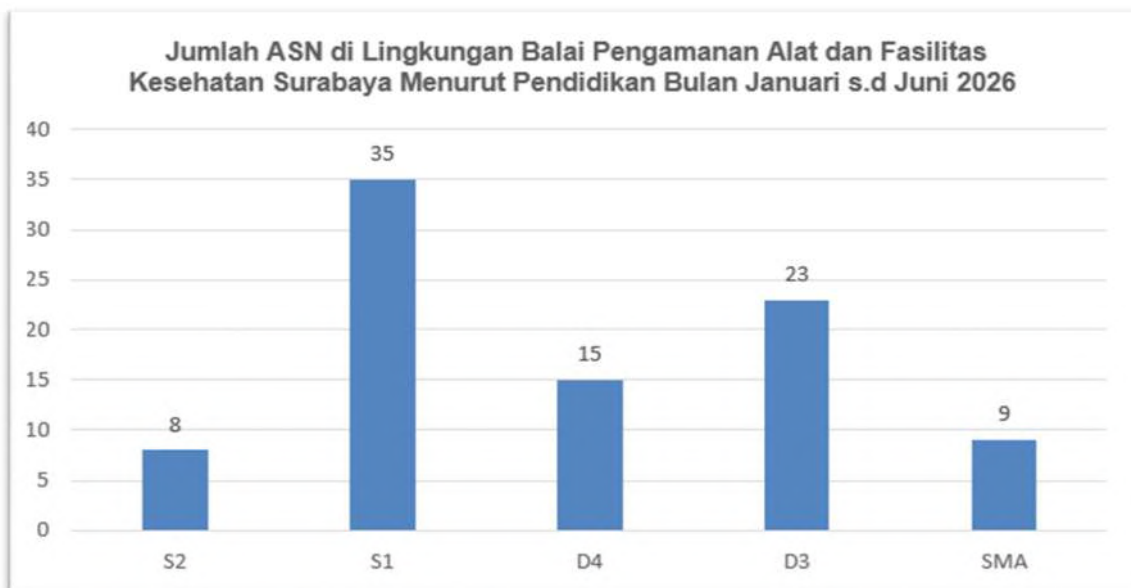


Tabel 38. Jumlah ASN di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	0
S2	8
S1	35
D4	15
D3	23
SMA	9
JUMLAH	90

Grafik 21. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Pendidikan

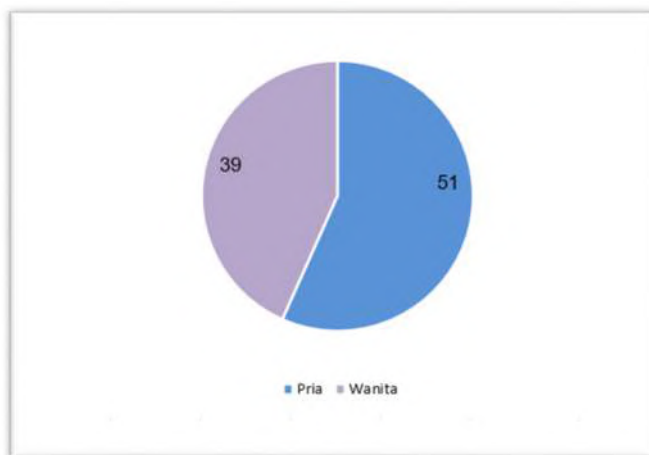




Tabel 39. Jumlah ASN di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Pria	51
Wanita	39
JUMLAH	90

Grafik 22. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Semester I Tahun 2026 Menurut Jenis Kelamin



D. BUDAYA KERJA

Pada Semester I Tahun 2026 BPAFK Surabaya mengimplementasikan perubahan budaya kerja untuk dijalankan oleh karyawan guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi antara lain :

1. Pengendalian BMN Mobile untuk Alat Standar di BPAFK Surabaya Membangun Budaya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan BMN

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi, BPAFK Surabaya melakukan transformasi budaya kerja melalui penerapan Modul Pengendalian BMN Mobile untuk Alat Standar. Pengembangan modul ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi digital, tetapi juga menjadi instrumen perubahan perilaku kerja seluruh petugas teknis yang melaksanakan layanan kalibrasi di luar kantor.

Sebelumnya, pencatatan peminjaman dan pengembalian alat standar yang digunakan dalam kegiatan dinas luar masih bergantung pada proses administratif yang dapat menimbulkan keterlambatan pencatatan, ketidaksesuaian data, maupun kesulitan dalam melakukan monitoring keberadaan alat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap pengelolaan aset negara, terutama terkait status penggunaan, lokasi, dan tanggung jawab pemegang alat.

Melalui implementasi Modul Pengendalian BMN Mobile, setiap petugas yang akan melaksanakan layanan kalibrasi di lokasi pelanggan wajib terlebih dahulu melakukan registrasi peminjaman alat standar yang akan digunakan. Sistem ini mengintegrasikan proses pengelolaan aset dengan proses bisnis layanan sehingga petugas hanya dapat membuat dan menyelesaikan laporan kalibrasi apabila peminjaman alat telah tercatat secara resmi dalam sistem. Dengan mekanisme ini, setiap penggunaan alat memiliki jejak digital yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, setelah kegiatan dinas luar selesai dilaksanakan, petugas wajib melakukan pelaporan pengembalian alat standar melalui aplikasi. Kewajiban ini bertujuan memastikan bahwa seluruh alat yang digunakan telah kembali ke unit pengelola dalam kondisi yang sesuai serta dapat segera dipersiapkan untuk kegiatan layanan berikutnya. Sebagai bentuk penguatan disiplin dan akuntabilitas, sistem akan melakukan hold akun petugas apabila terdapat alat yang belum dilaporkan pengembaliannya. Kebijakan ini bukan merupakan bentuk sanksi semata, melainkan upaya membangun kesadaran bahwa setiap aset negara yang digunakan harus dikelola secara bertanggung jawab dari awal hingga akhir proses pemanfaatannya.

Transformasi ini diharapkan mampu membentuk budaya kerja baru yang berlandaskan pada nilai-nilai:

- Akuntabilitas, melalui pertanggungjawaban penggunaan alat secara individu dan terdokumentasi.
- Disiplin, melalui kepatuhan terhadap prosedur peminjaman dan pengembalian alat.
- Transparansi, melalui ketersediaan data penggunaan aset secara real-time.
- Profesionalisme, melalui integrasi antara proses layanan teknis dan pengelolaan BMN.
- Integritas, melalui kesadaran bahwa setiap aset negara harus dijaga dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dengan penerapan Modul Pengendalian BMN Mobile, BPAFK Surabaya tidak hanya melakukan digitalisasi proses administrasi BMN, tetapi juga mendorong lahirnya budaya kerja yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tata kelola aset negara yang unggul. Perubahan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pelayanan kalibrasi yang berkualitas sekaligus memastikan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.

Gambar 13. Form Peminjaman Alat Standar

Form Peminjaman Alat Standar

Tanggal Permintaan Alat: 19 Januari 2026

Catatan:

Nomor Order (dari yastek): E-010 KAK

Penanggung Jawab: Faridhon Damsang Prakoso, S.Tr.Kes

Rincian Order dari Yastek

No	Nomor Order	Fasilitas	Alamat Kota/Kab Provinsi	Tanggal Pelaksanaan	Ketua Tim	Anggota Tim
1	E-010 KAK	PT. Senyum Sehat Sejahtera	Jl. Kapuas No. 12 Surabaya Jawa Timur	20-20 Januari 2026	Faridhon Damsang Prakoso, S.Tr...	I. Wahyu Dwi Permatama

Daftar Alat yang akan digunakan:

Ketikkan Nama/Model/Model/Serial/Barcode Alat

Sort By Nama A - Z

No	Nama Alat	Identitas Alat	Tanggal diambil	Keterangan
1	Vital Sign Simulator	Merck : Fluke , Tipe : Prosim K, Serial : 2845020 , Barcode : KAKB45020	20 Januari 2026	Keterangan alat di...
2	Lux Meter / Alat pengukur pencahayaan / Light meter	Merck : SEKONIC, Tipe : C-7000, Serial : 100383, Barcode : KAK0383	20 Januari 2026	Keterangan alat di...
3	Digital Tachometer	Merck : ONOSOKI, Tipe : HR-6800, Serial : 190201821R, Barcode :	20 Januari 2026	Keterangan alat di...
4	Pressure Data Logger	Merck : Madgtech, Tipe : PRTemp 140, Serial : Q 53919, Barcode : KAK53919	20 Januari 2026	Keterangan alat di...
5	Gas Flow Analyzer	Merck : Rigol Medical , Tipe : VerTest 800, Serial : BA200010, Barcode :	20 Januari 2026	Keterangan alat di...
6	Thermohygrometer	Merck : Madgtech, Tipe : PRTemp2000, Serial : Q02020, Barcode : KAK02020	20 Januari 2026	Keterangan alat di...
7	Electrical Safety Analyzer	Merck : Datrend, Tipe : DATREND vPad, Serial : VPR16110184, Barcode : 10000010	20 Januari 2026	Keterangan alat di...
8	Pressure Calibrator	Merck : Ametek, Tipe : 30 Series, Serial : 2360-115774, Barcode :	20 Januari 2026	Keterangan alat di...

Tanda tangan di atas

Simpan

Copyright © 2026. All rights reserved. e-Sign powered by:

Gambar 14. Berita Acara Peminjaman Alat Standar

BERITA ACARA PEMINJAMAN ALAT

Tanggal Permintaan : 19 Januari 2026

Penanggung Jawab : Faridhon Damsang Prakoso, S.Tr.Kes

Keperluan : Layanan

Nomor Order Layanan

No	Nomor Order	Fasilitas	Tanggal Pelaksanaan	Ketua Tim	Anggota
1	E-010 KAK	PT. Senyum Sehat Sejahtera	20-20 Januari 2026	Faridhon Damsang Prakoso, S.Tr.Kes	• Wahyu Dwi Permatama

Daftar alat yang dipinjam

No	Nama Alat	Identitas	Keterangan
1	Digital Tachometer	Merck : ONOSOKI, HR-6800, 190201821R,	
2	Electrical Safety Analyzer	Merck : Datrend, DATREND vPad, VPR16110184,	
3	Gas Flow Analyzer	Merck : Rigol Medical , VerTest 800, BA200010,	
4	Lux Meter / Alat pengukur pencahayaan / Light meter	Merck : SEKONIC, C-7000, 100383,	
5	Pressure Data Logger	Merck : Madgtech, PRTemp 140, Q 53919,	
6	Pressure Calibrator	Merck : Ametek, 30 Series, 2360-115774,	
7	Thermohygrometer	Merck : Madgtech, PRTemp2000, Q02020,	
8	Vital Sign Simulator	Merck : Fluke , Prosim K, 2845020 ,	

Catatan:

Penanggung Jawab

Tim Alat

Faridhon Damsang Prakoso, S.Tr.Kes
20 Januari 2026

Mohammad Andi Yusuf
20 Januari 2026

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Semester I Tahun 2026 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis BPAFK Surabaya tahun 2026 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja.

Secara umum capaian sasaran strategis telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026 dengan penuh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara. Capaian kinerja BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2026 dapat dinyatakan “belum optimal”, karena realisasi 11 dari 17 Target Indikator Kinerja belum tercapai 100% atau di atasnya, dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 120% sebanyak 0 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100%-120% sebanyak 6 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 11 target;

Pelaksanaan kegiatan di atas menyebabkan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 BPAFK Surabaya sebesar Rp.10.754.627.467,- atau 31,90% dari total pagu anggaran sebesar Rp.33.718.747.000,-.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya 11 (sebelas) indikator kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada semester II mendatang dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat. Upaya yang akan dilakukan di semester 2 terutama untuk indikator yang belum tercapai antara lain:

- a. Melakukan komunikasi dengan pihak pelanggan dari RS Pemerintah yang sudah diberikan penawaran tetapi masih menunggu persetujuan;
- b. melakukan komunikasi aktif dengan pelanggan dari RS Pemerintah dan Dinas Kesehatan untuk tetap bermitra dengan BPAFK Surabaya sesudah relaksasi anggaran disetujui;
- c. melakukan inovasi layanan menawarkan kerjasama pengampunan Unit Kalibrasi Rumah Sakit (UKRS) dengan RS Pemerintah tipe B pendidikan;
- d. melakukan sounding terkait proses pengadaan jasa pengujian kalibrasi dapat dilakukan tidak hanya melalui mekanisme E-Katalog tetapi juga bisa dengan mekanisme Swakelola Tipe 2;

- e. Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan sesuai sisa anggaran efektif dan memastikan penyelesaian pembayaran di TW 3.

Pada tahun 2026 BPAFK Surabaya tetap melaksanakan indikator kinerja yang masih relevan namun akan melakukan penyesuaian indikator kinerja terhadap Rancangan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan kemudian dan sesuai *grand design* yang akan ditugaskan kepada BPAFK Surabaya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN
(BPAFK) SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyudi Ifani
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK)
Surabaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : L. Rizka Andalusia
Jabatan : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan,

L. Rizka Andalusia

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengamanan Alat dan
Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya,

Wahyudi Ifani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN
(BPAFK) SURABAYA

No.	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran	Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat	95
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		
	Terwujudnya peningkatan kepuasan <i>stakeholder</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	15.500.000.000,-
	Terwujudnya cakupan kalibrasi	Jumlah fasyankes yang terlayani	1200
	Terwujudnya mitra layanan	Jumlah penambahan MoU pengujian kalibrasi fasilitas kesehatan	5
	Terpenuhinya standar nasional	1. Jumlah penambahan lingkup akreditasi alat yang terakreditasi	4
		2. Jumlah penambahan kemampuan jenis layanan	3
	Terwujudnya kerjasama di bidang PFK	Jumlah mitra fasyankes	32
	Terwujudnya fasyankes yang aman dan bermutu	Jumlah fasyankes yang teredukasi	40
	Terwujudnya laboratorium yang berkualitas dengan standar nasional	1. Penambahan pemutakhiran dokumen mutu	3
		2. Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	63
	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	1. Rasio SDM berkinerja produktif	105
		2. Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	90
	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	Jumlah penambahan modul pelaporan pengujian/kalibrasi dengan sistem IT	7

Halaman 1 dari 3

No.	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	1. Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	100
		2. Jumlah alat kesehatan yang diuji produk <i>post market</i>	10
		3. Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	56.650
		4. Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	30
		5. Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	9
II Program Dukungan Manajemen			
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai kinerja anggaran	80,1	
	Persentase realisasi anggaran	96	
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan			
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran BPAFK Surabaya	80,1	
	Persentase Realisasi Anggaran	96	

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 13.602.120.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 21.575.089.000
Total Anggaran DIPA Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	Rp. 35.177.209.000

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan,



L. Rizka Andalusia

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengamanan Alat dan
Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya,



Wahyudi Ifani

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon II : Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya
Tahun Anggaran : 2025

No.	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	RO	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			
1.	Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Alat Kalibrasi (RF-15)	42 Unit
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Alat Kalibrasi (RF-15)	42 Paket
			Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	1 Paket
3.	Terwujudnya cakupan Kalibrasi	Jumlah fasyankes yang terlayani	Alat Kalibrasi (RF-15)	42 Paket
			Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF-15)	420 Unit
4.	Terwujudnya mitra layanan	Jumlah penambahan MoU pengujian kalibrasi fasilitas kesehatan	Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF-15)	420 Unit
5.	Terpenuhinya standar nasional	1. Jumlah penambahan lingkup akreditasi alat yang terakreditasi	Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	1 Paket
		2. Jumlah penambahan	Alat Kalibrasi (RF-15)	42 Paket

Halaman 1 dari 4

No.	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	RO	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kemampuan jenis layanan		
6.	Terwujudnya kerja sama di bidang PFK	Jumlah mitra fasyankes	Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF)	420 Unit
7.	Terwujudnya fasyankes yang aman dan bermutu	Jumlah fasyankes yang teredukasi	Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF-15)	420 Unit
8.	Terwujudnya laboratorium yang berkualitas dengan standar nasional	1. Penambahan pemutakhiran dokumen mutu	Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	1 Paket
		2. Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	Pengujian Kalibrasi Alat (RF-15)	357 Unit
9.	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	1. Rasio SDM berkinerja produktif	Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	1 Paket
		2. Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF-15)	420 Unit
10.	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	Jumlah penambahan modul pelaporan pengujian/kalibrasi dengan sistem IT	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit
11.	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	1. Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	Alat Kalibrasi (RF-15)	42 Paket

Halaman 2 dari 4

No.	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	RO	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	1 Paket
		2. Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF-15)	420 Unit
		3. Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	Layanan Pengujian Kalibrasi Dan Proteksi Radiasi (RF-15)	420 Unit
		4. Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	Sarana distribusi alat kesehatan NON-PIE (Pemilik Izin Edar) di inspeksi Paska Sertifikasi CDAKB (RF-15)	14 Lembaga
		5. Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	1 Paket
B.	Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran BPAFK Surabaya	Layanan BMN	1 Layanan
		Persentase realisasi anggaran	Layanan Umum	1 Layanan
			Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	RO	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Layanan Sarana Internal	106 Unit
			Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1 Layanan

*) Target bersifat akumulatif

Jakarta, Januari 2025
Kepala Balai Pengamanan Alat
dan Fasilitas Kesehatan Surabaya


Wahyudi Ifani

LAMPIRAN 2. LINK DATA DUKUNG PER IKU

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7FnQeEIY1ujaM7mZUFovocFIJqDkE_h/edit?gid=250147011#gid=250147011

Indikator Kinerja	Link Lampiran
1. Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	https://drive.google.com/drive/folders/1bYfomd9G9tK3E6N9q2-Tb-rODWpn1i1z?usp=drive_link
2. Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	https://drive.google.com/drive/folders/1U-zAue-SjfVmYFbXI3Sp1W90i6RtMbwr?usp=drive_link
3. Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	https://drive.google.com/drive/folders/1cu3AxukYwQWY ZuMzyyz5cLgfiVYM21Fq?usp=drive_link
4. Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	https://drive.google.com/drive/folders/1Y0RybyeeGfStNuYdvaa ifhN3IDzT0GE?usp=drive_link
5. Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	https://drive.google.com/drive/folders/1gYdd2Hvh_voFcr uvWykFWNIGm-Ca6jli?usp=drive_link
6. Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK	https://drive.google.com/drive/folders/14El0hp3SEEG8G05DJTUAhuAKNU3Y1Jj8?usp=drive_link
7. Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	https://drive.google.com/drive/folders/1gcpQAeYvt25DM1eVYXsU1LeES6RPxe1K?usp=drive_link
8. Penambahan kemampuan jenis pelayanan	https://drive.google.com/drive/folders/1z9EQZ2IzSVgq6NEl kwZSdVJyOvYyOiD?usp=drive_link
9. Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	https://drive.google.com/drive/folders/121Nn6lw0x0IBbE2RSWNdGHWr3qGx79w?usp=drive_link
10. Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	https://drive.google.com/drive/folders/1KoNXZdKOcVjYBf WAF8gD1X5pVD7OPFSF?usp=drive_link
11. Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	https://drive.google.com/drive/folders/1zouR36vw325zk1 ifYT5sQqriGkEkRIB?usp=drive_link
12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	https://drive.google.com/drive/folders/1vttxFxUh-vO-l9EKVr59xcoSyltYdFPH?usp=drive_link
13. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	https://drive.google.com/drive/folders/1VKzMrdHJV_M0 dNdnTpqfkroUBOp0o2M?usp=drive_link
14. Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	https://drive.google.com/drive/folders/1K06_k5ajgSNENSx3f9Ttx4BhD0tN1qAp?usp=drive_link

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	https://drive.google.com/drive/folders/1Ot1bnvNBoBwdSims9LeXIEsUKduXBseR?usp=drive_link
16. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	https://drive.google.com/drive/folders/1QNHrtF4ngqDyE8E606jW_YO-hcv-KrjP?usp=drive_link
17. Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	https://drive.google.com/drive/folders/1dj3map3bD6J2l0Qdl8nwZVAVJ8WwWbIl?usp=drive_link

LAMPIRAN 3. SK TIM LAKIP



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Farmasi dan Alat Kesehatan
Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan
Surabaya
Jalan Karangmenjangan Nomor 22, Airlangga, Gubeng
Surabaya 60286
(031) 5035830
<https://www.bpafk-sby.org>

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

NOMOR HK.02.03/E.X/19/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN

SURABAYA

TENTANG TIM LAKIP BPAFK SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya, dalam menjamin penyajian laporan akuntabilitas yang baik dan bermutu, perlu untuk ditunjuk TIM LAKIP BPAFK Surabaya,
 2. Bahwa nama yang tersebut pada dictum pertama keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai TIM LAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya tahun anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.
- Memperhatikan** :
- DIPA BPAFK Surabaya Nomor : SP DIPA-024.07.2.690805/2026 tanggal 1 Desember 2025

-2-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menyusun keanggotaan TIM LAKIP BPAFK Tahun 2026 selengkapny menjadi sebagai berikut :
- Ketua : Ka.Sub.Administrasi Umum (ADUM)
Sekretaris I : Anni Suprasanti, SE
Sekretaris II : Pita Afrika Yuniarsih
Anggota :
1. Friekha Noer Kannia's, SE
 2. Rana Cendrawasih, ST
 3. Yogi Dwi Achmadi, S.Kom
 4. Nina Shanti Istiqomah, SST
 5. Rina Khusnawati, SE
 6. Eka Denie Hartawan Agus Rahayu
 7. Lailia Nurfitriani, S.IP
- Kedua** :
- a. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 - b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Pt. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya,



Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
NIP 197201301992031002

LAMPIRAN 4. ANALISA SMART IKU SEMESTER 1 TAHUN 2026

Analisis SMART Matriks IKU (Indikator Kerja Utama) BPAFK Surabaya Semester I Tahun 2026

No. IKU	IKU	Uraian Deskriptive*				
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>
1	Jumlah sarana distribusi alat kesehatan non - PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan	Jumlah sarana distribusi alkes non PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan di wilayah kerja	Jumlah sarana distribusi alkes non PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDB untuk alat kesehatan di wilayah kerja dihitung secara kumulatif	Jumlah sarana distribusi alkes non PIE	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
2	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk <i>post market</i>	Jumlah alat kesehatan yang telah memiliki izin edar yang telah diuji berdasarkan uji parameter <i>post market</i>	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk <i>post market</i> yang dihitung secara kumulatif	Jumlah alat kesehatan	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
3	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilayani pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi alat kesehatan oleh UPT PAFK	Jumlah RS dan Puskesmas yang dilakukan pengujian, kalibrasi dan/atau inspeksi alat kesehatan, dihitung berdasarkan capaian tahun berjalan	Jumlah RS dan Puskesmas	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengawasan dan evaluasi fasilitas kesehatan dan Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
4	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK/LPAFK	Jumlah prototipe produk alat kesehatan yang dilakukan pengujian sesuai standar dalam rangka pre market (proses izin edar baru/perpanjangan) atau penelitian/pengembangan produk pada tahun berjalan	Jumlah prototipe produk alat kesehatan yang diuji, dihitung pada tahun berjalan	Jumlah prototipe produk alkes	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
5	Jumlah alat kesehatan dan sapras yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi oleh BPAFK/LPAFK	Jumlah alat kesehatan dan sapras (alat ukur standar, TLD, Instalasi) yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi pada tahun berjalan	Jumlah alat kesehatan dan sapras (alat ukur standar, TLD, Instalasi) yang dilakukan pengujian/kalibrasi/inspeksi, yang dihitung pada tahun berjalan	Jumlah alat kesehatan dan sapras (alat ukur standar, TLD, Instalasi)	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026

No. IKU	IKU	Uraian Deskriptif*				
		Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Bound
1	2	3	4	5	7	8
6	Jumlah metode pengujian dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK	Jumlah metode pengujian (uji produk alat kesehatan dan PKRT) dan kalibrasi yang dikembangkan BPAFK/LPAFK untuk menguji/kalibrasi parameter atau jenis produk yang sebelumnya belum mampu dilakukan	Jumlah metode pengujian (uji produk alat kesehatan dan PKRT) dan kalibrasi yang dihitung secara kumulatif	Jumlah metode pengujian dan kalibrasi	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengamanan alat dan fasilitas kesehatan dan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengawasan dan evaluasi fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
7	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Jumlah ruang lingkup pelayanan meliputi sarana prasarana/alat/ruang lingkup lain yang terakreditasi oleh lembaga atau institusi yang berwenang	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi yang dihitung secara kumulatif	Jumlah ruang lingkup	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengawasan dan evaluasi fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
8	Penambahan kemampuan jenis pelayanan	Jumlah penambahan kemampuan jenis pelayanan meliputi pengujian/kalibrasi alat kesehatan/alat ukur/inspeksi/ruang lingkup lain	Jumlah penambahan kemampuan jenis pelayanan yang dihitung secara kumulatif	Jumlah kemampuan jenis pelayanan	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
9	Persentase alat ukur standar yang telah dikalibrasi	Persentase alat ukur standar yang dikalibrasi terhadap jumlah alat ukur standar yang aktif digunakan	Jumlah alat ukur standar yang dikalibrasi di bagi jumlah alat ukur standar yang aktif digunakan dikali 100% (pada tahun berjalan)	Persentase alat standar terkalibrasi	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengawasan dan evaluasi fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
10	Jumlah perjanjian kerja sama/kemitraan di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh suatu lembaga/institusi yang mencakup layanan atau kolaborasi di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen perjanjian kerja sama yang masih berlaku, dihitung secara kumulatif	Jumlah perjanjian kerja sama	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengawasan dan evaluasi fasilitas kesehatan	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
11	Nilai SAKIP Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Angka yang mengukur tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Nilai ini dihitung berdasarkan lima komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%), dan Capaian Kinerja (15%)	Penilaian mandiri berdasarkan kertas kerja evaluasi yang direviu oleh Tim SKI dan apabila hasil penilaian mandiri pada kategori AA akan dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkes (pada tahun sebelumnya)	Nilai SAKIP	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026

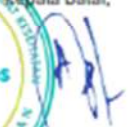
No. IKU	IKU	Uraian Deskriptif*				
		Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Bound
1	2	3	4	5	7	8
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat/Pelanggan adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik	$\text{Bobot nilai rata - rata terimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Uraian}} = \frac{1}{9} = 0,11$ $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Pengetil Per Uraian}}{\text{Total uraian yang terisi}} \times \text{NILAI PENYAMPAIS}$ (pada tahun berjalan)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
13	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Besarnya nilai kinerja anggaran Satuan Kerja diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan	50% Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA, pada tahun berjalan).	Nilai Kinerja Anggaran	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
14	Indeks Kualitas SDM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Ukuran yang menggambarkan kualitas ASN Kemenkes di Lingkungan Unit Kerja berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam hal pelaksanaan pengukuran, mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh leading institution yang disesuaikan	Hasil penjumlahan dari nilai Penerapan dimensi profesionalitas ASN sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 (pada tahun berjalan)	Indeks Kualitas SDM	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti UPT PAFK dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti UPT PAFK pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di UPT PAFK sesuai dengan periode Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikali 100, dihitung secara akumulasi	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026

No. IKU	IKU	Uraian Deskriptif*				
		Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Bound
1	2	3	4	5	7	8
16	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Nilai maturitas manajemen risiko UPT PAFK dari hasil penilaian mandiri/ APIP Kemenkes yang mengacu pada Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Hasil penilaian maturitas manajemen risiko UPT PAFK di tahun berjalan dengan kategori yaitu: Naive: ≤1 Aware: 1,01 – 2,00 Define: 2,01 – 3,00 Manage: 3,01 – 4,00 Enable: 4,01 – 5,00 dihitung sejak Semester 2 tahun sebelumnya sampai dengan Semester 1 tahun berjalan.	Nilai Maturitas Manajemen Risiko	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026
17	Perolehan pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya	Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara	Nilai Realisasi Pendapatan atas layanan UPT PAFK dalam 1 tahun (pada tahun berjalan)	Nilai Rupiah	Sesuai Misi BPAFK Surabaya : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui transparansi dan akuntabilitas	Dalam Jangka Waktu Januari sd Desember 2026

*) diisi penjelasan/justifikasi sesuai kriteria SMART

Keterangan :

1. *Specific*, mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unit/pegawai
2. *Measurable*, mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya
3. *Achievable*, merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang
4. *Relevant* IKU yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi serta tujuan strategis Organisasi
5. *Time Bounded*, memiliki batas waktu pencapaian; dan

Surabaya, Juli 2026
Kepala Balai,

Abadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
Nip. 197201301992031002



LAMPIRAN 5. SOP-AP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

 DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA	NOMOR SOP	: OT.02.02/E.X/5288.6/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 27 Mei 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya  Dr. Wahyudi Ifani, ST. M.Si NIP 197211181999031003
JUDUL SOP	: Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintah 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan. 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	1 Memahami ketentuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 2 Memiliki kemampuan mengolah, menganalisa serta menyajikan data dan informasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Pembuatan Surat 2 SOP Penyusunan Laporan 3 SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja	1 Komputer dan kelengkapannya 2 Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 3 Dokumen Penetapan Kinerja	
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN	
Apabila prosedur laporan kinerja tidak disusun dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan tidak sesuai standar	Disimpan sebagai Arsip aktif di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	

Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja BPAFK

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Kepala Subbagian Adum	Perencana	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk menyusun Laporan Kinerja					- Peraturan perundang-undangan - POK	5 menit	catatan arahan	
2	Menugaskan untuk menyusun Laporan Kinerja					catatan arahan	10 menit	catatan penugasan	
3	Menyiapkan data dan informasi untuk menyusun draft awal Laporan Kinerja					catatan penugasan	3 hari	Data laporan akuntabilitas kinerja	Sumber : BA Evaluasi, konten kinerja
4	Menyusun kerangka konsep draft awal Laporan Kinerja					Data laporan akuntabilitas kinerja	5 hari	Draft Awal Laporan Kinerja	
5	Membuat surat permintaan Laporan Kinerja Satker sebagai bahan Laporan Kinerja					Draft Awal Laporan Kinerja	70 menit	Surat permintaan Laporan Kinerja Satker	SOP Pembuatan Surat
6	Menugaskan untuk mengupdate Laporan Kinerja					Surat permintaan Laporan Kinerja Satker	10 menit	- Surat permintaan Laporan Kinerja Satker - Laporan Kinerja Satker	
7	Menganalisis, mengkompilasi dan menyusun draft laporan kinerja					- Surat permintaan Laporan Kinerja Satker - Laporan Kinerja Satker	3 hari	Draft Final Laporan Kinerja	SOP Penyusunan Laporan
8	Memeriksa draft laporan kinerja					Draft Final Laporan Kinerja	120 menit	Draft Final Laporan Kinerja	
9	Mendokumentasikan draft laporan kinerja Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai bahan Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja					Draft Final Laporan Kinerja	5 menit	Arsip	SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja

LAMPIRAN 6. SOP PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KINERJA

 DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA	NOMOR SOP	: OT.02.02/E.X/5288.7/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 27 Mei 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya  Dr. Wahyudi Ifani, ST. M.Si NIP 197211181999031003
	JUDUL SOP	: Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintah 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan. 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	1 Memahami ketentuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 2 Memiliki kemampuan mengolah, menganalisa serta menyajikan data dan informasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Pembuatan Surat 2 SOP Penyelenggaraan Rapat 3 SOP Penyusunan Laporan 4 SOP Penataan Arsip	1 Komputer dan kelengkapannya 2 Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 3 Dokumen Penetapan Kinerja	
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN	
Apabila prosedur Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan tidak sesuai standar.	Disimpan sebagai Arsip aktif di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	

Prosedur Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ka.Sub.Bag.A dum	Perencana	Koordinator/PI C	Tim SKI	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan							Peraturan perundang-undangan	5 menit	catatan arahan	
2	Menugaskan untuk pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas							catatan arahan	10 menit	catatan penugasan	
3	Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan							catatan penugasan	2 hari	- draft Kertas Kerja Reviu (KKR) Bantu - draft Catatan Hasil Reviu (CHR)	
4	Memperbaiki Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan hasil reviu							- draft Kertas Kerja Reviu (KKR) Bantu - draft Catatan Hasil Reviu (CHR)	300 menit	Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang telah diperbaiki	
5	Memeriksa draft perbaikan Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan							Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang telah diperbaiki	300 menit	- Laporan Kinerja BPAFK yang telah diperiksa - Kertas Kerja Reviu (KKR) Bantu - Catatan Hasil Reviu (CHR)	
6	Menyetujui hasil Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan serta memberikan arahan untuk mempersiapkan Reviu Laporan Kinerja dengan APIP							- Laporan Kinerja BPAFK yang telah diperiksa - Kertas Kerja Reviu (KKR) Bantu - Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah disetujui	300 menit	- Kertas Kerja Reviu (KKR) Bantu - Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah disetujui	
7	Menugaskan untuk membuat surat undangan Reviu Laporan Kinerja dan menyiapkan data dukung							- Kertas Kerja Reviu (KKR) Bantu - Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah disetujui	10 menit	catatan penugasan	
8	Membuat surat undangan Reviu Laporan Kinerja							catatan penugasan	70 menit	surat undangan	SOP Pembuatan Surat
9	Menyiapkan Data Dukung Kinerja Reviu Laporan Kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Satker							surat undangan	300 menit	Dakung Kinerja Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	
10	Melaksanakan desk Reviu Laporan Kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Satker							Dakung Kinerja Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	2 hari	draft Catatan Hasil Reviu (CHR)	SOP Penyelenggaraan Rapat
											

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ka.Sub.Bag.A dum	Perencana	Koordinator/PI C	Tim SKI	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
11	Menindaklanjuti draft catatan hasil revidi (CHR) dan memperbaiki Laporan Kinerja							draft Catatan Hasil Revidi (CHR)	300 menit	draft laporan kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang telah diperbaiki	SOP Penyusunan Laporan
13	Memeriksa draft Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan							draft laporan kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang telah diperbaiki	120 menit	draft laporan kinerja BPAFK Surabaya yang telah diperiksa	
14	Menyetujui draft perbaikan Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan							draft laporan kinerja BPAFK Surabaya Kesehatan yang telah diperiksa	30 menit	draft laporan kinerja BPAFK Surabaya yang telah disetujui	
15	Meminta persetujuan dan penetapan Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan kepada Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan serta memberi arahan untuk menindaklanjuti penyampaian laporan kinerja							draft laporan kinerja BPAFK Surabaya yang telah disetujui	30 menit	Laporan kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	
16	Menugaskan untuk menindaklanjuti penyampaian laporan kinerja							Laporan kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	10 menit	- Draft surat penyampaian - Laporan Kinerja BPAFK Surabaya	
17	Membuat surat pengantar dan menyampaikan serta mempublikasikan Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di media informasi							- Draft surat penyampaian - Laporan Kinerja BPAFK Surabaya	70 menit	- Surat Pengantar - tanda terima - Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang telah dipublikasikan	SOP Pembuatan Surat
19	Mendokumentasikan kelengkapan administrasi dan laporan akuntabilitas kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan							- Surat Pengantar - tanda terima - Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang telah dipublikasikan	5 menit	Arsip	SOP Penataan Arsip

LAMPIRAN 7. SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

 DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA	Nomor SOP	OT.02.02/E.X/5288.9/2024
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya  Dr. Wahyudi Ifani, ST. M.Si NIP 197211181999031003
	Nama SOP	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun	- Memahami mekanisme penyusunan proses bisnis - Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :	
- SOP Pembuatan Surat - SOP Penyelenggaraan Rapat - SOP Penyusunan Laporan	- ATK, komputer, internet - Peraturan perundang - undangan dan pedoman	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:	
Apabila Prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tingkat akuntabilitas kinerja tidak tergambar dengan baik	Disimpan sebagai Arsip aktif di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	

Prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPAFK	Ketua Tim Kerja	Perencana/Administrator Kesehatan	Tim SKI	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						Peraturan perundang-undangan	2 menit	catatan arahan	
2	Menugaskan untuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						catatan arahan	10 menit	catatan penugasan	
3	Menyiapkan Data Dukung Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						catatan penugasan	300 menit	Data dukung kinerja	
4	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						Data dukung kinerja	2 hari	Berita Acara Evaluasi AKIP, Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Lembar Kerja Evaluasi (LHE)	
5	Menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan menugaskan untuk mempersiapkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan APIP						Berita Acara Evaluasi AKIP, Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Lembar Kerja Evaluasi (LHE)	15 menit	catatan penugasan	
8	Membuat surat undangan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						catatan penugasan	70 menit	surat undangan	SOP Integrasi penciptaan naskah dinas menggunakan aplikasi SRIKANDI
9	Menyiapkan Data Dukung Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						surat undangan	300 menit	Dakung Kinerja Reviu Laporan Kinerja	
10	Melaksanakan desk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						Dakung Kinerja Reviu Laporan Kinerja	2 hari	draft Catatan Hasil Reviu (CHR)	SOP Pengelolaan Peminjaman Ruang Rapat Daring
11	Menindaklanjuti draft catatan lembar hasil evaluasi (LHE) dan kertas kerja evaluasi (KKE)						draft Catatan Hasil Reviu (CHR)	300 menit	draft laporan kinerja yang telah diperbaiki	SOP Penyusunan Laporan
13	Memeriksa draft Laporan Kinerja						draft laporan kinerja yang telah diperbaiki	60 menit	draft laporan kinerja yang telah diperiksa	
14	Menyetujui draft perbaikan Laporan Kinerja						draft laporan kinerja yang telah diperiksa	30 menit	draft laporan kinerja yang telah disetujui	
15	Meminta persetujuan dan penetapan Laporan Kinerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta memberi arahan untuk menindaklanjuti penyampaian laporan kinerja						draft laporan kinerja yang telah disetujui	30 menit	Laporan kinerja	
										

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPAFK	Ketua Tim Kerja	Perencana/ Administrator Kesehatan	Tim SKI	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
16	Menugaskan untuk menindaklanjuti penyampaian laporan kinerja						Laporan kinerja	5 menit	- Laporan kinerja - Catatan penugasan	
17	Membuat dan menyampaikan surat pengantar serta mempublikasikan Laporan Kinerja di media informasi serta mempublikasikan						- Laporan kinerja - Catatan penugasan	60 menit	- Surat Pengantar - Tanda terima - Laporan Kinerja yang telah dipublikasikan	SOP Integrasi penciptaan naskah dinas menggunakan aplikasi SRIKANDI
19	Mendokumentasikan kelengkapan administrasi dan laporan akuntabilitas kinerja						- Surat Pengantar - Tanda terima - Laporan Kinerja yang telah dipublikasikan	5 menit	Arsip	SOP Penataan Arsip Aktif

LAMPIRAN 8. SOP REVIU LAPORAN KINERJA ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA

 DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA	NOMOR SOP	: OT.02.02/E.X/5288.8/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 27 Mei 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya  Dr. Wahyudi Ifani, ST. M.Si NIP 197211181999031003
DASAR HUKUM 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintah 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan. 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	KUALIFIKASI PELAKSANA 1 Memahami ketentuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 2 Memiliki kemampuan mengolah, menganalisa serta menyajikan data dan informasi	
		KETERKAITAN 1 SOP Pembuatan Surat 2 SOP Penyelenggaraan Rapat 3 SOP Penyusunan Laporan 4 SOP Penataan Arsip
PERINGATAN Apabila Prosedur Reviu Laporan Kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan tidak sesuai standar.	PENCATATAN/PENDATAAN Disimpan sebagai Arsip aktif di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	

Prosedur Reviu Laporan Kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPAFK	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	Perencana	Ketua Tim Kerja	Tim SKI	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberi arahan untuk menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya							- Peraturan perundang-undangan - Laporan kinerja - Catatan Hasil Desk	5 menit	catatan arahan	
2	Menugaskan untuk menindaklanjuti hasil desk Reviu Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya							catatan arahan	10 menit	catatan penugasan	
3	Menganalisis catatan hasil desk (CHD)							catatan penugasan		Hasil analisis catatan hasil desk (CHD)	
4	Pembahasan catatan hasil desk (CHD)							Hasil analisis catatan hasil desk (CHD)	300 menit	draft perbaikan laporan kinerja	SOP Penyelenggaraan Rapat
5	Melaksanakan desk reviu laporan kinerja dengan Tim SKI							draft perbaikan laporan kinerja	60 menit	- draf KKR - draf CHR - Draf laporan kinerja	Pelaksanaan desk reviu dapat di lakukan apabila sudah di setujui oleh unit pembina
6	Menyampaikan hasil reviu kepada pimpinan							- draf KKR - draf CHR - Draf laporan kinerja	120 menit	- draf KKR - draf CHR - Draf laporan kinerja	SOP Penyelenggaraan Rapat
7	Menyetujui hasil Catatan Hasil Reviu (CHR) dan laporan kinerja serta menugaskan untuk menyampaikan laporan kinerja							- draf KKR - draf CHR - Draf laporan kinerja	300 menit	- KKR - CHR - laporan kinerja	
8	Menyampaikan laporan kinerja kepada Direktur jenderal							- KKR - CHR - laporan kinerja		- Laporan Kinerja - Tanda terima	Tembusan Sesditjen
9	Mendokumentasikan kelengkapan administrasi dan mempublikasikan laporan kinerja							- Laporan Kinerja - Tanda terima	5 menit	Arsip	SOP Penataan Arsip

LAMPIRAN 9. CASCADING KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

<https://drive.google.com/drive/folders/1y8DOdZCPnWC0Vih0T5OEpzXKHh9E-8Fe?usp=sharing>



Kemenkes
BPAFK Surabaya

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER I TAHUN 2026



Mengawal Alat Kesehatan
yang Aman, Bermutu dan
Bermanfaat bagi Masyarakat

